



**P U T U S A N**

**No. 65 PK/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. H. RUSKIN HAR, MBA;  
Tempat lahir : Desa Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir;  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/ 1 Oktober 1949;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dagang Gang Mugarabbin No. 2 Pekanbaru dan Jalan Jenderal Sudirman Simpang Tiga, Perumahan Bukit Raya Indah No.1 RT.02/01, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil sebagai Ahli Peneliti Madya/Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan / Balitbang Propinsi Riau (Mantan Sekretaris DPRD Propinsi Riau);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No.Ktps.121/II/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan IKHSAN,SH., MH selaku Ketua

Hal. 1 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No.148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 (yang perkaranya terpisah), pada tanggal 13 April 2006 sampai dengan bulan 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Jenderal Sudirman No.719 Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2006. Berdasarkan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 tersebut, pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau terdapat Pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, yang tiap kegiatannya masing-masing dianggarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan berikut :
  - 1 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
  - 2 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
  - 3 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
  - 4 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;
  - 5 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
  - 6 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking;
  - 7 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher untuk urusan Pemerintahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun anggaran untuk tiap-tiap kegiatan yang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut di atas, dialokasikan dari Anggaran Belanja Langsung Aparatur Daerah atas Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang peruntukannya adalah :

- Belanja Pegawai / Personalia sebesar Rp. 16.750.000,-
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.449.000.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 34.250.000,-

Pada Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.449.000.000,-

(empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut di atas, terdapat alokasi anggaran untuk Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan penggunaan untuk :

- a Biaya Enumerator sebanyak 11 (sebelas) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- b Biaya Peneliti Ahli sebanyak 6 (enam) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- c Biaya Pengolah Data sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa pelaksanaan 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut di atas menurut ketentuan harus berpedoman pada Peraturan Presiden Republik No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa / Pemerintah ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau untuk melaksanakan 7 Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan tersebut di atas, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan April sampai dengan Mei 2006 bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No.719 Pekanbaru, dengan sengaja tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan sengaja tidak membentuk Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan, langsung meminta IKHSAN, SH. MH yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Terdakwa dalam melakukan penelitian, untuk menyiapkan Pusat-Pusat Kajian yang ada di Lingkungan Universitas Riau sebagai pelaksana Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah berikut dengan kelengkapan-kelengkapan dokumennya antara lain berupa: Surat Keputusan

Hal. 3 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



Pembentukan Pusat Kajian, Kop Surat Pusat Kajian dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Pusat Kajian. Permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh IKHSAN, SH., MH. kemudian oleh IKHSAN, SH. MH disampaikan juga kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau;

- Bahwa setelah IKHSAN, SH. MH memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya IKHSAN, SH. MH bersama dengan rekannya bernama MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si menyerahkan kelengkapan Dokumen dan Proposal dari 3 (tiga) Pusat Kajian serta 1 (satu) Dokumen dan Proposal dari Badan Konsultasi Bantuan Hukum yang ada di Lingkungan Universitas Riau kepada Terdakwa berupa :

- 1 Dokumen dan Proposal Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau ;
- 2 Dokumen dan Proposal Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ;
- 3 Dokumen dan Proposal Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau ;
- 4 Dokumen dan Proposal Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau;

Disamping Terdakwa menerima Dokumen dan Proposal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa juga menerima Dokumen dan Proposal Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau dari Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si ;

- Bahwa karena dalam Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut di atas Terdakwa tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak membentuk Pejabat/Panitia/Unit layanan Pengadaan, kemudian Terdakwa memerintahkan AGUSANTO (staf Honorer pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau) untuk mengetik secara sekaligus seluruh kelengkapan dokumen-dokumen pengadaan berkaitan dengan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang konsepnya telah Terlebih dahulu dipersiapkan oleh Terdakwa ; Adapun kelengkapan dokumen pengadaan yang diketik oleh AGUSANTO atas perintah dari Terdakwa tersebut antara lain adalah:



1 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi :

- a Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/IV/2006 ... (tanpa Nomor) tertanggal 13 April 2006 berikut lampirannya berupa Owner Estimate tertanggal 11 April 2006 sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b Surat Penawaran Harga dari IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau No.018/PKOP-UNRIIIV/2006 tertanggal 15 April 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/IV/2006/16 & No.018/PKOP-UNRIIIV/2006 tertanggal 7 April 2006 ;
- d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IHKSAN, SH. MH selaku Ketua Pusat Kajian Otomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.16/SPPP/UM/IV/2006/027 tertanggal 7 April 2006 Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;

2 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan :

- a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau No.890/SP/UM/2006 ... (tanpa Nomor) tertanggal 18 Mei 2006 berikut lampirannya;

Hal. 5 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- b Surat Penawaran Harga dari MEYZI HERIYANTO, S.Sos., M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 026/PSPB-UNRI/IV/2006 tertanggal 19 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor 890/SP/UM/IV/2006/ .... (tanpa Nomor) & Nomor : .... (tanpa Nomor) tertanggal 23 Mei 2006 ;
- d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor : 34/SPPP/UM/V/2006/890 tertanggal 23 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

3 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

- a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fak. Hukum (PKHKP) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/V/2006/ (tanpa Nomor) tertanggal 19 Mei 2006 berikut lampirannya ;
- b Surat Penawaran Harga dari DODI HARYONO SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fak. Hukum (PKHKP) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tertanggal 20 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODI HARYONO SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UMA//2006/ .... (tanpa Nomor) & Nomor : ....(tanpa Nomor) tertanggal 23 Mei 2006 ;



- d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODI HARYONO SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fak. Hukum (PKHKP) Universitas Riau Nomor : 32/SPPP/UMA//2006/890 tertanggal 17 April 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 4 Untuk kegiatan pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim.
- a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/V/2006/.....(tanpa Nomor) tertanggal 30 Mei 2006 berikut lampirannya ;
- b Surat Penawaran Harga dari IKHSAN SH MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 021/PKOP-UNRIA//2006 tertanggal 31 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN SH MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor: 890/SP/UMA/I/2006/.... (tanpa Nomor) & Nomor.....(tanpa Nomor) tertanggal 2 Juni 2006 ;
- d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN SH MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor: 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tertanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 5 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan System Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
- a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas

Hal. 7 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor: 890/SP/UM/V/2006/.....(tanpa Nomor) tertanggal 24 Mei 2006 berikut lampirannya ;

- b Surat Penawaran Harga dari EMILDA FIRDAUS,SH, MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 011/BKBH-UNRI/V/2006 tertanggal 25 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS,SH, MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UMA/... (tanpa Nomor) & Nomor : .....(tanpa Nomor) tertanggal 29 Mei 2006 ;
- d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Tentang Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan System Pemerintahan dan Kemasyarakatan antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS,SH, MH. selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor: 33/SPPP/UM/V/2006/890 tertanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

6 Untuk kegiatan pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah tentang trafficking;

- a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretariat DPRD Provinsi Riau kepada Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/VI/2006/ ..... (tanpa Nomor) tertanggal 13 Juni 2006 berikut lampirannya ;
- b Surat Penawaran Harga dari Dra Hj.LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 39/PSW-UNRI/VI/2006 tertanggal 15 Juni 2006 berikut lampirannya berupa proposal kegiatan dengan penawaran sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra Hj.LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UMA/I/2006/ ..... (tanpa Nomor) & Nomor : 39/PSW-UNRIA/I/2006 tertanggal 15 Juni 2006 ;



- d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra Hj.LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 53/SPPP/UMA/I/2006/890 tertanggal 16 Juni 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Terhadap kelengkapan dokumen-dokumen yang diketik secara sekaligus pada waktu yang bersamaan oleh AGUSANTO atas perintah dari Terdakwa tersebut, pada kenyataannya masing-masing diberi tanggal yang berbeda-beda seolah-olah tiap-tiap dokumen tersebut dibuat pada waktu yang berbeda-beda.

- Bahwa setelah AGUSANTO selesai mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, AGUSANTO kemudian menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pengadaan tersebut kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan AGUSANTO untuk menyerahkan 5 (lima) dokumen kelengkapan administrasi kepada IKHSAN SH MH guna ditandatangani oleh MEYZI HERIYANTO S.Sos, M.Si, DODI HARYONO SHI, SH, MH, EMILDA FIRDAUS.SH, MH dan IKHSAN SH, MH, sedangkan dokumen kelengkapan administrasi Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Dra Hj.LENA FARIDA, M.Si untuk ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa selain menandatangani 6 (enam) dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut diatas, Terdakwa tertanggal 6 Juni 2006 telah membuat disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN selaku Kabag Umum dan ZUHANDA AGUS.SH.MH selaku Kabag Keuangan yang isinya "ACC/Proses : tugaskan SANTOK untuk proses MoU dan Adm lainnya". Disposisi Terdakwa tersebut langsung tercantum pada 4 (empat) Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang kelengkapan dokumen pengadaannya disiapkan oleh IKHSAN SH MH, yaitu :
- Proposal kegiatan pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang;
- Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim;

Hal. 9 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja;
- Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa selain telah membuat disposisi tertanggal 06 Juni 2006, Terdakwa pada tertanggal 16 Juni 2006 juga membuat disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN (Kabag Umum) dan ZUHANDA AGUS. SH. MH. (Kabag Keuangan) yang isinya "ACC/Proses MoU & SPP" terhadap Surat permohonan/penawaran kerjasama No : 39/PSW-UNRIA/I/2006 tanggal 15 Juni 2006, Hal : Kerjasama Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Trafficking yang diajukan oleh Dra. Hj. Lena Farida M.Si selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau;
- Bahwa sekalipun Terdakwa telah memberikan disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN dan ZUHANDA AGUS SH MH yang pada pokoknya memberi persetujuan terhadap proposal-proposal dan surat permohonan/penawaran kerjasama tersebut diatas agar diproses, pada kenyataannya Drs. H. SAID MUKHSIN selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau maupun ZUHANDA AGUS SH MH selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak pernah tahu dan sama sekali tidak pernah menerima disposisi Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tebagaimana diuraikan diatas, adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
  - 1 Pasal 9 ayat (2) yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD jo Pasal 1 angka (1) huruf (a) yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD;



- 2 Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa Panitia Pengadaan Wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jo Pasal 1 angka (8) yang mengatur bahwa Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan barang dan jasa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (3) diatur bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah :
    - a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
    - b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
    - c Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan;
    - d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
    - e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
    - f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
    - g Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
    - h Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
    - i Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan;
    - j Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.



- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (5) diatur bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/unit layanan pengadaan meliputi sebagai berikut :
  - a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - c Menyiapkan dokumen pengadaan;
  - d Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
  - e Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
  - f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - g Mengusulkan calon pemenang;
  - h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
  - i Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) jo Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut diatas, ternyata Terdakwa dalam proses pelaksanaan pengadaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah telah secara sekaligus mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan. Namun demikian, pada kenyataannya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdapat tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan yang tidak dilaksanakan. antara lain berupa :
  - 1 Tidak disusunnya perencanaan pengadaan barang / jasa, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 2 Tidak ditetapkan dan disahkannya harga perkiraan sendiri (HPS), Jadwal. tata cara pelaksanaan dan lokasi yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat



- pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3 Tidak ditetapkan dan disahkannya hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 4 Tidak disiapkan dan dilaksanakannya perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 5 Tidak dilaporkannya pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 6 Tidak dikendalikannya pelaksanaan perjanjian/kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 7 Tidak ditandatanganinya pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf j Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 8 Tidak dicantumkannya ketentuan pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf k Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 9 Tidak diangkatnya panitia pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal. 13 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 10 Tidak disusunnya jadwal cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 11 Tidak disusun dan disiapkannya harga perkiraan sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 12 Tidak dilakukannya penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf e Peraturan Presiden R I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 13 Tidak dilakukannya evaluasi terhadap penawaran yang masuk. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf f Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa disamping proses pelaksanaan pengadaan 6 (enam) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa juga melakukan proses pengadaan secara tidak semestinya karena telah menandatangani nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang waktunya mendahului dari tanggal pemberian persetujuan Terdakwa dalam proposal dan surat penawaran yang diajukan oleh Pusat Kajian, Pusat Study Penelitian dan Badan Konsultasi Bantuan Hukum, yaitu:

| No | Nama Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda dan Perda | Tanggal Persetujuan Terdakwa |                 | Tanggal Penandatanganan Terdakwa |  |
|----|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
|    |  | Proposal                     | Surat Penawaran | Nota Kesepahaman                 | Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan |
| 1. | Ranperda Tentang Ketenaga kerjaan                          | 6 Juni 2006                  | -               | 23 Mei 2006                      | 23 Mei 2006                            |
| 2. | Ranperda Tentang RPJP                                      | 6 Juni 2006                  | -               | 23 Mei 2006                      | 17 April 2006                          |
| 3. | Ranperda Tentang Tahura Sultan Syarif HASYIM               | 6 Juni 2006                  | -               | 2 Juni 2006                      | 29 Mei 2006                            |



|    |                                  |             |              |              |              |
|----|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4. | Perda yang ada dan tidak efektif | 6 Juni 2006 | -            | 29 Mei 2006  | 29 Mei 2006  |
| 5. | Ranperda Tentang Trafficking     |             | 16 Juni 2006 | 15 Juni 2006 | 16 Juli 2006 |

Bahwa 6 (enam) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengabaikan ketentuan Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah, pada pokoknya membuat hal-hal sebagai berikut :

1 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan peraturan daerah tentang pornografi dan pornoaksi :

- Waktu pelaksanaan selama 60 hari terhitung ditandatangani surat perjanjian;
- Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran;
- Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
- Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan;

2 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan :

- Waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 6 Juli 2006 ;
- Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
- Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;

Hal. 15 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan;
- 3 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :
  - a Waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 6 Juli 2006 ;
  - b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
  - c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
  - d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
  - e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
- 4 Untuk kegiatan pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah tentang taman hutan raya sultan syarif qasim (tahura)
  - a Waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juli 2006
  - b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
  - c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
  - d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
  - e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
- 5 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan System Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juli 2006 ;
  - b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
  - c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
  - d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
  - e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
- 6 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;
- a Waktu pelaksanaan selama 40 hari terhitung tanggal 16 Juni sampai dengan 25 Juli 2006 ;
  - b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
  - c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
  - d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
  - e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
- Bahwa 6 (enam) surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diatas, selain tidak memenuhi ketentuan Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diuraikan diatas, juga bertentangan dengan :
- 1 Dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Belanja operasi dan pemeliharaan (BOP) Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2006 bulan februari dan

Hal. 17 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maret 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan DASK-BOP anggaran biaya jasa pihak ketiga besarnya adalah Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tetapi pada kenyataannya dalam surat perjanjian terdapat harga borongan melebihi dari yang ditetapkan dalam DASK yaitu sebesar Rp 483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah)

2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Pemerintah Provinsi Riau Unit Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006, bulan Februari dan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan DASK besarnya anggaran Biaya Pihak Ketiga untuk biaya Enoumeretor dan biaya Peneliti Ahli dianggarkan untuk 3 (tiga) bulan tetapi pada kenyatannya pada surat perjanjian disebutkan waktu pelaksanaannya 40 hari, 45 hari dan 60 hari.
- Bahwa Terdakwa dalam rangka melaksanakan pengadaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2006, telah mengajukan 2 (dua) Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Drs. H. TENGKU RAZMARA, M.Si selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, masing-masing :
  1. Nomor: 911/KEU/2006-03/210 tanggal 17 Maret 2006 untuk kegiatan:
    - a. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Trafficking sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
    - b. Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pornografi dan Pornoaksi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  2. Surat Nomor: 911/KEU/2006-06/212 tanggal 15 Juni 2006, untuk kegiatan :
    - a. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
    - b. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
    - c. Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



- d Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Atas Permintaan Terdakwa kepada Drs. H. TENGGU RAZMARA, M.Si tersebut, kemudian diterbitkan 7 (tujuh) Surat Keputusan Otorisasi yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, yaitu :

- 1 Nomor : 00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
- 2 Nomor 00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
- 3 Nomor : 01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
- 4 Nomor : 01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
- 5 Nomor : 01061 /SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
- 6 Nomor : 01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima

Hal. 19 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

7 Nomor : 01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

- Bahwa setelah Gubernur Riau menerbitkan 7 (tujuh) Surat Keputusan Otorisasi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan SRI MEKKA S SH. MSI, selaku Pemegang Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pada tanggal 24 April 2006 mengajukan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran kepada Gubernur Riau (Biro Keuangan) masing-masing :

1 Nomor : 911/2006-04/17 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking

2 Nomor : 911/2006-04/18 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi

- Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada Gubernur Riau (Biro Keuangan) pada tanggal 24 April 2006 tersebut, Kepala Biro Keuangan kemudian menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar Pemerintah Daerah Provinsi Riau, yaitu :

a Nomor SPM : 000799/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi :

b Nomor SPM : 001969/BL-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking .

- Bahwa dengan terbitnya SPM Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 000799/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 di atas, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2006 telah menyetujui pembayaran untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada IKHSAN, SH., MH. sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekalipun tidak ada dokumen kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pekerjaan. Pembayaran tersebut dibukukan oleh SRI MEKKA S. SH. MSI, dalam Buku Kas Umum Tahun 2006 pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekalipun dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan jumlah yang ditentukan adalah sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada IKHSAN SH.MH sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (5) yang mengatur bahwa setiap pembayaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- Bahwa setelah pada tanggal 22 Juni 2006 Terdakwa melakukan pembayaran kepada IKHSAN SH.MH, Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2006 dimutasi ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau dan diganti oleh Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Riau;
- Bahwa sekalipun Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Terdakwa tetap dihubungi oleh IKHSAN SH MH yang menanyakan mengenai belum ada tanda tanda pelaksanaan kegiatan sehingga pada tanggal 17 Juli 2006 Terdakwa membuat dan mengirim surat kepada ZUHANDA AGUS dan SRI MEKKA S SH. MSI yang isinya :
  - 1 Mohon sangat bantuannya agar dapat dibantu proses pelaksanaan kegiatan rekan kita IKHSAN SH MH Cs tentang
    - a Pengkajian dan penelaahan RPJP Riau;
    - b Pengkajian dan penelaahan Hutan Tropis;
    - c Pengkajian dan penelaahan tentang Perda-perda lama;
    - d Pengkajian dan penelaahan tentang Ketenagakerjaan;
  - 2 Saya, IKHSAN ikut aktif dalam kegiatan tersebut;

Hal. 21 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Terima kasih;
- Bahwa sebagai upaya menyelesaikan kegiatan pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, SRI MEKKA S, SH., MSI. selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD Provinsi Riau menandatangani kwitansi pembayaran yang disetujui/diketahui oleh Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA untuk membayar 5 (lima) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang masing-masing surat perjanjiannya telah ditandatangani oleh Terdakwa. Penerbitan kwitansi pembayaran oleh SRI MEKKA S SH. MSI dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai bukti bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima) kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :
- 1 Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS. SH. MH untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
  - 2 Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada IKHSAN SH MH untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
  - 3 Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada DODI HARYONO, SH., SH., MH. untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP.
  - 4 Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada MEYZI HERIYANTO. S.Sos., MSi untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tenaga Kerja.
  - 5 Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah ditandatanganinya 1 (satu) kwitansi pembayaran oleh SRI MEKKA S, SH. MSI dan Terdakwa serta 5 (lima) kwitansi pembayaran oleh SRI MEKKA S, SH. MSI dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA untuk 6 (enam) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, IKHSAN, SH., MH. kemudian menerima pembayaran dana untuk 5 (lima) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang besarnya setelah dikurangkan dengan potongan pajak dan denda keterlambatan adalah Rp. 1.686.608.155,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian, yaitu :

- 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi
- 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Tahura Sultan Syarif Hasyim (Nomor 1 dan 2) .....Rp.738.608.155,-
- 3 Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Ketenagakerjaan .....Rp.316.000.000,-
- 4 Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)... Rp.316.000.000,-
- 5 Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak  
Efektif Dalam Konteks Perubahan  
System Pemerintahan dan Kemasyarakatan ..... Rp.316.000.000,-

Sedangkan dana untuk 1 (satu) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking diterima oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si yang besarnya setelah dikurangi potongan pajak dan denda keterlambatan adalah sebesar Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah);

- Bahwa dari dana sebesar Rp 1.686.608.155,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh IKHSAN, SH., MH., selanjutnya pada bulan Desember 2006 oleh IKHSAN, SH., MH. dana tersebut dipertanggungjawabkan secara fiktif. Pada kenyataannya dana yang dipergunakan oleh IKHSAN SH MH untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah hanya sebesar Rp. 345.410.500,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

  - 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura)

Hal. 23 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



sebesar Rp. 205.910.500,- (dua ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;

- 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 4 Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan System Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Sedangkan selebihnya sebesar Rp.1.686.608.155,- - Rp. 345.410.500,- = Rp. 1.341.197.655,- dikuasai oleh IKHSAN. SH., MH.

- Adapun dari dana yang diterima oleh Dra. Hj.LENA FARIDA, M.Si untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking sebesar Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ternyata yang dipergunakan oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking hanya sebesar Rp. 117.941.667,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) Sedangkan selebihnya sebesar Rp. 316.000.000,- Rp.117.941.667,- = Rp.198.058.333,- dikuasai oleh Dra. Hj.LENA FARIDA. M.Si;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam :
  - a Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Pemerintah Provinsi Riau Unit Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006;

Sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya IKHSAN, SH., MH. sebesar Rp. 1.341.197.655,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan Dra Hj.LENA FARIDA, M.Si sebesar Rp. 198.058.333,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan IKHSAN SH MH telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 1.539.255.988,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : S-288/PW.04/5/2007 tanggal 13 September 2007 Perihal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Kuangan Negara atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.121/11/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan IKHSAN, SH., MH. selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Rektor UNRI Nomor 148/J191.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 (yang disidangkan secara terpisah) pada tanggal 13 April 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006. bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Nomor 719 Pekanbaru atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuan

Hal. 25 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propivinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 123 ayat 3 mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

- 1 Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2 Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- 3 Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 4 Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan daerah;

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Sekretariat DPRD Provinsi Riau pasal 7, Terdakwa juga mempunyai tugas antara lain melaksanakan rencana kerja dan program dibidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Adapun selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1 huruf a dan Pasal 1 angka 8, Terdakwa berkewajiban untuk mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2006. Berdasarkan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 tersebut, pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau terdapat Pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, yang tiap kegiatannya masing-masing dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

  - 1 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan pornoaksi;



- 2 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan ;
- 3 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ;
- 4 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;
- 5 Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan System Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
- 6 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking
- 7 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher untuk urusan Pemerintahan.

Adapun anggaran untuk tiap-tiap kegiatan yang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut diatas, dialokasikan dari Anggaran Belanja Langsung Aparatur Daerah atas Belanja Operasi dan Pemeliharaan yang peruntukannya adalah :

- a Belanja Pegawai / Personalia sebesar Rp. 16.750.000,-
- b Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 449.000.000,-
- c Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 34.250.000,-

Pada anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut diatas, terdapat alokasi anggaran untuk Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian penggunaan untuk :

- a Biaya Enumerator sebanyak 11 (sebelas) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - b Biaya Peneliti Ahli sebanyak 6 (enam) orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - c Biaya Pengolah data sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk melaksanakan 7 (tujuh) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan tersebut diatas, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan April sampai dengan Mei 2006, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Nomor 719 Pekanbaru, dengan sengaja tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan dengan sengaja tidak membentuk Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan, langsung meminta IKHSAN, SH., MH. yang sebelumnya pernah bekerjasama

Hal. 27 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



dengan Terdakwa dalam melakukan penelitian, untuk menyiapkan Pusat-Pusat Kajian yang ada di Lingkungan Universitas Riau sebagai pelaksana Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah berikut dengan kelengkapan-kelengkapan dokumennya antara lain berupa: Surat Keputusan Pembentukan Pusat Kajian, Kop Surat Pusat Kajian dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Pusat Kajian Permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh IKHSAN SH MH, kemudian oleh IKHSAN SH. MH. disampaikan juga kepada Dra Hj.LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau;

- Bahwa setelah IKHSAN, SH., MH. memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya IKHSAN,SH.MH bersama dengan rekannya bernama MEYZI HERIYANTO,S.Sos.Msi menyerahkan kelengkapan dokumen dan proposal dari 3 (tiga) pusat kajian serta 1 (satu) Dokumen dan Proposal dari Badan Konsultasi Bantuan Hukum yang ada di lingkungan Universitas Riau kepada Terdakwa berupa :
  - 1 Dokumen dan Proposal Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau;
  - 2 Dokumen dan Proposal Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
  - 3 Dokumen dan Proposal Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau;
  - 4 Dokumen dan Proposal Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau;

Disamping Terdakwa menerima dokumen dan proposal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa juga menerima dokumen dan proposal Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau dari Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si;

- Bahwa karena dalam Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut diatas Terdakwa tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak membentuk Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan, kemudian Terdakwa memerintahkan AGUSANTO (staf Honorer pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau) untuk mengetik secara sekaligus seluruh kelengkapan dokumen - dokumen pengadaan berkaitan dengan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang konsepnya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Terdakwa;



Adapun Kelengkapan dokumen pengadaan yang diketik oleh AGUSANTO atas perintah dari Terdakwa tersebut antara lain adalah :

- 1 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pornografi dan Pornoaksi :
  - a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor :890/SP/UM/IV/2006/ ..... (tanpa Nomor) tertanggal 13 April 2006 berikut lampirannya berupa Owner Estimate tertanggal 11 April 2006 sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b Surat Penawaran Harga dari IKHSAN SH MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006 tertanggal 15 April 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN SH MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/IV/2006/16 & Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006 tertanggal 7 April 2006;
  - d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang pornografi dan pornoaksi antara Terdakwa selaku sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN SH MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor : 16/SPPP/UM/IV/2005/027 tertanggal 7 April 2006 sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- 2 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan :
  - a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor: 890/SP/UMA//2006/ ..... (tanpa Nomor) tertanggal 18 Mei 2006 berikut lampirannya ;

Hal. 29 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- b Surat Penawaran Harga dari MEYZI HERIYANTO S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 026/PSPB-UNRI/IV/2006 tertanggal 19 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor 890/SP/UM/IV/2006/ .... (tanpa Nomor) & Nomor : .... (tanpa Nomor) tertanggal 23 Mei 2006 ;
- d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang tentang Ketenagakerjaan antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO S.Sos, M.Si selaku Ketua Pusat Study Pengembangan Bisnis (PSPB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor : 34/SPPP/UM/V/2006/890 tertanggal 23 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- 3 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :
  - a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UMA//2006/ ..... (tanpa Nomor) tertanggal 19 Mei 2006 berikut lampirannya ;
  - b Surat Penawaran Harga dari DODI HARYONO SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fak. Hukum (PKHKP) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tertanggal 20 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODI HARYONO SHI, SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fak Hukum (PKHKP) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UMA//2006/ .... (tanpa Nomor) & Nomor : .... (tanpa Nomor) tertanggal 23 Mei 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Surat Perjanjian pelaksanaan Kegiatan pekerjaan pengkajian dan penelaahaan rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODI HARYONO SH. SH, MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (PKHKP) Universitas Riau Nomor : 32/SPPP/UMA//2006/890 tertanggal 17 April 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- 4 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;
  - a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor : 890/SP/UMA//2006/ ..... (tanpa Nomor) tertanggal 30 Mei 2006 berikut lampirannya ;
  - b Surat Penawaran Harga dari IKHSAN SH MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 021/PKOP-UNRIA/2006 tertanggal 31 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN SH MH selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/VI/2006/ .... (tanpa Nomor) tertanggal 29 Mei 2006;
  - d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN, SH., MH. selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor : 35/SPPP/UMA/I/2006/890 tertanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 5 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan System Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
  - a Surat Penawaran Kerjasama dan Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas

Hal. 31 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Riau Nomor : 890/SP/UMA/2006/ .... (tanpa Nomor) tertanggal 24 Mei 2006 berikut lampirannya ;
- b Surat Penawaran Harga dari EMILDA FIRDAUS,SH, MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 011/BKBH-UNRIA//2006 tertanggal 25 Mei 2006 berikut lampirannya sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS,SH, MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM7V/... (tanpa Nomor) & Nomor : ..... (tanpa Nomor) tertanggal 29 Mei 2006;
  - d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan kegiatan / pekerjaan pengkajian dan Penelaahan tentang peraturan Daerah yang ada dan tidak efektif dalam konteks perubahan system pemerintahan dan Kemasyarakatan antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS.SH. MH selaku Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 33/SPPP/UM/V/2006/890 tertanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 6 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking ;
- a Surat Penawaran Kerjasama dari Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau kepada Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UMA/I/2006/ ..... (tanpa Nomor) tertanggal 13 Juni 2006 berikut lampirannya ;
  - b Surat Penawaran Harga dari Dra Hj. LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau kepada Sekretaris DPRD Riau Nomor : 39/PSW-UNRI/VI/2006 tertanggal 15 Juni 2006 berikut lampirannya berupa proposal kegiatan dengan penawaran sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - c Nota Kesepahaman antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra Hj.LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/VI/2006/ ..... (tanpa Nomor) & Nomor : 39/PSW-UNRIA/I/2006 tertanggal 15 Juni 2006 ;



d Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking antara Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra Hj.LENA FARIDA, M.Si selaku Kepala Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tertanggal 16 Juni 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Terhadap kelengkapan dokumen-dokumen yang diketik secara sekaligus pada waktu yang bersamaan oleh AGUSANTO atas perintah dari Terdakwa tersebut, masing-masing diberi tanggal yang berbeda-beda seolah-olah tiap-tiap dokumen tersebut dibuat pada waktu yang berbeda-beda.

- Bahwa setelah AGUSANTO selesai mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, AGUSANTO kemudian menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pengadaan tersebut kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan AGUSANTO untuk menyerahkan 5 (lima) dokumen kelengkapan administrasi kepada IKHSAN, SH., MH. guna ditandatangani oleh IKHSAN SH, MH, MEYZI HERIYANTO, S.Sos, M.Si, DODI HARYONO SHI, SH, MH dan EMILDA FIRDAUS, SH., MH. sedangkan dokumen kelengkapan administrasi Pusat Study Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa selain menandatangani 6 (enam) dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut diatas. Terdakwa tertanggal 6 Juni 2006 telah membuat disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN selaku Kabag Umum dan ZUHANDA AGUS SH MH selaku Kabag Keuangan yang isinya "ACC/Proses : tugaskan SANTOK untuk proses MOU dan Adm lainnya". Disposisi Terdakwa tersebut langsung tercantum pada 4 (empat) proposal kegiatan pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang diajukan oleh IKHSAN SH MH. yaitu :
  - 1 Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang ;
  - 2 Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ;
  - 3 Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja ;

Hal. 33 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



4 Proposal Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

- Bahwa Terdakwa selain telah membuat disposisi tertanggal 06 Juni 2006, Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2006 juga membuat disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN (Kabag Umum) dan ZUHANDA AGUS. SH. MH (Kabag Keuangan) yang isinya "ACC/Proses MoU & SPP" terhadap Surat permohonan/penawaran kerjasama Nomor : 39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006, Hal : Kerjasama Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Trafficking yang diajukan oleh Dra. Hj. LENA FARIDA M.Si selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau.
- Bahwa sekalipun Terdakwa telah memberikan disposisi kepada Drs. H. SAID MUKHSIN dan ZUHANDA AGUS SH MH yang pada pokoknya memberi persetujuan terhadap proposal-proposal dan surat permohonan/penawaran kerjasama tersebut diatas agar diproses, pada kenyataannya Drs. H. SAID MUKHSIN selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau maupun ZUHANDA AGUS SH MH selaku Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak pernah tahu dan sama sekali tidak pernah menerima disposisi Terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa dalam proses pengadaan 6 (enam) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut diatas, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan selaku Pengguna Anggaran yaitu tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak membentuk Panitia Pengadaan. Penyalahgunaan kewenangan Terdakwa tersebut tidak mengindahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
  - 1 Pasal 9 ayat (2) yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD jo Pasal 1 angka (1) huruf (a) yang mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD;
  - 2 Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa Panitia Pengadaan Wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta



rupiah) jo Pasal 1 angka (8) yang mengatur bahwa Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan barang dan jasa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (3) diatur bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah :
  - a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
  - b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
  - c Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
  - d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
  - e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
  - g Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
  - h Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - i Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN /BUMD dengan berita acara penyerahan;
  - j Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal

Hal. 35 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



10 ayat (5) diatur bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/unit layanan pengadaan meliputi sebagai berikut :

- a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - c Menyiapkan dokumen pengadaan;
  - d Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
  - e Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
  - f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - g Mengusulkan calon pemenang;
  - h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
  - i Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak membentuk Panitia Pengadaan, mengakibatkan Terdakwa telah sekaligus mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan. Namun demikian, pada kenyataannya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdapat tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan yang tidak dilaksanakan, antara lain berupa :
    - 1 Tidak disusunnya perencanaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
    - 2 Tidak ditetapkan dan disahkannya harga perkiraan sendiri (HPS), Jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.



- 3 Tidak ditetapkan dan disahkannya hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4 Tidak disiapkan dan dilaksanakannya perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5 Tidak dilaporkannya pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6 Tidak dikendalikannya pelaksanaan perjanjian/kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 7 Tidak ditandatanganinya pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf j Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 8 Tidak dicantumkannya ketentuan pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf k Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 9 Tidak diangkatnya Panitia Pengadaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- 10 Tidak disusunnya jadwal cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal. 37 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Tidak disusun dan disiapkannya harga perkiraan sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 12 Tidak dilakukannya penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf e Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 13 Tidak dilakukannya evaluasi terhadap penawaran yang masuk, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf f Peraturan Presiden R.I Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan 6 (enam) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, Terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau yaitu tidak melaksanakan rencana kerja dan program dibidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa yang dilakukan dalam proses pengadaan tersebut adalah Terdakwa telah menandatangani secara tidak semestinya nota Kesepahaman dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang waktunya mendahului dari tanggal pemberian persetujuan Terdakwa dalam proposal dan surat penawaran yang diajukan oleh Pusat Kajian, Pusat Study Penelitian dan Badan Konsultasi Bantuan Hukum, dengan rincian :

| No | Nama Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda dan Perda | Tanggal Persetujuan Terdakwa |                 | Tanggal Penandatanganan Terdakwa |  |
|----|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
|    |  | Proposal                     | Surat Penawaran | Nota Kesepahaman                 | Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan |
| 1. | Ranperda Tentang Ketenaga kerjaan                          | 6 Juni 2006                  | -               | 23 Mei 2006                      | 23 Mei 2006                            |
| 2. | Ranperda Tentang RPJP                                      | 6 Juni 2006                  | -               | 23 Mei 2006                      | 17 April 2006                          |
| 3. | Ranperda Tentang Tahura Sultan Syarif HASYIM               | 6 Juni 2006                  | -               | 2 Juni 2006                      | 29 Mei 2006                            |
| 4. | Perda yang ada dan tidak efektif                           | 6 Juni 2006                  | -               | 29 Mei 2006                      | 29 Mei 2006                            |
| 5. | Ranperda Tentang Traficking                                |                              | 16 Juni 2006    | 15 Juni 2006                     | 16 Juli 2006                           |



Penyalahgunaan kewenangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mengindahkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

- Bahwa 6 (enam) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dan selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

- a Waktu pelaksanaan selama 60 hari terhitung ditandatanganinya surat perjanjian
- b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah)
- c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
- d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
- e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlamabatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.

2 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan :

- a Waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 6 Juli 2006 ;
- b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
- d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
- e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari

Hal. 39 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
- 3 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)
    - a Waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 6 Juli 2006
    - b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
    - c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
    - d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
    - e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
  - 4 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura) ;
    - a Waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juli 2006 ;
    - b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
    - c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
    - d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
    - e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
  - 5 Untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan System Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
    - a Waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juli 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
  - c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
  - d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
  - e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dari keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
- 6 Untuk Kegiatan Pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang trafficking
- a Waktu pelaksanaan selama 40 hari terhitung tanggal 16 Juni sampai dengan 25 Juli 2006
  - b Jumlah harga borongan pekerjaan adalah sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
  - c Pemeriksaan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan dilakukan dan diserahkan kepada Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran ;
  - d Cara pembayaran adalah secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan diselesaikan ;
  - e Apabila pekerjaan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya, maka pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari kerja dan keterlambatan penyerahan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
- Bahwa 6 (enam) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diatas, selain pembuatannya dilakukan oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan juga tidak mengindahkan :
- 1 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Pemerintah Provinsi Riau Unit Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 bulan Februari dan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan DASK-BOP anggaran biaya jasa pihak ketiga besarnya adalah Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tetapi pada kenyataannya dalam surat

Hal. 41 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian terdapat harga borongan melebihi dari yang ditetapkan dalam DASK yaitu sebesar Rp 483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

- 2 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Pemerintah Provinsi Riau Unit Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006, bulan Februari dan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Berdasarkan DASK besarnya anggaran Biaya Pihak Ketiga untuk biaya Enoumeretor dan biaya Peneliti Ahli dianggarkan untuk 3 bulan tetapi pada kenyatannya pada surat perjanjian disebutkan waktu pelaksanaannya 40 hari, 45 hari dan 60 hari;
- Bahwa Terdakwa dalam rangka melaksanakan pengadaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2006, telah mengajukan 2 (dua) Surat Permintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Drs. H. TENGKU RAZMARA, M.Si selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, masing-masing:
  - 1 Nomor: 911/KEU/2006-03/210 tanggal 17 Maret 2006 untuk kegiatan:
    - a Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Trafficking sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
    - b Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pornografi dan Pornoaksi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 2 Surat Nomor 91/KEU/2006-06/212 tanggal 15 Juni 2006, untuk kegiatan :
    - a Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
    - b Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
    - c Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
    - d Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
    - e Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permintaan Terdakwa kepada Drs. H. TENGGU RAZMARA, M.Si selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau tersebut, kemudian diterbitkan 7 (tujuh) Surat Keputusan Otorisasi yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, yaitu :

- 1 Nomor : 00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
  - 2 Nomor : 00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
  - 3 Nomor : 01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 4 Nomor : 01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 5 Nomor : 01061/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 6 Nomor : 01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - 7 Nomor : 01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006, tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah Gubernur Riau menerbitkan otorisasi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan SRI MEKKA .S, SH.Msi, selaku Pemegang Kas Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pada

Hal. 43 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 April 2006 mengajukan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran kepada Gubernur Riau (Biro Keuangan) masing-masing :

- a Nomor : 91 1/2006-04/17 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking
  - b Nomor : 911/2006-04/18 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada Gubernur Riau (Biro Keuangan) pada tanggal 24 April 2006 tersebut, Kepala Biro Keuangan kemudian menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar Pemerintah Daerah Provinsi Riau, yaitu:
    - 1 Nomor SPM : 000799/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi ;
    - 2 Nomor SPM : 001969/BL-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking.
  - Bahwa dengan terbitnya SPM Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 000799/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 di atas, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2006 telah menyetujui pembayaran untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada IKHSAN, SH., MH. sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekalipun tidak ada dokumen kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pembayaran tersebut dibukukan oleh SRI MEKKA S SH. MSI, dalam Buku Kas Umum Tahun 2006 pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.483.250.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekalipun dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan jumlah yang ditentukan adalah sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada IKHSAN, SH., MH. sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara



Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (5) yang mengatur bahwa setiap pembayaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;

- Bahwa setelah pada tanggal 22 Juni 2006 Terdakwa melakukan pembayaran kepada IKHSAN SH.MH, Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2006 dimutasi ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau dan diganti oleh Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II. a di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Riau;
- Bahwa sekalipun Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Terdakwa tetap dihubungi oleh IKHSAN, SH., MH. yang menanyakan mengenai belum ada tanda tanda pelaksanaan kegiatan sehingga pada tanggal 17 Juli 2006 Terdakwa membuat dan mengirim surat kepada ZUHANDA AGUS dan SRI MEKKA S., SH., MSI. yang isinya :
  - 4 Mohon sangat bantuannya agar dapat dibantu'proses pelaksanaan kegiatan rekan kita IKHSAN SH MH Cs tentang
    - e Pengkajian dan penelaahan RPJP Riau;
    - f Pengkajian dan penelaahan Hutan Tropis;
    - g Pengkajian dan penelaahan tentang Perda-perda lama;
    - h Pengkajian dan penelaahan tentang Ketenagakerjaan;
  - 5 Saya, IKHSAN ikut aktif dalam kegiatan tersebut;
  - 6 Terima kasih;
- Bahwa sebagai upaya menyelesaikan kegiatan pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, SRI MEKKA S., SH., MSI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD Provinsi Riau menandatangani kwitansi pembayaran yang disetujui/diketahui oleh Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA untuk membayar 5 (lima) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang masing-masing surat perjanjiannya telah ditandatangani oleh Terdakwa. Penerbitan kwitansi pembayaran oleh SRI MEKKA S. SH., MSI dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut tanpa dilengkapi dengan Berita Acara

Hal. 45 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai bukti bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima) kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS. SH. MH untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 2 Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada IKHSAN SH MH untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
- 3 Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada DODI HARYONO, SHI., SH. MH untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP.
- 4 Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada MEYZI HERIYANTO. S.Sos., MSI untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah Tenaga Kerja.
- 5 Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking.
- Bahwa dengan telah ditandatanganinya 1 (satu) kwitansi pembayaran oleh SRI MEKKA S SH. MSI dan Terdakwa serta 5 (lima) kwitansi pembayaran oleh SRI MEKKA S SH. MSI dan Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA untuk 6 (enam) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, IKHSAN, SH., MH. kemudian menerima pembayaran dana untuk 5 (lima) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang besarnya setelah dikurangkan dengan potongan pajak dan denda keterlambatan adalah Rp. 1.686.608.155,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian, yaitu :
  - 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Tahura Sultan Syarif Hasyim (Nomor 1 dan 2) .....Rp.738.608.155,-
- 3 Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Ketenagakerjaan .....Rp.316.000.000,-
- 4 Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)... Rp.316.000.000,-
- 5 Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak  
Efektif Dalam Konteks Perubahan  
System Pemerintahan dan Kemasyarakatan ..... Rp.316.000.000,-

Sedangkan dana untuk 1 (satu) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking diterima oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si yang besarnya setelah dikurangi potongan pajak dan denda keterlambatan adalah sebesar Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah);

- Bahwa dari dana sebesar Rp 1.686.608.155,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh IKHSAN, SH., MH. selanjutnya pada bulan Desember 2006 oleh IKHSAN, SH., MH. dana tersebut dipertanggungjawabkan secara fiktif. Pada kenyataannya dana yang dipergunakan oleh IKHSAN SH MH untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah hanya sebesar Rp 345.410.500,- (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura) sebesar Rp 205.910.500,- (dua ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;
- 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 4 Peraturan Daerah Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan System Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Sedangkan selebihnya sebesar Rp.1.686.608.155,- - Rp. 345.410.500,- = Rp 1.341.197.655,- dikuasai oleh IKHSAN, SH., MH.

Hal. 47 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun dari dana yang diterima oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking sebesar Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ternyata yang dipergunakan oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking hanya sebesar Rp. 117.941.667,- (seratus tujuh belas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) Sedangkan selebihnya sebesar Rp. 316.000.000,- - Rp. 117 941.667,- = Rp.198.058.333,- dikuasai oleh Dra. Hj. LENA FARIDA, M.Si;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan IKHSAN, SH. MH. telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 1.539.255.988,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : S-288/PW.04/5/2007 tanggal 13 September 2007 Perihal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Kuangan Negara atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2008 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H RUSKIN HAR, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang di lakukan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menghukum Terdakwa Drs. H RUSKIN HAR, MBA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi selama berada dalam tahanan sebelum



putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan.
- 4 Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.539.255.988.- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah. ditanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yaitu IKHSAN, SH., MH. dan jika terpidana Drs. H. RUSKIN HAR, MBA tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Daftar Gaji an. TUTI KHAIRANI HARAHAHAP, S.Sos
  - 2 Daftar Gaji an. Drs. KASMIRUDIN, Msi
  - 3 Daftar Gaji an. Drs. ENDANG SUTRISNA
  - 4 Daftar Gaji an. TENGKU JUHARMIN.
  - 5 Daftar Gaji an. HTRF SIMANJUNTAK, M.Si
  - 6 Daftar Gaji an. SOFIA ACHNES, M.Si.
  - 7 Daftar Gaji an. Rd. SITI SOFRO.
  - 8 Daftar Gaji an. Drs. ISRIL, MH
  - 9 Daftar Gaji an. RIADAYATI.
  - 10 Daftar Gaji an. AHMAD RIFAI, SP, MP
  - 11 Daftar Gaji an. DODI HARYONO, SHL., SH., MH
  - 12 Daftar Gaji an. EMILDA FIEDAUS, SH.
  - 13 Daftar Gaji an. IKHSAN, SH.MH
  - 14 Daftar Gaji an. MEYZI HERIYANTO, S.Sos. M.Si.
  - 15 Daftar Gaji an. Dra. LENA FARIDA, M.Si.
  - 16 Daftar Gaji an. INDRA SAFRI, S.Sos, M.Si.
  - 17 Ijazah Magister Sains an. INDRA SAFRI
  - 18 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial an. INDRA SAFRI.
  - 19 Ijazah Sarjana Hukum an. T. JUHARMIN
  - 20 Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa an. T. JUHARMIN.

Hal. 49 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 21 Ijazah Strata Satu jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah an. DODY HARYONO
- 22 Ijazah Sarjana Hukum an. DODI HARYONO.
- 23 Ijazah Magister Hukum an. DODI HARYONO.
- 24 Ijazah Magister Sains an. ENDANG SUTRISNA.
- 25 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial Politik an. ENDANG SUTRISNA.
- 26 Ijazah Sarjana Pertanian an. AHMAD RIFAI.
- 27 Ijazah Magister Pertanian an. AHMAD RIFAI.
- 28 Ijazah Magister Hukum an. ISRIL
- 29 Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan.
- 30 Ijazah Magister Sains an. MEYZI HERIYANTO.
- 31 Postgraduate Program an. MEYZI HERIYANTO.
- 32 Ijazah Magister Sains an. Rd. SITI SOFRO.
- 33 Transkrip Akademik an. Rd. SITI SOFRO.
- 34 Curriculum Vitae an. Rd. SITI SOFRO.
- 35 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu politik an. 5AIMAN.
- 36 Ijazah Magister Sains an. SAIMAN.
- 37 Ijazah Sarjana Hukum an. EMILDA FIRDAUS.
- 38 Ijazah Magister Hukum an. EMILDA FIRDAUS.
- 39 Daftar Pembayaran Transportasi tim Pengembangan Perencanaan FISIP UNRI, Dana Bersumber dan Program Non Reguler FISIP UNRI untuk bulan Juni 2007.
- 40 Tanda terima penyerahan 1 (satu) bundel Draf Laporan Akhir tanggal 25 Oktober 2006.
- 41 Surat Nomor : 005/PR/X/2006/927 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Penjelasan mengenai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif Dewan.
- 42 Surat Nomor : 56/PSPB-UNRI/XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal ijin pengumpulan data
- 43 Surat Tugas Nomor : 032/PKOP-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006.
- 44 Jadwal Kegiatan presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau.
- 45 Arus Kegiatan Sistem Swakelola.
- 46 1 (satu) lembar buku Bank tanggal 16 Agustus 2006 (legalisir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.574.1/XI/2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Propinsi Riau TA. 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (legalisir).
- 48 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita, S.Sos. tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 49 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan awal/revisi Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.34.250.000,- (legalisir)
- 50 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 7.000.000,- (legalisir)
- 51 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 52 4 (empat) lembar SPPD atas nama Drs. Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 53 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 7.000.000,-(legalisir)
- 54 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 55 3 (tiga) lembar SPPD atas nama Zuhanda Agus,SH,MH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 56 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,-(legalisir)
- 57 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 58 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita,S,Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 59 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 60 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,- (legalisir)

Hal. 51 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 62 4 (empat) lembar SPPD atas nama Hendri HK,SH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 63 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,-(legalisir)
- 64 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 65 4 (empat) lembar SPPD atas nama M.Erlan,SE tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 66 Perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2 01 04 2 03 01 01 1 10 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 34.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legciiSir)
- 67 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 5.180.000,- tanggal 28 Juni 2006 (legalisir).
- 68 6 (enam) lembar Purchase Order bulan Juni 2006 .
- 69 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 05 01 1 25 untuk biaya makan dan minum Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 5.180.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir)
- 70 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp. 62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 71 1 lembar SSP sejumlah Rp. 415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 72 1 lembar SSP sejumlah Rp. 34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 73 1 lembar SSP sejumlah Rp. 227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 74 1 lembar SSP sejumlah Rp. 163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 75 1 lembar SSP sejumlah Rp. 24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 76 1 lembar SSP sejumlah Rp. 50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 77 1 lembar SSP sejumlah Rp. 336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 78 1 lembar SSP sejumlah Rp. 77.700,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 79 1 lembar SSP sejumlah Rp. 59.250.000,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 1 lembar Tanda Terima dari Darma Evita,S,Sos yaitu pengembalian kelebihan setoran potongan Pajak Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 5.358.155,- tahun 2006 (legalisir).
- 81 1 lembar Kwitansi pembayaran biaya photo copy pengadaan dan kuesioner kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 4.570.000,- (legalisir).
- 82 1 lembar bon foto copy sejumlah Rp 4.570.000,- (legalisir).
- 83 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening 2 01 04 2 02 03 02 1 24 untuk biaya foto copy kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 4.570.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 84 1 (satu) lembar kegiatan pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 493.246.000,- (legalisir).
- 85 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Pebraari 2006 sejumlah Rp. 9.996.000,-(legalisir).
- 86 13 (tiga belas) lembar Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 (legalisir).
- 87 1 (satu lembar) Nota Dinas dan Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 6 Pebruari 2006 (legalisir)
- 88 1 (satu lembar) Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (legalisirs).
- 89 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2 01 04 2 01 02 02 1 24 untuk uang harian pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.9.996.000,- tanggal 31 Agustus 2006 (legalisir).
- 90 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir)

Hal. 53 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91 1 (satu) lembar bon pengadaan alat tulis kantor sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir).
- 92 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 01 05 1 11 untuk pesanan alat tulis kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 3.700.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 93 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- (legalisir)
- 94 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 01 1 08 untuk jasa tenaga kerja non pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 395.000.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 95 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- (legalisir).
- 96 1 (satu) lembar Bon pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- (legalisir).
- 97 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 03 1 09 untuk pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,-kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 98 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 14 Juni 2006 (legalisir).
- 99 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 02 1 09 untuk biaya akomodasi dan transportasi enumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 36.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 100 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 2.500.000,-(legalisir).
- 101 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 01 1 09 untuk pembayaran biaya cetak laporan



- kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 2.500.000 tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 102 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pimpinan DPRD Propinsi Riau tanggal 4 Oktober 2006 (asli).
- 103 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Oktober 2006 (asli).
- 104 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Oktober 2006 (asli).
- 105 1 (satu) bundel Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 24 Desember 2006 (copy).
- 106 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Propinsi Riau 29 Nopember 2006 perihal Pemberhentian Tenaga ahli Komisi A DPRD Propinsi Riau (copy)
- 107 1 (satu) lembar Nota Dinas dan Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (asli).
- 108 1 (satu) lembar Nota Dinas dan Ketua DPRD Propinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran Jadwal Kegiatan Presentasi Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau (asli).
- 109 Hasil koreksi pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan oleh Sekretaris DPRD Propinsi Riau (asli).
- 110 Hasil koreksi pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking oleh Sekretaris DPRD Propinsi Riau (asli).
- 111 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau. (copy)
- 112 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPT5.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000. (copy)
- 113 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.A Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. (copy)

Hal. 55 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001. (copy)
- 115 Naskah Pelantikan tanggal 1 Juni 2001. (copy)
- 116 Salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (copy)
- 117 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006. (copy)
- 118 Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 22 Agustus 2000. (copy)
- 119 Naskah Pelantikan. (copy)
- 120 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/KP-II/2000/13 tanggal 23 Agustus 2000. (copy)
- 121 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/SPP-II/2004/01 tanggal 18 Mei 2004. (copy)
- 122 Salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. (copy)
- 123 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 124 Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.226/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil An. Drs. RUSKIN HAR. (copy)
- 125 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001. (copy)
- 126 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001. (copy)
- 127 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999. (copy)
- 128 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999. (copy)
- 129 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.423.4-1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy)
- 130 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.423.4-1296 tanggal 27 Maret 1995. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 132 Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 133 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up. 221/37/76 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 134 Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1976 tanggal 31 desember 1976. (copy)
- 135 Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999. (copy)
- 136 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 juni 1999. (copy)
- 137 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.433-2239 tanggal 22 September 1979. (copy)
- 138 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.433-2239 tanggal 22 September 1979. (copy)
- 139 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.4-4959.- tanggal 31 Desember 1982. (copy)
- 140 Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.4-4959 tanggal 31 Desember 1982. (copy)
- 141 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3-178 tanggal 16 Januari 1986. (copy)
- 142 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3-178 tanggal 16 Januari 1986. (copy)
- 143 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988. (copy)
- 144 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988. (copy)
- 145 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januri 1978. (copy)
- 146 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januri 1978. (copy)
- 147 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976. (copy)"

Hal. 57 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 148 Daftar lampiran Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 149 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619716 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) (asli).
- 150 1 (satu) lembar CEK No. ZT 615830 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) (asli)..
- 151 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619717 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) (asli)..
- 152 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619715 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 153 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619718 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 154 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619719 tanggal ....Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 155 Tanda terima tanggal 24 Oktober 2006 antara Ikhsan,SH,MH dengan Drs. H.AA Nazief Soesile Dharma (asli)
- 156 Kwitansi pembayaran biaya Enumerator sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 23 Agustus 2006 (asli)
- 157 Surat Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Nomor: 036.PKOP-UNRI.X.2006 tanggal 24 Oktober 2006 hal Penyerahan Draf Laporan Akhir Kajian (asli).
- 158 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahaan Ranperda tentang TAHURA tanggal 14 Oktober 2006 (asli).
- 159 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahaan Ranperda tentang TAHURA tanggal 26 Agustus 2006 (asli).
- 160 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahaan Ranperda tentang TAHURA tanggal 26 Agustus 2006 (asli).
- 161 Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI Nomor: 065/PKOP-UNRI/V/2006 Tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 24 Mei 2006 (asli).
- 162 Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI Nomor: 066/PKOP-UNRI/V/2006 Tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 24 Mei 2006 (asli).
- 163 Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis Nomor: 056/PSPB-UNRI / VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164 Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis Nomor: 057/PSPB-UNRI/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli).
- 165 Surat No : 9U/KEU/2006-06/212 tanggal 15 Juni 2006 perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Propinsi Riau. (asli)
- 166 Surat No : 911/KEU/2006-03/210 tanggal 17 Maret perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Propinsi Riau. (asli)
- 167 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 0028/SKO/BL/II/2006 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006. (copy)
- 168 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 0029/SKO/BL/II/2006 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006. (copy)
- 169 Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.239/V/2006 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengganti Yang diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 24 Mei 2006. (copy)
- 170 Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Riau tanggal 21 Mei 2004. (copy)
- 171 Peraturan Gubernur Riau Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2006. (copy)
- 172 Pemerintah Provinsi Riau Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau. (copy)
- 173 Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 000443/BTL/-BP/PK/2006 tanggal 25 April 2006.
- 174 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Tanggal 10 Juni 2002 perihal Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 0442/DP/2006 tanggal 25 April 2006. (copy).
- 175 Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor : 06/SPP/IV/BAU/BK/2006 tanggal 19 april 2006 (copy)
- 176 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tanggal 19 April 2006. (copy)

Hal. 59 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177 Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006.  
(copy)
- 178 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tanggal 19 April 2006.  
(copy)
- 179 Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006.  
(copy)
- 180 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.333/V/2004 tentang  
Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II b  
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 181 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.333/V/2004  
tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 182 Realisasi Dana Panleg Sekretariat DPRD Prov. Riau Tahun Anggaran  
2006. (copy)
- 183 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang trafficking Tahun  
Anggaran 2006. (copy)
- 184 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk  
Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang  
Trafficking, (copy)
- 185 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma  
Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 186 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan  
Pornoaksi Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 187 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 6.754.000,- keperluan untuk  
Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang  
Pornografi dan pornoaksi. (copy)
- 188 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 6.754.000,- oleh Darma  
Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 189 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Tenaga Kerja Tahun  
Anggaran 2006. (copy)
- 190 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk  
Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang  
Tenaga Kerja. (copy)
- 191 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma  
Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)



- 192 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 193 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- 194 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 195 Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 196 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- 197 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 198 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang RPJP Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 199 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang RPJP. (copy).
- 200 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 15 Januari 2007. (copy)
- 201 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juni 2006 tanggal 10 Juli 2006. (asli)
- 202 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juli 2006 tanggal 10 Agustus 2006. (asli)
- 203 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Agustus 2006 tanggal 11 September 2006. (asli)
- 204 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan September 2006 tanggal 10 Oktober 2006. (asli)
- 205 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Oktober 2006 tanggal 07 November 2006. (asli)
- 206 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan November 2006 tanggal 10 Desember 2006. (asli)

Hal. 61 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 207 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Desember 2006 tanggal 10 Januari 2007. (asli)
- 208 Surat Nomor : 900/KEU/07.01 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penyampaian Dokumen Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006. (asli)
- 209 Surat Nomor : 900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 210 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 211 Surat Nomor : 900/KEU/88.27 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 212 Surat Nomor : 900/KEU/13.25 tanggal 11 September 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 213 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/13.25. (asli)
- 214 Surat Nomor : 900/KEU/48.22 tanggal 10 Agustus 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 215 Tanda Terima Surat Sekretaris daerah Provinsi Riau no. 900/KEU/98.32 tanggal 10 Agustus 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 216 Surat Nomor : 900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 tentang Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 217 Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau no. 900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 218 Surat Nomor : 900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 219 Tanda Terima Surat Asisten Bidang Umum Administrasi Umum Provinsi Riau no. 900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking antara lain:
- a Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001969/BI-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006.(copy)
  - b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
  - c 1 (satu) bundle daftar pengantar surat perintah membayar tanggal 16 Agustus 2006 (copy)
  - d Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No R. tanggal 16 Agustus 2006. (copy)
  - e Surat Pernyataan KM. NAZIEF SOESILA DHARMA.(copy)
  - f Surat Pernyataan.(copy)
  - g Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
  - h Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
  - i Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
  - j Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
  - k Keputusan Rektor UNRI Nomor : 170 / J19 / AK/ 2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008.(copy)
  - l Surat Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
  - m Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
  - n Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
  - o Lampiran Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)

Hal. 63 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
  - q Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006.(copy)
  - r Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, peneliti ahli dan pengolah data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 25 Agustus 2006.(copy)
  - s Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Juni 2006. (copy)
  - t Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
  - u Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006.(copy)
  - v Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006.(copy)
  - w Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
  - x Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006. (copy)
  - y Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006.(copy)
  - z Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006. (copy)
    - aa. Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006.(copy)
- 221 Pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat perintah membayar Nomor : SPM : 001925/BI-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy)
- b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy)
- c 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
- d Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- e Surat Pernyataan. (copy)
- f Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (copy)
- g Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 34/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan. (copy)
- h Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan. (copy)
- i Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja. (copy)
- j Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama. (copy)
- k Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja. (copy)
- l Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003. (copy)
- m Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UNRI Nomor : 028J19.1.13.Kp/2002 tanggal 2 September 2002 tentang pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik. (copy)
- n Surat Nomor : 026/PSPB-UNRI/IV/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penawaran Harga. (copy)
- o Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja. (copy)
- p Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja. (copy)

Hal. 65 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- q Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 12 Januari 2006. (copy)
  - r Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
  - s Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)
  - t Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006.(copy)
  - u Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 8 Oktober 2006.(copy)
  - v Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
  - w Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
- 222 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP antara lain :
- 1 Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0019201-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
  - 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
  - 3 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
  - 4 Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
  - 5 Surat Pernyataan. (copy)
  - 6 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (copy)
  - 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP. (copy)
  - 8 Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP.(copy)
  - 9 Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Surat Nomor : 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 perihal Penawaran Harga. (copy)
- 11 Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- 12 Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI Nomor : 1500/J19.1.13/PG/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI. (copy)
- 13 Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama. (copy)
- 14 Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- 15 Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang RPJP. (copy)
- 16 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006. (copy)
- 17 Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006. (copy)
- 18 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006. (copy)
- 19 Daftar Pembayaran Honorarium Tim AnalisaData Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP tanggal 10 Oktober 2006. (copy)
- 20 Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang RPJP tanggal 23 Agustus 2006. (copy)
- 21 Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006. (copy)
- 223 Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
  - 1 Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001912/BI-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006. (copy)
  - 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002. (copy)

Hal. 67 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) bundel daftar pengantar surat perintah membayar tanggal 8 Agustus 2006. (copy).
- 4 Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
- 5 Surat Pernyataan. (copy)
- 6 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- 8 Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- 9 Keputusan Rektor UNRI Nomor : 77/J197AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010. (copy)
- 10 Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama. (copy)
- 11 Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- 12 Surat Nomor : 011/BKBH-UNRI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 perihal Penawaran Harga. (copy)
- 13 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- 14 Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- 15 Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan penelaahan Perda yang ada dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)

16 Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 12 Januari 2007. (copy)

17 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006. (copy)

18 Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 23 Agustus 2006. (copy)

19 Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006. (copy)

20 Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Juni 2006. (copy)

21 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006. (copy)

22 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006. (copy)

23 Daftar pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006. (copy)

24 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintah dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006. (copy)

224 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim antara lain :

1 Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001915/BI-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006. (copy)

2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002. (copy)

Hal. 69 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006. (copy)
- 4 Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- 5 Surat Pernyataan.(copy)
- 6 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 35/5PPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- 8 Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- 9 Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama. (copy)
- 10 Surat Nomor : 021/PKOP-UNRI/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Penawaran Harga. (copy)
- 11 Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- 12 Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- 13 Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI.(copy)
- 14 Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)
- 15 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006. (copy)
- 16 Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)



- 17 Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 18 Januari 2007.  
(copy)
- 18 Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006. (copy)
- 19 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
- 20 Daftar Pembayaran Honorarium Tim analisa data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 14 Oktober 2006. (copy)
- 21 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
- 225 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 Surat Perintah Membayar Nomor 5PM : 000799/BI-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006. (copy)
- 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002. (copy)
- 3 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Mei 2006. (copy)
- 4 Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Mei 2006. (copy)
- 5 Surat Pernyataan. (copy)
- 6 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 16/SPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi. (copy)

Hal. 71 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 8 Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi. (copy)
- 9 Surat Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Penawaran Harga. (copy)
- 10 Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- 11 Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik UNRI. (copy)
- 12 Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003. (copy)
- 13 Surat Nomor : 890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Kerjasama. (copy)
- 14 Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- 15 Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 11 April 2006.(copy)
- 16 Owner Estimate tanggal 11 April 2006. (copy)
- 17 Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi. (copy)
- 18 Kwitansi sejumlah Rp. 3.700.000,- untuk Pembayaran Biaya pengadaan alat tulis Kantor kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006. (copy)
- 19 Faktur CV. Winta Karya tanggal....Juni 2006 senilai Rp.3.700.000,-. (copy)
- 20 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006. (copy)
- 21 Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 11 Februari 2006. (copy)
- 23 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 18 Februari 2006. (copy)
- 24 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syanf Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Februan 2006. (copy)
- 25 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 25 Februari 2006. (copy)
- 26 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 26 Februari 2006. (copy)
- 27 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 4 Maret 2006. (copy)
- 28 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 5 Maret 2006. (copy)
- 29 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2006. (copy)
- 30 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan

Hal. 73 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Maret 2006.  
(copy)
- 31 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 18 Maret 2006.  
(copy)
- 32 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Maret 2006.  
(copy)
- 33 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 25 Maret 2006.  
(copy)
- 34 Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 6 Februari 2006. (copy)
- 35 Daftar nama pelaksana lembur kerja Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- 36 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Agustus 2006 tanggal 31 Agustus 2006.(copy)
- 37 Surat Tanda Setoran tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp. 6.754.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi. (copy)
- 38 Formulir Penyeteran senilai Rp. 6.754.000,- tanggal 15 Januari 2007.  
(copy)
- 39 Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal ...Juni 2006.(copy)
- 40 Surat Keputusan Ketua Pusat kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) UNRI Nomor : 054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Daftar Honor Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2005.(copy)
- 42 Daftar Honor Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005.(copy)
- 43 Daftar Honor Tim Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005.(copy)
- 44 Daftar Honor Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005.(copy)
- 45 Kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- Juni 2005.(copy)
- 46 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- 47 Daftar Honor Tim Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005.(copy)
- 48 Kwitansi senilai Rp. 5.180.000,- untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- 49 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- 50 1 (satu) bundel Purchase Order tanggal.... Juni 2006. (copy)
- 51 Kwitansi senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak laporan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- 52 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- 53 Kwitansi senilai Rp. 1.800.000,- untuk pembayaran biaya pembelian film dan cetak film dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- 54 Faktur Koperma Foto tanggal .... Juni 2006.(copy)
- 55 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- 56 Kwitansi senilai Rp. 36.250.000,- untuk pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- 57 Daftar Biaya Akomodasi pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005.(copy)

Hal. 75 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58 Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005.(copy)
- 59 Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal... Mei 2005.(copy)
- 60 Daftar Biaya Transportasi Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005.(copy)
- 61 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- 62 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Emilda Firdaus tanggal ... Juni 2006. (copy)
- 63 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Nurahim Rasudin tanggal ... Juni 2006. (copy)
- 64 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Saiman, Sip,MSi tanggal ... Juni 2006. (copy)
- 65 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Ikhsan, SH.MH tanggal ... Juni 2006. (copy)
- 66 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Dodi Haryono, SHI,SH.MH tanggal ... Juni 2006. (copy)
- 67 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Meyzi Heriyanto tanggal ... Juni 2006. (copy)
- 68 Tanda Terima Rp. 7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006. (copy)
- 69 Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006. (copy)
- 70 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Drs.Eddie Yusti tanggal 7 Juni 2007. (copy)
- 71 Tanda terima Rp. 7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006. (copy)
- 72 Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Zuhanda Agus, SH., MH. tanggal 7 Juni 2007.(copy)
- 74 Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.(copy)
- 75 Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006. (copy)
- 76 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Darma Evita tanggal 7 Juni 2007. (copy)
- 77 Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.(copy)
- 78 Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006. (copy)
- 79 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Hendri HK, SH tanggal 7 Juni 2007.(copy)
- 80 Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.(copy)
- 81 Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006. (copy)
- 82 Surat Perintah Perjalanan Dinas An. M. Erlan, SH tanggal 7 Juni 2007. (copy)
- 83 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- 226 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Meyzi Heriyanto, S.Sos, Msi tanggal 23 April 2007
- 227 1 (satu) lembar SPAA: 001969/BL-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006. (asli).
- 228 1 (satu) lembar SPM: 001920/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Agustus 2006 (asli).
- 229 1 (satu) lembar SPM: 001912/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian &.

Hal. 77 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Agustus 2006 (asli).
- 230 1 (satu) lembar SPM: 001925/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Tentang Tenaga Kerja bulan Agustus 2006 (asli).
- 231 1 (satu) lembar SPM: 001915/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Agustus 2006 (asli).
- 232 1 (satu) lembar SPM: 00799/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi untuk bulan Juni 2006 (asli).
- 233 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: JD1068/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 234 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01067/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 235 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01061/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 236 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01056/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 237 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01057/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 238 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00209/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli)
- 239 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00208/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006. (asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU741 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No.Rekening : 01.02.OO3393.9 beserta lampiran. (asli).
- 241 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (asli).
- 242 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-41 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran. (asli).
- 243 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/40 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran. (asli).
- 244 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP. (asli).
- 245 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-40 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran. (asli).
- 246 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/39 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran. (asli).
- 247 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (asli).
- 248 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-39 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 249 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/38 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No.Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 250 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (asli).

Hal. 79 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 251 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-38 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 252 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran. (asli).
- 253 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi. (asli).
- 254 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran. (asli).
- 255 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00209/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006. (Foto Copy).
- 256 2 (dua) LEMBAR PENGESAHAN PK YANG TERPAKAI BULAN MARET 2006 OLEH SRI MEKKA ,S tanggal 31 Maret 2006. (asli)
- 257 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 atas noma pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran. (asli).
- 258 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli).
- 259 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 260 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No : 00208/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto Copy).
- 261 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA.S tanggal 31 Maret 2006 (asli).
- 262 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan No: 32/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli).

263 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Perda Yang tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 33/SPPP/UM/V/2006/ 890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).

264 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli).

265 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).

266 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli).

267 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.6750.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 18 Januari 2007 (asli).

268 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Traficking tanggal 18 Januari 2007 (asli).

269 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 18 Januari 2007 (asli).

270 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 18 Januari 2007 (asli).

Hal. 81 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 271 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan Dan Kemasyarakatan tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 272 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 18 Januari 2007 (asli)
- 273 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya enoumerator , Penelitian ahli dan pengolah data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 33/SPPP/UM/V72006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli)
- 274 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 12 Desember 2006 (asli).
- 275 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli).
- 276 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 11 Desember 2006 (asli).
- 277 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 278 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 22 Desember 2006 (asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 32/SPPP/UM/VV2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli).
- 280 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 281 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli).
- 282 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 22 Desember 2006 (foto copy).
- 283 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 284 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jas Tenaga Kerja non pegawai (Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli, biaya Pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 285 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Akomodasi dan transportasi Enoumerator dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 286 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli, biaya Pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 287 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian Film dan cuci cetak Film tanggal 14 Juni 2006. (asli)

Hal. 83 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 288 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli).
- 289 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya photo copy, penggandaan dan kuesioner kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 290 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 291 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Cafe (biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 292 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya photocopy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 415.455,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 293 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya photocopy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 62.320,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 294 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 227.275,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 295 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 34.090,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 296 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 24.545,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 297 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka



- mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 163.640,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 298 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPh dari CV. Wintra Karya (biaya pesana ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Graft dan Porno Aksi) sebesar 336.365,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 299 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari CV. Wintra Karya (biaya pesana ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 50.455,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 300 2 (dua) bundel Buku Kas Umum bulan Januari sampai dengan Desember 2006. (asli)
- 301 2 (dua) lembar buku Bank (asli)
- 302 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro (foto copy legalisir)
- 303 1 (satu) lembar Memo dari Drs. Ruski Har kepada Sdr. Zuhanda dan Sri Mekka, S, SH,MSi perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan 4 (empat) kegiatan Pengkajian dan Penelahaan Ranperda Propinsi Riau (asli);
- 304 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No: 009/O/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003.
- 305 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No: 167/J19/KS/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenakerjaan UNRI dengan Pihak Luar.
- 306 1 (satu) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006.
- 307 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Provinsi Riau.
- 308 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 32/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 17 April 2006 antara H.RUSKIN HAR selaku sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODY HARYONO, SHI, SH., MH. selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Riau tentang kegiatan/pekerjaan pengkajian dan penelahaan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;



- 309 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, Msi Selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Ketenagakerjaan.
- 310 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH. MH. Selaku Ketua Badan Konsultasi Hukum Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan perdayang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 311 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN, SH. MH. Selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Ilmu Politik Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim.
- 312 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 53/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 16 Juni 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, Msi. Selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 313 1 (satu) Eksemplar dokumen foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, Msi. Selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Porno Grafi dan Porno Aksi.
- 314 Kegiatan / Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan :
- 1 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI22006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 2 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya Enoumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI22006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
  - 3 1 (satu) lembar daftar Pembayaran honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja Bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.
  - 4 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 8 Oktober 2006.
  - 5 1 (satu) lembar lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.
  - 6 1 (satu) bundle surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 34 /SPPP/UM/V/2006/890 tentang kegiatan pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006.
  - 7 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembang Bisnis UNRI tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006.
  - 8 1 (satu) lembar surat Ketua Pusat Studi Pengembangan Bisnis UNRI Nomor: 026/PSPB-UNRI/V/2006 perihal Penawaran harga tanggal 19 Mei 2006.
  - 9 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.
  - 10 1 (satu) bundel proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tahun 2006.
  - 11 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No: 028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002.
  - 12 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No: 028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan

Hal. 87 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal  
2 September 2002.

- 13 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RI  
cq. Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak  
Pekanbaru Senapelan No: PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21  
Mei 2003.
- 14 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Propinsi Riau Nomor: 890/SP/  
UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama.
- 15 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Kerjasama Pekerjaan Pengkajian  
dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.
- 315 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak  
Efektif:
  - 1 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban  
(SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang  
Tidak Efektif Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan  
No. 33/5PPP/UM/VI?2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang  
ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
  - 2 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya Enoumerator,  
Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan  
Perda yang Tidak Efektif Sesuai dengan Surat Perjanjian' Pelaksanaan  
Pekerjaan No. 33/5PPP/UM/VI?2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang  
ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
  - 3 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan  
Kebijakan Publik UNRI No: 008/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang  
Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
  - 4 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan  
Kebijakan Publik UNRI No: 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang  
Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
  - 5 1 (satu) lembar surat Nomor :009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang  
susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei  
2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 7 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 8 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006.
- 9 1 (satu) lembar lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 10 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 33/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006.
- 11 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006.
- 12 1 (satu) lembar Surat Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI No: 011/BKBH-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 25 Mei 2006.
- 13 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 14 1 (satu) lembar Keputusan Rektor UNRI No: 77/J19/AK/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010 tanggal 11 Mei 2006.

Hal. 89 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 1 (satu) lembar Surat Sekretariat DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 tentang Penawaran Kerjasama tanggal 24 Mei 2006.

16 1 (satu) lembar lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau.

316 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

1 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 32/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.

2 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Enoumerator peneliti ahli dan pengolah data kegiatan /pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 32/5PPP/UM/VT/2006/890 tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.

3 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.

4 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.

5 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 10 Oktober 2006.

6 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

7 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan



Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 17 April 2006.

- 8 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
- 9 1 (satu) lembar surat Fakultas Hukum UNRI No: 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 20 Mei 2006.
- 10 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- 11 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006.
- 12 1 (satu) bundel surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No: 1500/J19.1.13/PG/2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tanggal 24 Nopember 2005.
- 13 1 (satu) lembar surat Sekwan DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006.
- 14 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- 317 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim:
  - 1 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
  - 2 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya enoumeretor, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelahaan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VT/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.

Hal. 91 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 3 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006.
- 4 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006.
- 5 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2006.
- 6 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006.
- 7 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 29 Mei 2006.
- 8 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 02 Juni 2006.
- 9 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI No: 021/PKOP-UNRI/V72006 tentang Penawaran Harga tanggal 31 Mei 2006.
- 10 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI.
- 11 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tahun 2006.
- 12 2 (dua) lembar Surat Keputusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No: 148/J19.1.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tanggal 30 Januari 2003.
- 13 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI cq Kantor wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan No: PEM-00048/WPJ-02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 1 (satu) lembar surat Sekwan DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 30 Mei 2006.

318 Kegiatan /pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking :

- 1 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 53/SPPP/UM/VT/2008/890 tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2006.
- 2 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya Eunumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 53/SPPP/UM/VI/2008/890 tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 25 Agustus 2006.
- 3 Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- 4 Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- 5 Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- 6 Daftar pembayaran honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- 7 Daftar pembayaran honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- 8 Daftar pembayaran honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- 9 Daftar pembayaran honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli sampai dengan September 2006 dibayar tanggal 25 September 2006.

Hal. 93 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 10 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006.
- 11 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 015/P3W-UNRI/5K/VT/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006.
- 12 Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006.
- 13 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 53/SPPP/UM/VI/2006 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 16 Juni 2006.
- 14 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Trafficking Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 dan Nomor : 39/PS.UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006.
- 15 1 (satu) lembar surat dari Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) kepada sekretaris DPRD Provinsi Riau Nomor : 39/PSW-UNRI/VI/2006 tentang Kerjasama Pengkajian Ranperda trafficking tanggal 15 Juni 2006.
- 16 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wainta ( P3W ) Universitas Riau diajukan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2006.
- 17 1 (satu) lembar surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor: 170/J19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004.
- 18 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau No : 01/P3W-UNRI/SK/II/2005 tentang Susunan Kepengurusan pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005.
- 19 2 (dua) lembar Susunan Kepengurusan Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau.



20 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Riau kepada Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 13 Juni 2006.

21 1 (satu) lembar Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Trafficking.

319 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi :

1 1 (satu) lembar SPM No. 0007/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pembahasan Ranperda Tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.

2 1 (satu) lembar ) Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 Cafe (biaya makan dan minum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan Pornoaksi). Juli 2006

3 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.

4 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.

5 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran PPh 21 dari Pembayaran Biaya Jasa Tenaga Kerja non Pegawai tanggal 11 Agustus 2006.

6 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.

7 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.

8 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian

Hal. 95 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 9 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 10 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak ( SPP ) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya Photocopy / pengadaan Kuessioner Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 11 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya Photocopy / pengadaan Kuessioner Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 12 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006.
- 13 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
- 14 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 15 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 16 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau.
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 18 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 19 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 20 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 21 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 22 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 23 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006.
- 24 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 ( satu ) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 26 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006.
- 27 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 28 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 28 Juni 2006.
- 29 4 (empat) lembar Purchase Order di GKS Cafe tanggal 6 Juni 2006.
- 30 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Cafe Juni 2006.
- 31 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Cafe Juni 2006.
- 32 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 33 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Photocopy, penggandaan dan kuessioner kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 34 1 (satu) lembar bon kontan dari Azalia Press untuk fotocopy Kuessioner juni 2006.
- 35 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 36 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 37 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk fotocopy laporan dan jilid laporan Juni 2006.
- 38 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 39 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian film dan cuci cetak film.
- 40 1 (satu) lembar Faktur dari Koperma Photo untuk pembayaran pembelian Fuji Film dan Cuci cetak film Juni 2006.
- 41 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.

Hal. 97 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan pornoaksi.
- 43 2 (dua) lembar Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 44 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 45 2 (dua) lembar Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 46 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 47 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 48 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (biaya enoumerator, peneliti ahli, biaya pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2006.
- 49 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Pengkajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau Nomor : 054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 50 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006.
- 51 1 (satu) lembar Daftar Honor Eunomerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006
- 52 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juni 2006.
- 54 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juli 2006.
- 55 1 (satu) lembar Daftar Honor Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda pornografi dan pornoaksi juli 2006
- 56 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengolahan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ( 1 Paket ).
- 57 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juli 2006
- 58 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk biaya Jasa Tenaga Kerja non Pegawai Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006.
- 59 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk Honorarium Tim/ Panitia Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006.
- 60 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan Alat tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 61 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Wintra Karya untuk membayar biaya pengadaan ATK, Juni 2006.
- 62 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk biaya Alat tulis Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006
- 63 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas Tanggal 6 Februari 2006
- 64 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006.

Hal. 99 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Februari 2006.
- 66 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006.
- 67 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Februari 2006.
- 68 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Februari 2006.
- 69 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 26 Februari 2006.
- 70 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006.
- 71 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 5 Maret 2006.
- 72 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari sabtu tanggal 11 Maret 2006
- 73 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi eSekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Maret 2006.
- 74 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006.
- 75 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 18 Maret 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Maret 2006.
- 77 Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Staf Sekretariat DPRD Propinsi Riau perihal pelaksanaan Lembur tanggal 6 Februari 2006.
- 78 Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 79 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD, Rekening Bulan Agustus 2006 untuk Uang Harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 31 Agustus 2006
- 80 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Nurahmin Rasudin, SH,MH, Juni 2006.
- 81 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Ikhsan, SH.MH, Juni 2006
- 82 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Dody Haryono,SHI,SH,MH, Juni 2006.
- 83 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Saiman, S.Ip.,Msi, Juni 2006.
- 84 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.si, Juni 2006.
- 85 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 16/SPPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 86 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univ. Riau tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Nomor : 890/SP/UM/IV/2006/16 dan Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006
- 87 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau Nomor:

Hal. 101 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang penawaran harga.

88 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.

89 1 (satu) bundle surat keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor : 148/J19.13/KP/2003 tentang pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi Dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Riau (PKOP-Fisipol UNRI)

90 1 (satu) lembar surat no : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.

91 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI Nomor : 890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Harga.

92 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.

93 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Propinsi Riau kepada sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 11 April 2006 perihal Kegiatan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.

94 1 (satu) lembar Owner Estimate / estimasi Harga Biaya Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 11 April 2006.

95 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi oleh Pusat Kajian Otonomisasi Dan Pembangunan Universitas Riau, April 2006.

320 Surat Tugas dari Ketua P3W UNRI No: 14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.

321 Tanda Bukti Pembayaran pelaksanaan pengambilan data/kolektor data primer dan sekunder tentang Trafficking di Kota Dumai senilai Rp. 1.775.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida.M.Si tanggal 29 Agustus 2006.

322 Tanda Bukti Serah Terima Dokumen yang Menerima Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 5 September 2006

323 Data Kasus Trafficking In Person Polresta Dumai Tahun 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 324 Perda Kota Dumai No: 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan tanggal 28 Juni 2004.
- 325 Keputusan Walikota Dumai No: 472/SOS-PP/2004 tentang Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak tanggal 11 Oktober 2004.
- 326 Lampiran Keputusan Walikota Dumai No: 472/SOS-PP/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kota Dumai.
- 327 Surat Tugas No: 400/SOS-PP/2005/34.
- 328 Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau.
- 329 Keputusan Rektor UNRI No: 170/J19/AK/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) pada Lembaga Peneliti UNRI periode 2004-2008.
- 330 Keputusan Kepala P3W UNRI No: 01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI.
- 331 Keputusan Ketua P3W UNRI No: 014/P3 W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 332 Keputusan Ketua P3W UNRI No: 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking
- 333 Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor.....tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (trafficking) Perempuan dan Anak (tulisan tangan)
- 334 Kliping Koran Riau Pos tentang adanya kasus Trafficking.
- 335 Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor: --- tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia ( Trafficking ) Perempuan dan Anak.
- 336 Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : ---- tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak.
- 337 Instrumen dan Daftar Wawancara Pengumpulan Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking Propinsi Riau .

Hal. 103 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338 Surat Tugas No.13/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.(asli).
- 339 Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006.  
(copy).
- 340 Surat Tugas No,12/P3 W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006.(copy).
- 341 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W)  
Universitas Riau Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Tentang Susunan Tim  
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal  
19 Juni 2006. (copy).
- 342 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W)  
Universitas Riau Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Tentang Susunan Tim  
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal  
19 Juni 2006. (copy).
- 343 Lampiran Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Susunan Enoumerator  
Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal  
19 Juni 2006.
- 344 Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.  
(copy).
- 345 Surat Nomor : 20/P3W-UNRI/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tentang  
Permohonan Pencairan Dana. (asli).
- 346 Surat No : W4.Dh.Um.01.10-399 tanggal 13 Juni 2006 perihal  
Penjelasan Data Perkara Pidana Perdagangan Perempuan & Anak. (copy)
- 347 Surat No : B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Data  
Perdagangan Manusia, Pornoaksi/ Pornografi dan PJTKI. (copy)
- 348 Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata Rias Pengantin Kab.  
Indragiri Hilir Tahun 2006 . (copy)
- 349 Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Khusus Pajak Hotel  
dan Restoran untuk Bulan Juni 2006.
- 350 Proposal Studi Banding dalam Rangka Penyusunan Rancangan  
Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak  
(Trafficking) Propinsi Riau
- 351 Pokok-pokok Pikiran perlunya Kebijaksanaan Daerah Menyikapi  
Fenomena Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak Untuk  
Propinsi Riau.
- 352 Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di  
Propinsi Riau Tahun 2006 oleh P3W Universitas Riau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353 Jual Beli Perempuan dan Anak (Trafficking) di Propinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tanggal 4 Oktober 2006.
- 354 Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 170/J-19/AK/ 2004 Tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004. (copy).
- 355 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 01/P3W-UNRI/5K/I/2005 Tentang Susunan Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005. (copy).
- 356 Informasi Data Dan Atau Data Yang Akan Dicari.
- 357 Surat Perintah Perjalanan Dinas. (copy)
- 358 Jadwal kegiatan presentase pengkajian dan penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau (copy)
- 359 Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking Provinsi Riau. (copy)
- 360 Undangan Nomor : 186/Und/BKOW7II/2006 dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita.
- 361 Proposal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Propinsi Riau. (asli).
- 362 Catatan Tulisan Tangan.
- 363 Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor :77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Periode 2006-2010.
- 364 Surat IKHSAN,SH, MH selaku Ketua Tim Peneliti No,14/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Permohonan Informasi Data.
- 365 Surat Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 29 Mei 2006.
- 366 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor :002/BKBH-UNRI/W2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 367 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 003/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006,

Hal. 105 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 368 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 004/BKBH-UNRI/W2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 369 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 005/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Ahli Analisa Data Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 370 Surat Ketua BKBH Nomor : 012/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, Perihal Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan dan Bantuan Pencairan Dana Kajian.
- 371 Surat Adendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/20006/890 tanggal 29 Mei 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan dan Pengkajian Dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 372 Surat Keputusan Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Nomor : 01/BKBH/PN/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Staf Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau.
- 373 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 Uang Sejumlah Rp.395.000.000,-
- 374 Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2006
- 375 Surat Perintah Perjalanan Dinas Tanggal 24 Agustus 2006.
- 376 Surat Tugas Nomor : 13/BKBH-UNRI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006.
- 377 Surat Daftar Pembayaran Honorarium tim Peneliti ahli pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli - September 2006, tanggal 25 Agustus 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378 Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006
- 379 Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 380 Surat Tanda Terima tanggal 25 Oktober 2006.
- 381 Surat Ketua BKBH Nomor : 016/BKBH-UNRI/X/2006 tanggal 28 Oktober 2006, perihal Penyerahan Draft laporan Akhir Kajian.
- 382 Surat Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.
- 383 Surat Tanda Terima Titipan Uang Denda tanggal 4 Agustus 2006.
- 384 Surat tanda terima tanggal 24 Agustus 2006.
- 385 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 25 Mei 2006, Rapat Tim Persiapan Proposal.
- 386 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2006, Rapat Turun Lapangan.
- 387 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2006, Persiapan Turun Lapangan.
- 388 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan.
- 389 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan.

Hal. 107 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 390 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 25 September 2006, Analisis Data.
- 391 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Selasa tanggal 26 September 2006, Analisis Data.
- 392 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006, Persiapan Ekspose.
- 393 Keputusan Rektor UNRI Nomor: 170/J19/AK/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang pengangkatan Dra. Lenda Farida.M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (foto copy).
- 394 Keputusan Kepala P3W UNRI No: N- 01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI (foto copy)
- 395 Salinan Kep. Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 009/0/2003 tanggal 27 Januari 2005 tentang Statute UNRI (foto copy)
- 396 Keputusan REKTOR UNRI Nomor: 024/J19/KP/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Pusat dan Badan-badan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNRI (foto copy).
- 397 Surat Sekda DPRD Propinsi Riau Nomor: 890/SP-UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang kerjasama (foto copy).
- 398 Surat P3W Nomor: 39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 perihal kerjasama pengkajian Ranperda Trafficking (foto copy).
- 399 Proposal pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking Propinsi Riau (foto copy)
- 400 Note Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan P3W UNRI tanggal 15 Juni 2007 (foto copy)
- 401 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (foto copy)
- 402 Surat P3W Nomor: 43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Mohon Bantuan Pencairan Dana Penelitian dan Addendum Waktu (asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 403 Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking No: 43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 (asli).
- 404 Tanda terima draf Laporan Akhir Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 24 Oktober 2006 (asli)
- 405 Keputusan Ketua P3W No: 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli).
- 406 Keputusan Ketua P3W No: 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking beserta lampiran susunan Tim Enumerator (asli).
- 407 Tanda terima SPPD Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 dari Dra. Hj. Lena Farida, M.Si oleh Zulfikar tanggal 20 Desember 2006 (foto copy)
- 408 Tanda terima uang sebesar 395.000.000,- dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy)
- 409 Kwitansi uang sejumlah Rp. 395.000.000,- dari Sri Mekka.S oleh Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 25 Agustus 2006 (asli)
- 410 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy )
- 411 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy )
- 412 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy )
- 413 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy )

Hal. 109 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 414 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy)
- 415 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (foto copy )
- 416 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (foto copy)
- 417 Tanda terima uang sejumlah Rp. 59.250.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida,M.Si untuk setoran Potongan Pajak untuk Kegiatan pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking penerima Darma Evita tanggal 25 Agustus 2006 (foto copy)
- 418 SSP setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumenator Penelitian Ahli & Pengolah Data Kegiatan pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sebesar Rp. 59.250.000,- tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 419 Tanda terima titipan uang denda sebesar Rp. 19.750.000,- atas kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Traficking dari Dra. Hj. Lena Farida penerima Dharma Evita tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy)
- 420 SPPD An. Drs. Kasmiruddin tanggal 19 September 2006 (asli)
- 421 SPPD An. Dra. Siti Sofro, M.Si tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 422 SPPD An. Dra. Risdianti tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 423 SPPD An. Drs. Endang Sutrisna M.Si tanggal 19 September 2006 (asli)
- 424 SPPD An. Tuti Khairani, M,Si tanggal (asli)
- 425 SPPD An. Dra. Nurayam, MS tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 426 SPPD An. Dra. Sofia Agnes, M.Si tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 427 SPPD An. Mandataris, S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli)
- 428 SPPD An. Weldo, S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli)
- 429 SPPD An. Siti Muhairanum tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 430 SPPD An. Mira Anita tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 431 Surat Tugas Nomor: 10/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 432 Surat Tugas Nomor: 11/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 (asli)
- 433 Surat Tugas Nomor: 12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 (asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 434 Surat Tugas Nomor: 14/P3 W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 435 Surat Tugas Nomor: 15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 436 Surat Tugas Nomor: 16/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 18 September 2006 (asli)
- 437 Surat Tugas Nomor: 17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (asli)
- 438 Informasi Dan Atau Data Yang Akan Dicari (foto copy )
- 439 K-I Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk TKW (Korban)
- 440 K-II Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk Traficker (Calo, Penampung DII)
- 441 K-III Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (Pola dan Jenis Intervensi/Layanan)
- 442 Surat P3W No: 46/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Dumai tentang Mohon Ijin Penelitian (asli)
- 443 Surat P3W No: 47/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 444 Surat P3W No : 48/PSW-UNRI/VIII/ 2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 445 Surat P3W No: 49/P5W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 446 Surat P3W No: 50/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua & DW Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 447 Surat P3W No: 51/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapolres Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 448 Surat P3W No: 52/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 449 Surat P3W No: 54/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 450 Surat P3W No: 55/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)

Hal. 111 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 451 Surat P3W No: 56/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 452 Surat P3W No: 57/P5W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 453 Surat P3W No: 58/PSW-UNPJVVIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Panggerak PKK Ketua SOW Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 454 Surat P3W No: 59/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapoltabes Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 455 Surat P3W No: 60/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 456 Surat P3W No: 75/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kab. Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 457 Surat P3W No: 74/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Panggerak PKK Ketua GOW Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 458 Surat P3W No: 73/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 459 Surat P3W No: 72/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kab. Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 460 Surat P3W No: 71/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 461 Surat P3W No: 70/P5W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 462 Surat P3W No: 63/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 463 Surat P3W No: 64/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 464 Surat P3W No: 65/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 465 Surat P3W No: 66/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466 Surat P3W No: 67/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOA Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)

467 Surat P3W No: 68/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli).

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa IKHSAN SH MH.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1084/Pid.B/2007/PN.PBR tanggal 26 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN DILAKUKAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Daftar Gaji an. TUTI KHAIRANI HARAHAP,S.Sos
  - 2 Daftar Gaji an. Drs. KASMIRUDIN.Msi.
  - 3 Daftar Gaji an. Drs. ENDANG SUTRISNA
  - 4 Daftar Gaji an. TENGKU JUHARMIN.
  - 5 Daftar Gaji an. HTRF SIMANJUNTAK, M.Si
  - 6 Daftar Gaji an. SOFIA ACHNES, M.Si.
  - 7 Daftar Gaji an. Rd. SITI SOFRO.
  - 8 Daftar Gaji an. Drs. ISRIL.MH
  - 9 Daftar Gaji an. RIADAYAti.
  - 10 Daftar Gaji an. AHMAD RIFAI, SP, MP
  - 11 Daftar Gaji an. DODI HARYONO, SHI.SH.MH
  - 12 Daftar Gaji an. EMILDA FIEDAUS, SH.
  - 13 Daftar Gaji an. IKHSAN, SH.MH
  - 14 Daftar Gaji an. MEYZI HERIYANTO, S.Sos. M.Si.

Hal. 113 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Daftar Gaji an. Dra. LENA FARIDA, M.Si.
- 16 Daftar Gaji an. INDRA SAFRI, S.Sos, M.Si.
- 17 Ijazah Magister Sains an. INDRA SAFRI
- 18 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial an. INDRA SAFRI.
- 19 Ijazah Sarjana Hukum an. T. JUHARMIN
- 20 Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa an. T. JUHARMIN.
- 21 Ijazah Strata Satu jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah an. DODY HARYONO
- 22 Ijazah Sarjana Hukum an. DODI HARYONO.
- 23 Ijazah Magister Hukum an. DODI HARYONO.
- 24 Ijazah Magister Sains an. ENDANG SUTRISNA.
- 25 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial politil an. ENDANG SUTRISNA.
- 26 Ijazah Sarjana Pertanian an. AHMAD RIFAI.
- 27 Ijazah Magister Pertanian an. AHMAD RIFAI.
- 28 Ijazah Magister Hukum an. ISRIL
- 29 Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan.
- 30 Ijazah Magister Sains an. MEYZI HERIYANTO.
- 31 Postgraduate Program an. MEYZI HERIYANTO.
- 32 Ijazah Magister Sains an. Rd. SITI SOFRO.
- 33 Transkrip Akademik an. Rd. SITI SOFRO.
- 34 Curriculum Vitae an. Rd. SITI SOFRO.
- 35 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu politik an. SAIMAN.
- 36 Ijazah Magister Sains an. SAIMAN.
- 37 Ijazah Sarjana Hukum an. EMILDA FIRDAUS.
- 38 Ijazah Magister Hukum an. EMILDA FIRDAUS.
- 39 Daftar Pembayaran Transportasi Tim Pengembangan Perencanaan FISIP UNRI, Dana Bersumber dan Program Non Reguler FISIP UNRI untuk bulan Juni 2007.
- 40 Tanda terima penyerahan 1 (satu) bundel Draf Laporan Akhir tanggal 25 Oktober 2006.
- 41 Surat Nomor : 005/PR/X/2006/927 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Penjelasan mengenai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif Dewan.
- 42 Surat Nomor : 56/PSPB-UNRI/XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Ijin Pengumpulan Data
- 43 Surat Tugas Nomor : 032/PKOP-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau.
- 45 Arus Kegiatan Sistem Swakelola.
- 46 1 (satu) lembar buku Bank tanggal 16 Agustus 2006 (legalisir).
- 47 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.574.1/XI/2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Propinsi Riau TA. 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (legalisir).
- 48 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita,S,Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 49 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan awal/revisi Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 34.250.000,-(legalisir)
- 50 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 7.000.000,-(legalisir)
- 51 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 52 4 (empat) lembar SPPD atas nama Drs. Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 53 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 7.000.000,-(legalisir)
- 54 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 55 3 (tiga) lembar SPPD atas nama Zuhanda Agus,SH,MH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 56 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,-(legalisir)
- 57 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 58 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita,S,Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 59 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).

Hal. 115 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,- (legalisir)
- 61 Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 62 4 (empat) lembar SPPD atas nama Hendri HK,SH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 63 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,-(legalisir)
- 64 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 65 4 (empat) lembar SPPD atas nama M. Erlan. SE tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 66 Perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2 01 04 2 03 01 01 1 10 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 34.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir)
- 67 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 28 Juni 2006 (legalisir).
- 68 6 (enam) lembar Purchase Order bulan Juni 2006 .
- 69 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 05 01 1 25 untuk biaya makan dan minum Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 5.180.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir)
- 70 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp. 62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 71 1 lembar SSP sejumlah Rp. 415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 72 1 lembar SSP sejumlah Rp. 34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 73 1 lembar SSP sejumlah Rp. 227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 74 1 lembar SSP sejumlah Rp. 163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 75 1 lembar SSP sejumlah Rp. 24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 76 1 lembar SSP sejumlah Rp. 50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 77 1 lembar SSP sejumlah Rp. 336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 1 lembar SSP sejumlah Rp. 77.700,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 79 1 lembar SSP sejumlah Rp. 59.250.000,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 80 1 lembar Tanda Terima dari Darma Evita,S,Sos yaitu pengembalian kelebihan setoran potongan Pajak Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 5.358.155,- tahun 2006 (legalisir).
- 81 1 lembar Kwitansi pembayaran biaya photo copy pengadaan dan kuesioner kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 4.570.000,- (legalisir).
- 82 1 lembar bon foto copy sejumlah Rp 4.570.000,- (legalisir).
- 83 1 (satu) lembar PerincianPenerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening 2 01 04 2 02 03 02 1 24 untuk biaya foto copy kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 4.570.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 84 1 (satu) lembar kegiatan pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 493.246.000,- (legalisir).
- 85 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006 sejumlah Rp. 9.996.000,-(legalisir).
- 86 13 (tiga belas) lembar Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 (legalisir).
- 87 1 (satu lembar) Nota Dinas dan Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 6 Pebruari 2006 (legalisir)
- 88 1 (satu lembar) Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (legalisirs).
- 89 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2 01 04 2 01 02 02 1 24 untuk uang harian pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 9.996.000,- tanggal 31 Agustus 2006 (legalisir).

Hal. 117 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 90 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir)
- 91 1 (satu) lembar bon pengadaan alat tulis kantor sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir).
- 92 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 01 05 1 11 untuk pesanan alat tulis kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 3.700.000,-tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 93 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai (biaya enoumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- (legalisir)
- 94 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 01 1 08 untuk jasa tenaga kerja non pegawai (biaya enoumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 395.000.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 95 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- (legalisir).
- 96 1 (satu) lembar Bon pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- (legalisir).
- 97 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 03 1 09 untuk pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,-kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 98 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 14 Juni 2006 (legalisir).
- 99 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 02 1 09 untuk biaya akomodasi dan transportasi enoumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 2.500.000,-(legalisir).
- 101 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 01 1 09 untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000 tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 102 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pimpinan DPRD Propinsi Riau tanggal 4 Oktober 2006 (asli).
- 103 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Oktober 2006 (asli).
- 104 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Oktober 2006 (asli).
- 105 1 (satu) bundel Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 24 Desember 2006 (copy).
- 106 1 (satu) lembar Nota Dinas dari ketua DPRD Propinsi Riau 29 Nopember 2006 perihal Pemberhentian Tenaga Ahli Komisi A DPRD Propinsi Riau (copy)
- 107 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil I Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (asli).
- 108 1 (satu) lembar Nota Dinas dan Ketua DPRD Propinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran Jadwal Kegiatan Presentasi Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau (asli).
- 109 Hasil koreksi pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan oleh Sekretaris DPRD Propinsi Riau (asli).
- 110 Hasil koreksi pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking oleh Sekretaris DPRD Propinsi Riau (asli).
- 111 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau. (copy)

Hal. 119 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 112 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPT5.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000. (copy)
- 113 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.A Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. (copy)
- 114 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001. (copy)
- 115 Naskah Pelantikan tanggal 1 Juni 2001. (copy)
- 116 Salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (copy)
- 117 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006. (copy)
- 118 Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 22 Agustus 2000. (copy)
- 119 Naskah Pelantikan. (copy)
- 120 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/KP-II/2000/13 tanggal 23 Agustus 2000. (copy)
- 121 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/SPP-II/2004/01 tanggal 18 Mei 2004. (copy)
- 122 Salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. (copy)
- 123 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 124 Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.226/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil An. Drs. RUSKIN HAR. (copy)
- 125 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001. (copy)
- 126 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001. (copy)
- 127 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999. (copy)
- 129 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.423.4-1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy)
- 130 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.423.4-1296 tanggal 27 Maret 1995. (copy)
- 131 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 132 Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 133 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up. 221/37/76 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 134 Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1976 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 135 Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999. (copy)
- 136 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999. (copy)
- 137 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.433-2239 tanggal 22 September 1979. (copy)
- 138 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.433-2239 tanggal 22 September 1979. (copy)
- 139 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.4-4959.- tanggal 31 Desember 1982. (copy)
- 140 Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.4-4959 tanggal 31 Desember 1982. (copy)
- 141 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3-178 tanggal 16 Januari 1986. (copy)
- 142 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3-178 tanggal 16 Januari 1986.(copy)
- 143 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988. (copy)
- 144 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988. (copy)

Hal. 121 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 145 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1  
Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 146 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau  
Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 147 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Riau Nomor : Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 148 Daftar lampiran Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 149 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619716 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar  
Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) (asli).
- 150 1 (satu) lembar CEK No. ZT 615830 tanggal 14 Juni 2006 sebesar  
Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) (asli)..
- 151 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619717 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar  
Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) (asli)..
- 152 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619715 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar  
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 153 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619718 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar  
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 154 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619719 tanggal ....Agustus 2006 sebesar  
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 155 Tanda terima tanggal 24 Oktober 2006 antara Ikhsan,SH,MH dengan  
Drs. H.AA Nazief Soesilo Dharma (asli)
- 156 Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator sejumlah Rp.395.000.000,-  
tanggal 23 Agustus 2006 (asli)
- 157 Surat Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Nomor: 036.PKOP-  
UNRI.X.2006 tanggal 24 Oktober 2006 hal Penyerahan Draf Laporan Akhir  
Kajian (asli).
- 158 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan  
Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 14 Oktober 2006 (asli).
- 159 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumeraor Pengkajian dan  
Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 26 Agustus 2006 (asli).
- 160 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan  
Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 26 Agustus 2006 (asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161 Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI Nomor: 065/PKOP-UNRI/V/2006  
Tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang  
TAHURA tanggal 24 Mei 2006 (asli).
- 162 Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI Nomor: 066/PKOP-UNRI/V/2006  
Tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang  
TAHURA tanggal 24 Mei 2006 (asli).
- 163 Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis Nomor: 056/PSPB-UNRI /  
VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli).
- 164 Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis Nomor: 057/PSPB-UNRI/  
VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli).
- 165 Surat No : 9U/KEU/2006-06/212 tanggal 15 Juni 2006 perihal  
Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Propinsi  
Riau. (asli)
- 166 Surat No : 911/KEU/2006-03/210 tanggal 17 Maret perihal Penerbitan  
SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Propinsi Riau.  
(asli)
- 167 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 0028/SKO/BL/II/2006 tentang  
otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April  
2006. (copy)
- 168 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 0029/SKO/BL/II/2006 tentang  
otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April  
2006.(copy)
- 169 Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.239/V/2006 tentang  
Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengganti Yang diberi Wewenang Untuk  
Menandatangani Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Penatausahaan  
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 24 Mei 2006.(copy)
- 170 Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat  
Daerah Propinsi Riau tanggal 21 Mei 2004.(copy)
- 171 Peraturan Gubernur Riau Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran  
2006.(copy)
- 172 Pemerintah Provinsi Riau Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2006  
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau.(copy)
- 173 Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 000443 / BTL /- BP / PK /  
2006 tanggal 25 April 2006.

Hal. 123 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 0442/DP/2006 tanggal 25 April 2006. (copy).
- 175 Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor : 06/SPP/IV/BAU/BK/2006 tanggal 19 April 2006 (copy)
- 176 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tanggal 19 April 2006. (copy)
- 177 Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006. (copy)
- 178 Surat Perimintaan Pembayaran Pengisian Kas Tanggal 19 April 2006. (copy)
- 179 Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006. (copy)
- 180 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.333/V/2004 tentang Penetapan pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II b Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 181 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.333/V/2004 tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 182 Realisasi Dana Panleg Sekretariat DPRD Prov. Riau Tahun Anggaran 2006.(copy)
- 183 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang trafficking Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 184 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking, (copy)
- 185 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 186 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan Pornoaksi Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 187 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 6.754.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan pornoaksi. (copy)
- 188 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 6.754.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 190 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Tenaga Kerja. (copy)
- 191 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 192 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 193 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- 194 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 195 Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 196 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- 197 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 198 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang RPJP Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 199 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang RPJP. (copy).
- 200 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 15 Januari 2007. (copy)
- 201 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juni 2006 tanggal 10 Juli 2006. (asli)
- 202 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juli 2006 tanggal 10 Agustus 2006. (asli)

Hal. 125 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 203 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Agustus 2006 tanggal 11 September 2006. (asli)
- 204 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan September 2006 tanggal 10 Oktober 2006. (asli)
- 205 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Oktober 2006 tanggal 07 November 2006. (asli)
- 206 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan November 2006 tanggal 10 Desember 2006. (asli)
- 207 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Desember 2006 tanggal 10 Januari 2007. (asli)
- 208 Surat Nomor : 900/KEU/07.01 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penyampaian Dokumen Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006. (asli)
- 209 Surat Nomor : 900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 210 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 211 Surat Nomor : 900/KEU/88.27 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 212 Surat Nomor : 900/KEU/13.25 tanggal 11 September 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 213 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/13.25. (asli)
- 214 Surat Nomor : 900/KEU/48.22 tanggal 10 Agustus 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 215 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/98.32 tanggal 10 Agustus 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 216 Surat Nomor : 900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 tentang Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217 Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau No. 900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 218 Surat Nomor : 900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 219 Tanda Terima Surat Asisten Bidang Umum Administrasi Umum Provinsi Riau No. 900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 220 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001969/BI-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006.(copy)
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
  - 1 (satu) bundle daftar pengantar surat perintah membayar tanggal 16 Agustus 2006 (copy)
  - Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No Rt. tanggal 16 Agustus 2006. (copy)
  - Surat Pernyataan KM. NAZIEF SOESILA DHARMA. (copy)
  - Surat Pernyataan. (copy)
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
  - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy)
  - Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy)
  - Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
  - Keputusan Rektor UNRI Nomor : 170 / J19 / AK/ 2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008.(copy)
  - Surat Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)

Hal. 127 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Lampiran Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006. (copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang trafficking tanggal 25 Agustus 2006. (copy)
- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Juni 2006. (copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006. (copy)

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006. (copy)

221) Pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja terdiri dari :

- Surat perintah membayar Nomor : SPM : 001925/BI-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy)
- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- Surat Pernyataan.(copy)
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 34/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.(copy)
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.(copy)
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama. (copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenga Kerja.(copy)
- Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)

Hal. 129 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI Nomor : 028J19.1.13.Kp/2002 tanggal 2 September 2002 tentang pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik.(copy)
- Surat Nomor : 026/PSPB-UNRI/IV/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penawaran Harga. (copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenga Kerja.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 12 Januari 2006.(copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegitan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 08 Oktober 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.(copy)

222) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP antara lain:

- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0019201-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- Surat Pernyataan.(copy)
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP.(copy)
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP.(copy)
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP.(copy)
- Surat Nomor : 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 perihal Penawaran Harga.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI Nomor : 1500/J19.1.13/PG/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang RPJP. (copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.(copy)

Hal. 131 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP tanggal 10 Oktober 2006.(copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang RPJP tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)

223) Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001912/BI-BA/ PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy)
- 1 (satu) bundel daftar pengantar surat perintah membayar tanggal 8 agustus 2006 (copy).
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- Surat Pernyataan.(copy)
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Rektor UNRI Nomor : 77/J197AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)
- Surat Nomor : 011/BKBH-UNRI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 perihal Penawaran Harga.(copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 12 Januari 2007. (copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006.(copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 23 Agustus 2006. (copy)
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)
- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Juni 2006. (copy)

Hal. 133 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006.(copy)
  - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006. (copy)
  - Daftar pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006. (copy)
  - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy).
- 224) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim antara lain :
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001915/BI-BA/ PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
  - 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006. (copy)
  - Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
  - Surat Pernyataan.(copy)
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
  - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 35/5PPP/UM/ VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)



- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- Surat Nomor : 021/PKOP-UNRI/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Penawaran Harga.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)
- Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI.(copy)
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)

Hal. 135 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- Daftar Pembayaran Honorarium Tim analisa data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 14 Oktober 2006 (copy)
  - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Bulan Juli sampai dengan September tanggal 26 Agustus 2006 (copy)
1. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi terdiri dari :
    - 1 Surat Perintah Membayar Nomor 5PM : 000799/BI-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006.(copy)
    - 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
    - 3 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Mei 2006. (copy)
    - 4 Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Mei 2006.(copy)
    - 5 Surat Pernyataan.(copy)
    - 6 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (copy)
    - 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 16/SPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
    - 8 Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
    - 9 Surat Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Penawaran Harga.(copy)
    - 10 Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
    - 11 Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI.  
(copy)
- 12 Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)
- 13 Surat Nomor : 890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- 14 Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- 15 Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 11 April 2006. (copy)
- 16 Owner Estimate tanggal 11 April 2006.(copy)
- 17 Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- 18 Kwitansi sejumlah Rp. 3.700.000,- untuk Pembayaran Biaya pengadaan alat tulis Kantor kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- 19 Faktur CV. Winta Karya tanggal....Juni 2006 senilai Rp.3.700.000,-.(copy)
- 20 Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- 21 Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau.(copy)
- 22 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 11 Februari 2006.(copy)
- 23 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 18 Februari 2006.(copy)
- 24 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Februari 2006.(copy)
- 25 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 25 Februari 2006.(copy)

Hal. 137 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 26 Februari 2006.(copy)
- Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 4 Maret 2006.(copy)
    - Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 5 Maret 2006. (copy)
    - Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2006. (copy)
    - Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Maret 2006. (copy)
    - Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 18 Maret 2006. (copy)
    - Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Maret 2006. (copy)
    - Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 25 Maret 2006. (copy)
  - Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Sekretaris DPRD Propinsi Raiu tanggal 6 Februari 2006. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar nama pelaksana lembur kerja Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Agustus 2006 tanggal 31 Agustus 2006.(copy)
- Surat Tanda Setoran tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp.6.754.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 6.754.000,- tanggal 15 Januari 2007. (copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal ...Juni 2006.(copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) UNRI Nomor : 054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- Daftar Honor Enumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2005.(copy)
- Daftar Honor Enumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005.(copy)
  - a Daftar Honor Tim Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005.(copy)
  - b Daftar Honor Enumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005.(copy)
  - c Kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- Juni 2005.(copy)
  - d Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
  - e Daftar Honor Tim Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005.(copy)
  - f Kwitansi senilai Rp. 5.180.000,- untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi

Hal. 139 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- h 1 (satu) bundel Purchase Order tanggal.... Juni 2006. (copy)
- i Kwitansi senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak laporan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- j Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- k Kwitansi senilai Rp. 1.800.000,- untuk pembayaran biaya pembelian film dan cetak film dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- l Faktur Koperma Foto tanggal .... Juni 2006.(copy)
- m Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- n Kwitansi senilai Rp. 36.250.000,- untuk pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
  - Daftar Biaya Akomodasi pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005.(copy)
  - Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005.(copy)
  - Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal... Mei 2005.(copy)
  - Daftar Biaya Transportasi Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005.(copy)
  - Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Emilda Firdaus tanggal ... Juni 2006. (copy)
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Nurahim Rasudin tanggal ... Juni 2006. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Saiman, Sip,MSi tanggal ... Juni 2006. (copy)
- Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Ikhsan, SH. MH tanggal ... Juni 2006. (copy)
- Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Dodi Haryono. SHL., SH., MH tanggal ... Juni 2006. (copy)
- Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Meyzi Heriyanto tanggal ... Juni 2006. (copy)
- Tanda Terima Rp. 7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Raiu tanggal 7 Juni 2006.(copy)
- Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006. (copy)
- Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy)
- Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Drs.Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2007.(copy)
- Tanda terima Rp. 7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy)
- Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy)
- Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Zuhanda Agus.SH., MH tanggal 7 Juni 2007.(copy)
- Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.(copy)
- Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006. (copy)
- Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Darma Evita tanggal 7 Juni 2007. (copy)
- Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.(copy)

Hal. 141 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Hendri HK, SH tanggal 7 Juni 2007.(copy)
  - Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.(copy)
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas An. M. Erlan, SH tanggal 7 Juni 2007.  
(copy)
  - Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Meyzi Heriyanto, S.Sos, Msi tanggal 23 April 2007
- 3 1 (satu) lembar SPAA: 001969/BL-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 (asli).
- 4 1 (satu) lembar SPM: 001920/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Agustus 2006 (asli).
- 5 1 (satu) lembar SPM: 001912/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Agustus 2006 (asli).
- 6 1 (satu) lembar SPM: 001925/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Tentang Tenaga Kerja bulan Agustus 2006 (asli).
- 7 1 (satu) lembar SPM: 001915/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Agustus 2006 (asli).
- 8 1 (satu) lembar SPM: 00799/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi untuk bulan Juni 2006 (asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: JD1068/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 10 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01067/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 11 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01061/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 12 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01056/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 13 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01057/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 14 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00209/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli)
- 15 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00208/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli)
- 16 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU741 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No.Rekening : 01.02.OO3393.9 beserta lampiran (asli).
- 17 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (asli).
- 18 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-41 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 19 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/40 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).

Hal. 143 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (asli).
- 21 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-40 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 22 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/39 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 23 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan (asli).
- 24 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-39 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 25 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/38 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 26 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (asli).
- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-38 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 28 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 29 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (asli).
- 30 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).



- 31 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00209/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (Foto Copy).
- 32 2 (dua) LEMBAR PENGESAHAN PK YANG TERPAKAI BULAN MARET 2006 OLEH SRI MEKKA, S tanggal 31 Maret 2006 (asli)
- 33 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 34 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli).
- 35 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 36 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No : 00208/SKO/BL/II//2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto Copy).
- 37 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA.S tanggal 31 Maret 2006 (asli).
- 38 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.9.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 32/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli).
- 39 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Perda Yang tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 33/SPPP/UM/V/2006/ 890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli).

Hal. 145 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 41 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 42 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli).
- 43 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.6.750.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 44 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Traficking tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 45 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 46 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 47 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan Dan Kemasyarakatan tanggal 18 Januari 2007 (asli)
- 48 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 18 Januari 2007 (asli)
- 49 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya enumerator , Penelitian ahli dan pengolah data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 33/SPPP/UM/V72006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli)



- 50 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 12 Desember 2006 (asli).
- 51 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli).
- 52 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 11 Desember 2006 (asli).
- 53 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 54 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 55 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 32/SPPP/UM/VV2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli).
- 56 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 57 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli).

Hal. 147 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 58 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 22 Desember 2006 (foto copy).
- 59 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 60 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli, biaya Pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 61 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Akomodasi dan transportasi Enoumerator dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 62 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli, biaya Pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 63 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian Film dan cuci cetak Film tanggal 14 Juni 2006. (asli)
- 64 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli).
- 65 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya photo copy , penggandaan dan kuesioner kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 66 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 67 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Cafe (biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 68 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya photocopy/penggandaan Kuesioner Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 415.455,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).

69 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya photocopy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 62.320,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).

70 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 227.275,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).

71 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 34.090,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).

72 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangkaian mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 24.545,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).

73 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangkaian mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) sebesar 163.640,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).

74 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPn dari CV. Wintra Karya (biaya pesana ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Graft dan Porno Aksi) sebesar 336.365,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).

75 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari CV. Wintra Karya (biaya pesana ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 50.455,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).

76 2 (dua) bundel Buku Kas Umum bulan Januari sampai dengan Desember 2006. (asli)

77 2 (dua) lembar buku Bank (asli)

78 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro (foto copy legalisir)

Hal. 149 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 1 (satu) lembar Memo dari Drs. Ruski Har kepada Sdr. Zuhanda dan Sri Mekka, S, SH, MSi perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan 4 (empat) kegiatan Pengkajian dan Penelahaan Ranperda Propinsi Riau (asli);
- 80 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No: 009/O/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003.
- 81 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No: 167/J19/KS/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenakerjaan UNRI dengan Pihak Luar.
- 82 1 ( satu ) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006.
- 83 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Provinsi Riau.
- 84 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 32/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 17 April 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODY HARYONO, SHI, SH., MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Riau, tentang kegiatan/pekerjaan pengkajian dan penelahaan Ranperda tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang;
- 85 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, Msi selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelahaan Ranperda Tentang Ketenagakerjaan.
- 86 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH. MH. selaku Ketua Badan Konsultasi Hukum Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelahaan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 87 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Ilmu Politik Universitas Riau.



Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim.

88 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 53/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 16 Juni 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, Msi. Selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.

89 1 (satu) Eksemplar dokumen foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, Msi. Selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau. Tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Porno Grafi dan Porno Aksi.

90 Kegiatan / Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI22006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya Enoumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI22006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar daftar Pembayaran honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja Bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 8 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.
- 1 (satu) bundle surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 34 /SPPP/UM/V/2006/890 tentang kegiatan pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 mei 2006.

Hal. 151 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembang Bisnis UNRI tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar surat Ketua Pusat Studi Pengembangan Bisnis UNRI Nomor: 026/PSPB-UNRI/V/2006 perihal Penawaran harga tanggal 19 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.
- 1 (satu) bundel proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tahun 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No: 028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002.
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No: 028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RI cq. Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan No: PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Propinsi Riau Nomor: 890/SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Kerjasama Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.

### 91 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif:

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 33/5PPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya Enoumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 33/SPPP/UM/VI72006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No: 008/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No: 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 33/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan

Hal. 153 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006.

- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI No: 011/BKBH-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 25 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 1 (satu) lembar Keputusan Rektor UNRI No: 77/J19/AK/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010 tanggal 11 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretariat DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 tentang Penawaran Kerjasama tanggal 24 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau.

92 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 32/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan /pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 32/SPPP/UM/



VT/2006/890 tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 10 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 17 April 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar surat Fakultas Hukum UNRI No: 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 20 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang kencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006.

Hal. 155 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 1 (satu) bundel surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No: 1500/J19.1.13/PG/2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tanggal 24 Nopember 2005.
- 1 (satu) lembar surat Sekwan DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

93 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim:

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya enoumeretor, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VT/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2006.
- 1 ( satu ) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 29 Mei 2006.
  - 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 02 Juni 2006.
  - 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI No: 021/PKOP-UNRI/V72006 tentang Penawaran Harga tanggal 31 Mei 2006.
  - 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI.
  - 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tahun 2006.
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No: 148/J19.1.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tanggal 30 Januari 2003.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI cq Kantor wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan
  - 1 (satu) Pajak Pekanbaru Senapelan No: PEM-00048/WPJ-02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.
  - 1 (satu) lembar Surat Sekwan DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 30 Mei 2006.
- 94 Kegiatan/pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking :
- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 53/SPPP/UM/VT/2008/890 tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2006.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya Eunomator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 53/SPPP/ UM/

Hal. 157 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI/2008/890 tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 25 Agustus 2006.

- Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli sampai dengan September 2006 dibayar tanggal 25 September 2006.
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006.
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 015/P3W-UNRI/5K/VT/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006.
- Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 53/SPPP/UM/VI/2006 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 16 Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Trafficking Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 dan Nomor : 39/PS.UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar surat dari Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) kepada sekretaris DPRD Provinsi Riau Nomor : 39/PSW-UNRI/VI/2006 tentang Kerjasama Pengkajian Ranperda Trafficking tanggal 15 Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diajukan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2006.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 170/J19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau No : 01/P3W-UNRI/SK/II/2005 tentang Susunan Kepengurusan pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005.
- 2 (dua) lembar Susunan Kepengurusan Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Riau kepada Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 13 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Trafficking.

95 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi :

Hal. 159 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SPM No. 0007/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pembahasan Ranperda Tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografidan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar ) Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 Cafe (biaya makan dan minum dalm rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan Pornoaksi). Juli 2006
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran PPh 21 dari Pembayaran Biaya Jasa Tenaga Kerja non Pegawai tanggal 11 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya Photocopy / pengadaan Kuessioner Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya Photocopy / pengadaan Kuessioner Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.

Hal. 161 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan pornoaksi tanggal 28 Juni 2006.
- 4 (empat) lembar Purchase Order di GKS Cafe tanggal 6 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Cafe Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Cafe Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Photocopy, penggandaan dan kuessioner kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk fotocopy kuessioner kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan pornoaksi.
- 1 (satu) lembar bon kontan dari Azalia Press untuk fotocopy Kuessioner juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk fotocopy laporan dan jilid laporan Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian film dan cuci cetak film.
- 1 (satu) lembar Faktur dari Koperma Photo untuk pembayaran pembelian Fuji Film dan Cuci cetak film Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator dalam rangka pelaksanaan kegiatan



pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan pornoaksi.

- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Pengkajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau Nomor : 054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juni 2006.

Hal. 163 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda pornografi dan pornoaksi juli 2006
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengolahan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ( 1 Paket ).
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juli 2006
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk biaya jasa Tenaga Kerja non Pegawai Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk Honorarium Tim/ Panitia Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan Alat tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Wintra Karya untuk membayar biaya pengadaan ATK, Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk biaya Alat tulis Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas Tanggal 6 Februari 2006
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 26 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 5 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari sabtu tanggal 11 Maret 2006
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 18 Maret 2006.

Hal. 165 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Maret 2006.
- Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Staf Sekretariat DPRD Propinsi Riau perihal pelaksanaan Lembur tanggal 6 Februari 2006.
- Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Agustus 2006 untuk Uang Harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 31 Agustus 2006
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Nurahmin Rasudin, SH,MH, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Ikhsan, SH.MH, Juni 2006
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Dody Haryono,SHI,SH,MH, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Saiman, S.Ip.,Msi, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.si, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 16/SPPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univ. Riau tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Nomor : 890/SP/UM/IV/2006/16 'dan Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau Nomor : 018/



PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang penawaran harga.

- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) bundle surat keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor : 148/J19.13/KP/2003 tentang pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi Dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Riau (PKOP-Fisipol UNRI)
- 1 (satu) lembar surat no : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI Nomor : 890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Harga.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Propinsi Riau kepada sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 11 April 2006 perihal Kegiatan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Owner Estimate / estimasi Harga Biaya Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 11 April 2006.
- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi oleh Pusat kajian Otonomisasi Dan Pembangunan Universitas Riau, April 2006.

96 Surat Tugas dari Ketua P3W UNRI No: 14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.

97 Tanda Bukti Pembayaran pelaksanaan pengambilan data/kolektor data primer dan sekunder tentang Trafficking di Kota Dumai senilai Rp.1.775.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida.M.Si tanggal 29 Agustus 2006.

98 Tanda Bukti Serah Terima Dokumen yang Menerima Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 5 September 2006.

99 Data Kasus Trafficking In Person Polresta Dumai Tahun 2006.

Hal. 167 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Perda Kota Dumai No: 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan tanggal 28 Juni 2004.
- 101 Keputusan Walikota Dumai No: 472/SOS-PP/2004 tentang Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak tanggal 11 Oktober 2004.
- 102 Lampiran Keputusan Walikota Dumai No: 472/SOS-PP/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kota Dumai.
- 103 Surat Tugas No: 400/SOS-PP/2005/34.
- 104 Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau.
- 105 Keputusan Rektor UNRI No: 170/J19/AK/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) pada Lembaga Peneliti UNRI periode 2004-2008.
- 106 Keputusan Kepala P3W UNRI No: 01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI.
- 107 Keputusan Ketua P3W UNRI No: 014/P3 W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 108 Keputusan Ketua P3W UNRI No: 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 109 Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor.....tanggal 2006 tentang pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia (trafficking) perempuan dan anak (tulisan tangan).
- 110 Kliping Koran Riau Pos tentang adanya kasus Trafficking.
- 111 Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor: --- tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking ) Perempuan dan anak.
- 112 Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : --- tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan anak.
- 113 Instrumen dan Daftar Wawancara Pengumpulan Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking Propinsi Riau .
- 114 Surat Tugas No.13/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.(asli).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006.  
(copy).
- 116 Surat Tugas No.12/P3 W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006.(copy).
- 117 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W)  
Universitas Riau Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Tentang Susunan Tim  
PekerjaanPengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 19  
Juni 2006. (copy).
- 118 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W)  
Universitas Riau Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Tentang Susunan Tim  
Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal  
19 Juni 2006. (copy).
- 119 Lampiran Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Susunan Enoumerator  
Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal  
19 Juni 2006.
- 120 Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.  
(copy).
- 121 Surat Nomor : 20/P3W-UNRI/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tentang  
Permohonan Pencairan bona. (asli).
- 122 Surat No : W4.Dh.Um.01.10-399 tanggal 13 Juni 2006 perihal  
Penjelasan Data Perkara Pidana Perdagangan Perempuan & Anak. (copy).
- 123 Surat No : B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Data  
Perdagangan Manusia, Pornoaksi/ Pornografi dan PJTKI. (copy).
- 124 Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata Rias Pengantin Kab.  
Indragiri Hilir Tahun 2006. (copy)
- 125 Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Khusus Pajak Hotel  
dan Restoran untuk Bulan Juni 2006.
- 126 Proposal Studi Banding dalam Rangka Penyusunan Rancangan  
Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak  
(Trafficking) Propinsi Riau.
- 127 Pokok-pokok Pikiran perlunya Kebijakan Daerah Menyikapi  
Fenomena Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak Untuk  
Propinsi Riau.
- 128 Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di  
Propinsi Riau Tahun 2006 oleh P3W Universitas Riau.

Hal. 169 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129 Jual Beli Perempuan dan Anak (Trafficking) di Propinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) universitas Riau tanggal 4 Oktober 2006.
- 130 Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 170/J-19/AK/ 2004 Tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004. (copy).
- 131 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 01/P3W-UNRI/5K/I/2005 Tentang Susunan Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005. (copy).
- 132 Informasi Data Dan Atau Data Yang Akan Dicari.
- 133 Surat Perintah Perjalanan Dinas. (copy)
- 134 Jadwal kegiatan presentase pengkajian dan penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau (copy).
- 135 Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking Provinsi Riau. (copy).
- 136 Undangan Nomor : 186/Und/BKOW7II/2006 dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita.
- 137 Proposal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Propinsi Riau. (asli).
- 138 Catatan Tulisan Tangan.
- 139 Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor :77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Periode 2006-2010.
- 140 Surat IKHSAN,SH, MH selaku Ketua Tim Peneliti No. 14/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Permohonan Informasi Data.
- 141 Surat Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 29 Mei 2006.
- 142 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor :002/BKBH-UNRI/W2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 143 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 003/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

144 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 004/BKBH-UNRI/W2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

145 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 005/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Ahli Analisa Data Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

146 Surat Ketua BKBH Nomor : 012/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, Perihal Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan dan Bantuan Pencairan Dana Kajian.

147 Surat Adendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/20006/890 tanggal 29 Mei 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan dan Pengkajian Dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

148 Surat Keputusan Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Nomor : 01/BKBH/PN/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Staf Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau.

149 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 Uang Sejumlah Rp.395.000.000,-

150 Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2006.

151 Surat Perintah Perjalanan Dinas Tanggal 24 Agustus 2006.

152 Surat Tugas Nomor : 13/BKBH-UNRI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006.

153 Surat Daftar Pembayaran Honorarium tim Peneliti ahli pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli - September 2006, tanggal 25 Agustus 2006.

Hal. 171 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 154 Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006
- 155 Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 156 Surat Tanda Terima tanggal 25 Oktober 2006.
- 157 Surat Ketua BKBH Nomor : 016/BKBH-UNRI/X/2006 tanggal 28 Oktober 2006, perihal Penyerahan Draft laporan Akhir Kajian.
- 158 Surat Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.
- 159 Surat Tanda Terima Titipan Uang Denda tanggal 4 Agustus 2006.
- 160 Surat tanda terima tanggal 24 Agustus 2006.
- 161 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 25 Mei 2006, Rapat Tim Persiapan Proposal.
- 162 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2006, Rapat Turun Lapangan.
- 163 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2006, Persiapan Turun Lapangan.
- 164 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan.
- 165 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan.



- 166 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 25 September 2006, Analisis Data.
- 167 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Selasa Tanggal 26 September 2006, Analisis Data.
- 168 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006, Persiapan Ekspose.
- 169 Keputusan Rektor UNRI Nomor: 170/J19/AK/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang pengangkatan Dra. Lenda Farida.M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (fotocopy).
- 170 Keputusan Kepala P3W UNRI No: N- 01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI (foto copy)
- 171 Salinan Kep. Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 009/0/2003 tanggal 27 Januari 2005 tentang Statute UNRI (foto copy)
- 172 Keputusan REKTOR UNRI Nomor: 024/J19/KP/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Pusat dan Badan-badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UNRI (fotocopy).
- 173 Surat Sekda DPRD Propinsi Riau Nomor: 890/SP-UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang kerjasama (foto copy).
- 174 Surat P3W Nomor: 39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 perihal kerjasama pengkajian Ranperda Trafficking (foto copy).
- 175 Proposal pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking Propinsi Riau (foto copy)
- 176 Note Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan P3W UNRI tanggal 15 Juni 2007 (foto copy)
- 177 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (foto copy)
- 178 Surat P3W Nomor: 43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Mohon Bantuan Pencairan Dana Penelitian dan Addendum Waktu (asli)

Hal. 173 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179 Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking No: 43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 (asli).
- 180 Tanda terima draf Laporan Akhir Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 24 Oktober 2006 (asli)
- 181 Keputusan Ketua P3W No: 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli).
- 182 Keputusan Ketua P3W No: 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking beserta lampiran susunan Tim Enumerator (asli).
- 183 Tanda terima SPPD Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 dari Dra. Hj. Lena Farida.,M. Si oleh Zulfikar tanggal 20 Desember 2006 (foto copy)
- 184 Tanda terima uang sebesar Rp.395.000.000,- dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau oleh Dra. Hj. Lena Farida,M.Si tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy)
- 185 Kwitansi uang sejumlah Rp. 395.000.000,- dari Sri Mekka.S oleh Dra. Hj. Lena Farida.M.Si tanggal 25 Agustus 2006 (asli)
- 186 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy)
- 187 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy)
- 188 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy)
- 189 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy)
- 191 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (foto copy)
- 192 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (foto copy)
- 193 Tanda terima uang sejumlah Rp. 59.250.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida,M.Si untuk setoran Potongan Pajak untuk Kegiatan pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking penerima Darma Evita tanggal 25 Agustus 2006 (foto copy)
- 194 SSP setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumenator Penelitian Ahli & Pengolah Data Kegiatan pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sebesar Rp. 59.250.000,- tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 195 Tanda terima titipan uang denda sebesar Rp. 19.750.000,- atas kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Traficking dari Dra. Hj. Lena Farida penerima Dharma Evita tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy)
- 196 SPPD An. Drs. Kasmiruddin tanggal 19 September 2006 (asli)
- 197 SPPD An. Dra. Siti Sofro,M.Si tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 198 SPPD An. Dra. Risdianti tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 199 SPPD An. Drs. Endang Sutrisna M.Si tanggal 19 September 2006 (asli)
- 200 SPPD An. Tuti Khairani, M,Si tanggal — (asli)
- 201 SPPD An. Dra. Nurayam.MS tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 202 SPPD An. Dra. Sofia Agnes,M.Si tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 203 SPPD An. Mandataris,S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli)
- 204 SPPD An. Weldo,S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli)
- 205 SPPD An. Siti Muhairanum tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 206 SPPD An. Mira Anita tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 207 Surat Tugas Nomor: 10/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 208 Surat Tugas Nomor: 11/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 (asli)
- 209 Surat Tugas Nomor: 12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 (asli)

Hal. 175 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210 Surat Tugas Nomor: 14/P3 W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 211 Surat Tugas Nomor: 15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 212 Surat Tugas Nomor: 16/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 18 September 2006 (asli)
- 213 Surat Tugas Nomor: 17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (asli)
- 214 Informasi Dan Atau Data Yang Akan Dicari (foto copy)
- 215 K-I Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk TKW (Korban)
- 216 K-II Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk Traffiker (Calo, Penampung dan lain-lain)
- 217 K-III Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (Pola dan Jenis Intervensi/Layanan)
- 218 Surat P3W No: 46/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Dumai tentang Mohon Ijin Penelitian (asli)
- 219 Surat P3W No: 47/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Renaga Kerja Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 220 Surat P3W No : 48/PSW-UNRI/VIII/ 2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 221 Surat P3W No: 49/P5W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Panwisata Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 222 Surat P3W No: 50/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua tim Penggerak PKK Ketua SOW Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 223 Surat P3W No: 51/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapolres Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 224 Surat P3W No: 52/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 225 Surat P3W No: 54/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 226 Surat P3W No: 55/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada kadis Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227 Surat P3W No: 56/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 228 Surat P3W No: 57/P5W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Pekanbaru tentang bantuan Data (asli)
- 229 Surat P3W No: 58/PSW-UNPJVIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Panggerak PKK Ketua SOW Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 230 Surat P3W No: 59/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapoltabes Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 231 Surat P3W No: 60/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 232 Surat P3W No: 75/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 233 Surat P3W No: 74/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Panggerak PKK Ketua SOW Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 234 Surat P3W No: 73/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 235 Surat P3W No: 72/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kab. Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 236 Surat P3W No: 71/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 237 Surat P3W No: 70/P5W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 238 Surat P3W No: 63/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 239 Surat P3W No: 64/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 240 Surat P3W No: 65/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 241 Surat P3W No: 66/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)

Hal. 177 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



242 Surat P3W No: 67/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOA Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)

243 Surat P3W No: 68/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli).

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa IKHSAN, SH., MH.

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 146/PID/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Nopember 2008 Nomor: 1084/Pid.B/2008/PN.PBR, yang dmintakan banding ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSKIN HAR, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair dan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Daftar Gaji an. TUTI KHAIRANI HARAHAP,S.Sos
- 2 Daftar Gaji an. Drs. KASMIRUDIN.Msi.
- 3 Daftar Gaji an. Drs. ENDANG SUTRISNA
- 4 Daftar Gaji an. TENGKU JUHARMIN.
- 5 Daftar Gaji an. HTRF SIMANJUNTAK, M.Si
- 6 Daftar Gaji an. SOFIA ACHNES, M.Si.
- 7 Daftar Gaji an. Rd. SITI SOFRO.
- 8 Daftar Gaji an. Drs. ISRIL.MH
- 9 Daftar Gaji an. RIADAYAti.
- 10 Daftar Gaji an. AHMAD RIFAI, SP, MP
- 11 Daftar Gaji an. DODI HARYONO, SHI.SH.MH
- 12 Daftar Gaji an. EMILDA FIEDAUS, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Daftar Gaji an. IKHSAN, SH.MH
- 14 Daftar Gaji an. MEYZI HERIYANTO, S.Sos. M.Si.
- 15 Daftar Gaji an. Dra. LENA FARIDA, M.Si.
- 16 Daftar Gaji an. INDRA SAFRI, S.Sos, M.Si.
- 17 Ijazah Magister Sains an. INDRA SAFRI
- 18 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial an. INDRA SAFRI.
- 19 Ijazah Sarjana Hukum an. T. JUHARMIN
- 20 Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa an. T. JUHARMIN.
- 21 Ijazah Strata Satu jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah an. DODY HARYONO
- 22 Ijazah Sarjana Hukum an. DODI HARYONO.
- 23 Ijazah Magister Hukum an. DODI HARYONO.
- 24 Ijazah Magister Sains an. ENDANG SUTRISNA.
- 25 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial politil an. ENDANG SUTRISNA.
- 26 Ijazah Sarjana Pertanian an. AHMAD RIFAI.
- 27 Ijazah Magister Pertanian an. AHMAD RIFAI.
- 28 Ijazah Magister Hukum an. ISRIL
- 29 Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan.
- 30 Ijazah Magister Sains an. MEYZI HERIYANTO.
- 31 Postgraduate Program an. MEYZI HERIYANTO.
- 32 Ijazah Magister Sains an. Rd. SITI SOFRO.
- 33 Transkrip Akademik an. Rd. SITI SOFRO.
- 34 Curriculum Vitae an. Rd. SITI SOFRO.
- 35 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu politik an. SAIMAN.
- 36 Ijazah Magister Sains an. SAIMAN.
- 37 Ijazah Sarjana Hukum an. EMILDA FIRDAUS.
- 38 Ijazah Magister Hukum an. EMILDA FIRDAUS.
- 39 Daftar Pembayaran Transportasi Tim Pengembangan Perencanaan FISIP UNRI, Dana Bersumber dan Program Non Reguler FISIP UNRI untuk bulan Juni 2007.
- 40 Tanda terima penyerahan 1 (satu) bundel Draf Laporan Akhir tanggal 25 Oktober 2006.
- 41 Surat Nomor : 005/PR/X/2006/927 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Penjelasan mengenai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif Dewan.

Hal. 179 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42 Surat Nomor : 56/PSPB-UNRI/XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Ijin Pengumpulan Data
- 43 Surat Tugas Nomor : 032/PKOP-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006.
- 44 Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau.
- 45 Arus Kegiatan Sistem Swakelola.
- 46 1 (satu) lembar buku Bank tanggal 16 Agustus 2006 (legalisir).
- 47 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.574.1/XI/2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Propinsi Riau TA. 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (legalisir).
- 48 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita,S,Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 49 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan awal/revisi Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 34.250.000,-(legalisir)
- 50 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 7.000.000,-(legalisir)
- 51 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 52 4 (empat) lembar SPPD atas nama Drs. Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 53 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 7.000.000,-(legalisir)
- 54 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 55 3 (tiga) lembar SPPD atas nama Zuhanda Agus,SH,MH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 56 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,-(legalisir)
- 57 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita,S,Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 59 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 60 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,- (legalisir)
- 61 Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 62 4 (empat) lembar SPPD atas nama Hendri HK,SH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 63 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,-(legalisir)
- 64 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 65 4 (empat) lembar SPPD atas nama M. Erlan. SE tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 66 Perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2 01 04 2 03 01 01 1 10 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 34.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir)
- 67 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 28 Juni 2006 (legalisir).
- 68 6 (enam) lembar Purchase Order bulan Juni 2006 .
- 69 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 05 01 1 25 untuk biaya makan dan minum Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 5.180.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir)
- 70 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp. 62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 71 1 lembar SSP sejumlah Rp. 415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 72 1 lembar SSP sejumlah Rp. 34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 73 1 lembar SSP sejumlah Rp. 227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).

Hal. 181 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 lembar SSP sejumlah Rp. 163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 75 1 lembar SSP sejumlah Rp. 24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 76 1 lembar SSP sejumlah Rp. 50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 77 1 lembar SSP sejumlah Rp. 336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 78 1 lembar SSP sejumlah Rp. 77.700,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 79 1 lembar SSP sejumlah Rp. 59.250.000,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 80 1 lembar Tanda Terima dari Darma Evita,S,Sos yaitu pengembalian kelebihan setoran potongan Pajak Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 5.358.155,- tahun 2006 (legalisir).
- 81 1 lembar Kwitansi pembayaran biaya photo copy pengadaan dan kuesioner kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 4.570.000,- (legalisir).
- 82 1 lembar bon foto copy sejumlah Rp 4.570.000,- (legalisir).
- 83 1 (satu) lembar PerincianPenerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening 2 01 04 2 02 03 02 1 24 untuk biaya foto copy kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 4.570.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 84 1 (satu) lembar kegiatan pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 493.246.000,- (legalisir).
- 85 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006 sejumlah Rp. 9.996.000,-(legalisir).
- 86 13 (tiga belas) lembar Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 (legalisir).
- 87 1 (satu lembar) Nota Dinas dan Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 6 Pebruari 2006 (legalisir)
- 88 1 (satu lembar) Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (legalisirs).
- 89 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2 01 04 2 01 02 02 1 24 untuk uang harian pengkajian dan penelaahan Ranperda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 9.996.000,- tanggal 31 Agustus 2006 (legalisir).

- 90 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir)
- 91 1 (satu) lembar bon pengadaan alat tulis kantor sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir).
- 92 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 01 05 1 11 untuk pesanan alat tulis kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 3.700.000,-tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 93 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai (biaya enoumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- (legalisir)
- 94 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 01 1 08 untuk jasa tenaga kerja non pegawai (biaya enoumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 395.000.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 95 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- (legalisir).
- 96 1 (satu) lembar Bon pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- (legalisir).
- 97 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 03 1 09 untuk pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,-kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 98 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 14 Juni 2006 (legalisir).
- 99 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 02 1 09 untuk biaya akomodasi dan transportasi enoumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).

Hal. 183 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 2.500.000,-(legalisir).
- 101 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 01 1 09 untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000 tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 102 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pimpinan DPRD Propinsi Riau tanggal 4 Oktober 2006 (asli).
- 103 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Oktober 2006 (asli).
- 104 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Oktober 2006 (asli).
- 105 1 (satu) bundel Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 24 Desember 2006 (copy).
- 106 1 (satu) lembar Nota Dinas dari ketua DPRD Propinsi Riau 29 Nopember 2006 perihal Pemberhentian Tenaga Ahli Komisi A DPRD Propinsi Riau (copy)
- 107 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil I Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (asli).
- 108 1 (satu) lembar Nota Dinas dan Ketua DPRD Propinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran Jadwal Kegiatan Presentasi Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau (asli).
- 109 Hasil koreksi pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan oleh Sekretaris DPRD Propinsi Riau (asli).
- 110 Hasil koreksi pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking oleh Sekretaris DPRD Propinsi Riau (asli).
- 111 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau. (copy)



- 112 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPT5.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000. (copy)
- 113 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.A Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. (copy)
- 114 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001. (copy)
- 115 Naskah Pelantikan tanggal 1 Juni 2001. (copy)
- 116 Salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (copy)
- 117 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006. (copy)
- 118 Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 22 Agustus 2000. (copy)
- 119 Naskah Pelantikan. (copy)
- 120 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/KP-II/2000/13 tanggal 23 Agustus 2000. (copy)
- 121 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/SPP-II/2004/01 tanggal 18 Mei 2004. (copy)
- 122 Salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.(copy)
- 123 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 124 Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.226/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil An. Drs. RUSKIN HAR. (copy)
- 125 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001. (copy)
- 126 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001. (copy)
- 127 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999.(copy)

Hal. 185 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999. (copy)
- 129 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.423.4-1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy)
- 130 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.423.4-1296 tanggal 27 Maret 1995. (copy)
- 131 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 132 Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 133 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up. 221/37/76 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 134 Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1976 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 135 Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999. (copy)
- 136 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999. (copy)
- 137 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.433-2239 tanggal 22 September 1979. (copy)
- 138 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.433-2239 tanggal 22 September 1979. (copy)
- 139 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.4-4959.- tanggal 31 Desember 1982. (copy)
- 140 Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.4-4959 tanggal 31 Desember 1982. (copy)
- 141 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3-178 tanggal 16 Januari 1986. (copy)
- 142 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3-178 tanggal 16 Januari 1986.(copy)
- 143 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988. (copy)
- 144 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 146 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 147 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 148 Daftar lampiran Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 149 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619716 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) (asli).
- 150 1 (satu) lembar CEK No. ZT 615830 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) (asli)..
- 151 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619717 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) (asli)..
- 152 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619715 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 153 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619718 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 154 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619719 tanggal ....Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 155 Tanda terima tanggal 24 Oktober 2006 antara Ikhsan,SH,MH dengan Drs. H.AA Nazief Soesilo Dharma (asli)
- 156 Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 23 Agustus 2006 (asli)
- 157 Surat Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Nomor: 036.PKOP-UNRI.X.2006 tanggal 24 Oktober 2006 hal Penyerahan Draf Laporan Akhir Kajian (asli).
- 158 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 14 Oktober 2006 (asli).
- 159 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumeraor Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 26 Agustus 2006 (asli).
- 160 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 26 Agustus 2006 (asli).

Hal. 187 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 161 Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI Nomor: 065/PKOP-UNRI/V/2006  
Tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang  
TAHURA tanggal 24 Mei 2006 (asli).
- 162 Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI Nomor: 066/PKOP-UNRI/V/2006  
Tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang  
TAHURA tanggal 24 Mei 2006 (asli).
- 163 Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis Nomor: 056/PSPB-UNRI /  
VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli).
- 164 Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis Nomor: 057/PSPB-UNRI/  
VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli).
- 165 Surat No : 9U/KEU/2006-06/212 tanggal 15 Juni 2006 perihal  
Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Propinsi  
Riau. (asli)
- 166 Surat No : 911/KEU/2006-03/210 tanggal 17 Maret perihal Penerbitan  
SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Propinsi Riau.  
(asli)
- 167 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 0028/SKO/BL/II/2006 tentang  
otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April  
2006. (copy)
- 168 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 0029/SKO/BL/II/2006 tentang  
otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April  
2006.(copy)
- 169 Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.239/V/2006 tentang  
Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengganti Yang diberi Wewenang Untuk  
Menandatangani Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Penatausahaan  
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 24 Mei 2006.(copy)
- 170 Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat  
Daerah Propinsi Riau tanggal 21 Mei 2004.(copy)
- 171 Peraturan Gubernur Riau Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran  
2006.(copy)
- 172 Pemerintah Provinsi Riau Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2006  
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau.(copy)
- 173 Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 000443 / BTL /- BP / PK /  
2006 tanggal 25 April 2006.



- 174 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 0442/DP/2006 tanggal 25 April 2006. (copy).
- 175 Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor : 06/SPP/IV/BAU/BK/2006 tanggal 19 April 2006 (copy)
- 176 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tanggal 19 April 2006. (copy)
- 177 Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006. (copy)
- 178 Surat Perimintaan Pembayaran Pengisian Kas Tanggal 19 April 2006. (copy)
- 179 Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006. (copy)
- 180 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.333/V/2004 tentang Penetapan pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II b Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 181 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.333/V/2004 tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 182 Realisasi Dana Panleg Sekretariat DPRD Prov. Riau Tahun Anggaran 2006.(copy)
- 183 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang trafficking Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 184 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking, (copy)
- 185 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 186 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan Pornoaksi Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 187 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 6.754.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan pornoaksi. (copy)
- 188 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 6.754.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)

Hal. 189 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 189 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 190 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Tenaga Kerja. (copy)
- 191 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 192 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 193 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- 194 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 195 Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 196 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- 197 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 198 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang RPJP Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 199 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang RPJP. (copy).
- 200 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 15 Januari 2007. (copy)
- 201 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juni 2006 tanggal 10 Juli 2006. (asli)
- 202 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juli 2006 tanggal 10 Agustus 2006. (asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Agustus 2006 tanggal 11 September 2006. (asli)
- 204 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan September 2006 tanggal 10 Oktober 2006. (asli)
- 205 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Oktober 2006 tanggal 07 November 2006. (asli)
- 206 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan November 2006 tanggal 10 Desember 2006. (asli)
- 207 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Desember 2006 tanggal 10 Januari 2007. (asli)
- 208 Surat Nomor : 900/KEU/07.01 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penyampaian Dokumen Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006. (asli)
- 209 Surat Nomor : 900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 210 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 211 Surat Nomor : 900/KEU/88.27 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 212 Surat Nomor : 900/KEU/13.25 tanggal 11 September 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 213 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/13.25. (asli)
- 214 Surat Nomor : 900/KEU/48.22 tanggal 10 Agustus 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 215 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/98.32 tanggal 10 Agustus 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 216 Surat Nomor : 900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 tentang Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)

Hal. 191 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 217 Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau No. 900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 218 Surat Nomor : 900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 219 Tanda Terima Surat Asisten Bidang Umum Administrasi Umum Provinsi Riau No. 900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 220 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001969/BI-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006.(copy)
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
  - 1 (satu) bundle daftar pengantar surat perintah membayar tanggal 16 Agustus 2006 (copy)
  - Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No Rt. tanggal 16 Agustus 2006. (copy)
  - Surat Pernyataan KM. NAZIEF SOESILA DHARMA. (copy)
  - Surat Pernyataan. (copy)
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
  - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy)
  - Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy)
  - Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
  - Keputusan Rektor UNRI Nomor : 170 / J19 / AK/ 2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008.(copy)
  - Surat Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Lampiran Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006. (copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang trafficking tanggal 25 Agustus 2006. (copy)
- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Juni 2006. (copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)

Hal. 193 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006. (copy)

221) Pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja terdiri dari :

- Surat perintah membayar Nomor : SPM : 001925/BI-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy)
- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- Surat Pernyataan.(copy)
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 34/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.(copy)
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.(copy)
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama. (copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenga Kerja.(copy)
- Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI Nomor : 028J19.1.13.Kp/2002 tanggal 2 September 2002 tentang pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik.(copy)
- Surat Nomor : 026/PSPB-UNRI/IV/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penawaran Harga. (copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenga Kerja.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 12 Januari 2006.(copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegitan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 08 Oktober 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.(copy)

222) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP antara lain:

- a Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0019201-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
- b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)

Hal. 195 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
- d Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- e Surat Pernyataan.(copy)
- f Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
- g Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP.(copy)
- h Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP.(copy)
- i Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP. (copy)
- j Surat Nomor : 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 perihal Penawaran Harga.(copy)
- k Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
- l Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI Nomor : 1500/J19.1.13/PG/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI. (copy)
- m Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- n Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
- o Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang RPJP. (copy)
- p Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006.(copy)



- q Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.(copy)
- r Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.(copy)
- s Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP tanggal 10 Oktober 2006.(copy)
- t Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang RPJP tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- u Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)

223) Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001912/BI-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy)
- 1 (satu) bundel daftar pengantar surat perintah membayar tanggal 8 agustus 2006 (copy).
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- Surat Pernyataan.(copy)
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang

Hal. 197 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)

- Keputusan Rektor UNRI Nomor : 77/J197AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)
- Surat Nomor : 011/BKBH-UNRI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 perihal Penawaran Harga.(copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 12 Januari 2007. (copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006.(copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 23 Agustus 2006. (copy)
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Juni 2006. (copy)
  - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006.(copy)
  - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006. (copy)
  - Daftar pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006. (copy)
  - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy).
- 224) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim antara lain :
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001915/BI-BA/ PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
  - 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006. (copy)
  - Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
  - Surat Pernyataan.(copy)
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
  - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 35/5PPP/UM/ VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan

Hal. 199 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)

- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- Surat Nomor : 021/PKOP-UNRI/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Penawaran Harga.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)
- Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI.(copy)
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 26 Agustus 2006.  
(copy)

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim analisa data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 14 Oktober 2006 (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September tanggal 26 Agustus 2006 (copy)

1. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi terdiri dari :

- a Surat Perintah Membayar Nomor 5PM : 000799/BI-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006.(copy)
- b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
- c 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Mei 2006. (copy)
- d Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Mei 2006.(copy)
- e Surat Pernyataan.(copy)
- f Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (copy)
- g Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 16/SPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- h Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- i Surat Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Penawaran Harga.(copy)
- j Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)

Hal. 201 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- k Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI. (copy)
- l Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)
- m Surat Nomor : 890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- n Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- o Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 11 April 2006. (copy)
- p Owner Estimate tanggal 11 April 2006.(copy)
- q Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- r Kwitansi sejumlah Rp. 3.700.000,- untuk Pembayaran Biaya pengadaan alat tulis Kantor kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- s Faktur CV. Winta Karya tanggal....Juni 2006 senilai Rp.3.700.000,-.(copy)
- t Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- u Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau.(copy)
- v Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 11 Februari 2006.(copy)
- w Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 18 Februari 2006.(copy)
- x Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syanf Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Februan 2006.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 25 Februari 2006.(copy)
- 1 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 26 Februari 2006.(copy)
- aa Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 4 Maret 2006.(copy)
- bb Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 5 Maret 2006.(copy)
- cc Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2006.(copy)
- dd Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Maret 2006.(copy)
- ee Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 18 Maret 2006.(copy)
- ff Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Maret 2006.(copy)
- gg Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 25 Maret 2006.(copy)
- hh Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 6 Februari 2006. (copy)
- ii Daftar nama pelaksana lembur kerja Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- jj Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Agustus 2006 tanggal 31 Agustus 2006.(copy)

Hal. 203 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk Surat Tanda Setoran tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp.6.754.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi. (copy)
- ll Formulir Penyetoran senilai Rp. 6.754.000,- tanggal 15 Januari 2007.(copy)
- mm Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal ...Juni 2006. (copy)
- nn Surat Keputusan Ketua Pusat kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) UNRI Nomor : 054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- oo Daftar Honor Enumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2005.(copy)
- pp Daftar Honor Enumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005.(copy)
- qq Daftar Honor Tim Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005.(copy)
- rr Daftar Honor Enumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005.(copy)
- ss Kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- Juni 2005.(copy)
- tt Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- uu Daftar Honor Tim Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005.(copy)
- vv Kwitansi senilai Rp. 5.180.000,- untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- ww Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- xx 1 (satu) bundel Purchase Order tanggal.... Juni 2006. (copy)
- yy Kwitansi senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak laporan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- zz Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aaa Kwitansi senilai Rp. 1.800.000,- untuk pembayaran biaya pembelian film dan cetak film dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi

bbb Faktur Koperma Foto tanggal .... Juni 2006.(copy)

ccc Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)

ddd Kwitansi senilai Rp. 36.250.000,- untuk pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi

eee Daftar Biaya Akomodasi pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005.(copy)

fff Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005. (copy)

ggg Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal... Mei 2005. (copy)

hhh Daftar Biaya Transportasi Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005. (copy)

iii Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)

jjj Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Emilda Firdaus tanggal ... Juni 2006. (copy)

kkk Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Nurahim Rasudin tanggal ... Juni 2006. (copy)

lll Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Saiman, Sip,MSi tanggal ... Juni 2006. (copy)

mmm Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Ikhsan, SH. MH tanggal ... Juni 2006. (copy)

nnn Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Dodi Haryono. SHL., SH., MH tanggal ... Juni 2006. (copy)

ooo Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Meyzi Heriyanto tanggal ... Juni 2006. (copy)

Hal. 205 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ppp Tanda Terima Rp. 7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- qqq Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- rrr Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy)
- sss Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Drs.Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2007.  
(copy)
- ttt Tanda terima Rp. 7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy)
- uuu Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006  
(copy)
- vvv Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Zuhanda Agus.SH., MH tanggal 7 Juni 2007.(copy)
- www Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- xxx Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- yyy Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Darma Evita tanggal 7 Juni 2007.  
(copy)
- zzz Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.(copy)
- aaaa Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- bbbb Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Hendri HK, SH tanggal 7 Juni 2007.(copy)
- cccc Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- dddd Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- eeee Surat Perintah Perjalanan Dinas An. M. Erlan, SH tanggal 7 Juni 2007.  
(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffff Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)

- 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Meyzi Heriyanto, S.Sos, Msi tanggal 23 April 2007
- 3 1 (satu) lembar SPAA: 001969/BL-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Traficking bulan Agustus 2006 (asli).
- 4 1 (satu) lembar SPM: 001920/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Agustus 2006 (asli).
- 5 1 (satu) lembar SPM: 001912/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Agustus 2006 (asli).
- 6 1 (satu) lembar SPM: 001925/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Tentang Tenaga Kerja bulan Agustus 2006 (asli).
- 7 1 (satu) lembar SPM: 001915/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Agustus 2006 (asli).
- 8 1 (satu) lembar SPM: 00799/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi untuk bulan Juni 2006 (asli).
- 9 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: JD1068/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 10 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01067/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 11 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01061/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).

Hal. 207 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01056/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 13 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01057/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 14 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00209/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli)
- 15 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00208/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli)
- 16 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU741 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No.Rekening : 01.02.OO3393.9 beserta lampiran (asli).
- 17 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (asli).
- 18 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-41 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 19 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/40 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 20 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (asli).
- 21 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-40 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 22 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/39 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 23 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan



- Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan (asli).
- 24 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-39 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 25 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/38 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No.Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 26 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (asli).
- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-38 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 28 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 29 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (asli).
- 30 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 31 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00209/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (Foto Copy).
- 32 2 (dua) LEMBAR PENGESAHAN PK YANG TERPAKAI BULAN MARET 2006 OLEH SRI MEKKA, S tanggal 31 Maret 2006 (asli)
- 33 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 34 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli).

Hal. 209 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 36 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No : 00208/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto Copy).
- 37 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA.S tanggal 31 Maret 2006 (asli).
- 38 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.9.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 32/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli).
- 39 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Perda Yang tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 33/SPPP/UM/V/2006/ 890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli).
- 41 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 42 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli).



- 43 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.6.750.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 44 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Traficking tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 45 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 46 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 47 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan Dan Kemasyarakatan tanggal 18 Januari 2007 (asli)
- 48 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 18 Januari 2007 (asli)
- 49 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya enoumerator , Penelitian ahli dan pengolah data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 33/SPPP/UM/V72006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli)
- 50 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 12 Desember 2006 (asli).
- 51 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli).
- 52 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan

Hal. 211 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 11 Desember 2006 (asli).
- 53 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 54 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 55 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 32/SPPP/UM/VV2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli).
- 56 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 57 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli).
- 58 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 22 Desember 2006 (foto copy).
- 59 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 60 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, biaya Pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).



- 61 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Akomodasi dan transportasi Enoumerator dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 62 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli, biaya Pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 63 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian Film dan cuci cetak Film tanggal 14 Juni 2006. (asli)
- 64 1 (satu ) lembar Kwitansi pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli).
- 65 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya photo copy , penggandaan dan kuesioner kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 66 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 67 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Cafe (biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 68 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya photocopy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 415.455,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 69 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya photocopy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 62.320,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 70 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 227.275,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).

Hal. 213 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 71 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 34.090,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 72 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangakan mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 24.545,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 73 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangakan mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksii sebesar 163.640,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 74 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPn dari CV. Wintra Karya (biaya pesana ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Graft dan Porno Aksi) sebesar 336.365,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 75 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari CV. Wintra Karya (biaya pesana ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 50.455,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 76 2 (dua) bundel Buku Kas Umum bulan Januari sampai dengan Desember 2006. (asli)
- 77 2 (dua) lembar buku Bank (asli)
- 78 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro (foto copy legalisir)
- 79 1 (satu) lembar Memo dari Drs. Ruski Har kepada Sdr. Zuhanda dan Sri Mekka, S, SH, MSi perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan 4 (empat) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Propinsi Riau (asli);
- 80 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No: 009/O/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003.
- 81 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No: 167/J19/KS/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenakerjaan UNRI dengan Pihak Luar.
- 82 1 ( satu ) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006.
- 83 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Provinsi Riau.



- 84 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 32/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 17 April 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODY HARYONO, SHI, SH., MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Riau, tentang kegiatan/pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang;
- 85 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, Msi Selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Ketenagakerjaan.
- 86 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH. MH. Selaku Ketua Badan Konsultasi Hukum Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 87 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN, SH. MH. Selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Ilmu Politik Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim.
- 88 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 53/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 16 Juni 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, Msi. Selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 89 1 (satu) Eksemplar dokumen foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, Msi. Selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau. Tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Porno Grafi dan Porno Aksi.
- 90 Kegiatan / Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI22006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya Enoumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI22006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar daftar Pembayaran honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja Bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 8 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.
- 1 (satu) bundle surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 34 /SPPP/UM/V/2006/890 tentang kegiatan pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembang Bisnis UNRI tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar surat Ketua Pusat Studi Pengembangan Bisnis UNRI Nomor: 026/PSPB-UNRI/V/2006 perihal Penawaran harga tanggal 19 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.
- 1 (satu) bundel proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tahun 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No: 028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat-pusat



Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002.

- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No: 028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RI cq. Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan No: PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Propinsi Riau Nomor: 890/SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Kerjasama Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.

91 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif:

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 33/5PPP/UM/VI?2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya Enumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 33/5PPP/UM/VI?2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No: 008/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No: 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.

Hal. 217 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 1 (satu) lembar surat Nomor : 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 33/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI No: 011/BKBH-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 25 Mei 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 1 (satu) lembar Keputusan Rektor UNRI No: 77/J19/AK/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010 tanggal 11 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretariat DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 tentang Penawaran Kerjasama tanggal 24 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau.

## 92 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 32/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan /pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 32/5PPP/UM/VT/2006/890 tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.

Hal. 219 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 10 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 17 April 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar surat Fakultas Hukum UNRI No: 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 20 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang kencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006.
- 1 (satu) bundel surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No: 1500/J19.1.13/PG/2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tanggal 24 Nopember 2005.
- 1 (satu) lembar surat Sekwan DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

93 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim:

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya enoumeretor, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VT/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2006.
- 1 ( satu ) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 29 Mei 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 02 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI No: 021/PKOP-UNRI/V72006 tentang Penawaran Harga tanggal 31 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI.

Hal. 221 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tahun 2006.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No: 148/J19.1.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tanggal 30 Januari 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI cq Kantor wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan
- 1 (satu) Pajak Pekanbaru Senapelan No: PEM-00048/WPJ-02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Sekwan DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 30 Mei 2006.

### 94 Kegiatan/pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 53/SPPP/UM/VT/2008/890 tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya Eunomator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 53/SPPP/UM/VI/2008/890 tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 25 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar pembayaran honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli sampai dengan September 2006 dibayar tanggal 25 September 2006.
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006.
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 015/P3W-UNRI/5K/VT/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006.
- Susunan Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 53/SPPP/UM/VI/2006 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 16 Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Trafficking Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 dan Nomor : 39/PS.UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar surat dari Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) kepada sekretaris DPRD Provinsi Riau Nomor : 39/PSW-UNRI/VI/2006 tentang Kerjasama Pengkajian Ranperda Trafficking tanggal 15 Juni 2006.

Hal. 223 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diajukan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2006.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 170/J19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau No : 01/P3W-UNRI/SK/II/2005 tentang Susunan Kepengurusan pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005.
- 2 (dua) lembar Susunan Kepengurusan Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Riau kepada Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 13 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Trafficking.

### 95 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi :

- 1 (satu) lembar SPM No. 0007/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pembahasan Ranperda Tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografidan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar ) Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 Cafe (biaya makan dan minum dalm rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan Pornoaksi). Juli 2006
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan



Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ) Juli 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran PPh 21 dari Pembayaran Biaya Jasa Tenaga Kerja non Pegawai tanggal 11 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya Photocopy / pengadaan Kuessioner Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya Photocopy / pengadaan Kuessioner Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006

Hal. 225 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan pornoaksi tanggal 28 Juni 2006.
- 4 (empat) lembar Purchase Order di GKS Cafe tanggal 6 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Cafe Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Cafe Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Photocopy, penggandaan dan kuessioner kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk fotocopy kuessioner kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan pornoaksi.
- 1 (satu) lembar bon kontan dari Azalia Press untuk fotocopy Kuessioner juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk fotocopy laporan dan jilid laporan Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian film dan cuci cetak film.
- 1 (satu) lembar Faktur dari Koperma Photo untuk pembayaran pembelian Fuji Film dan Cuci cetak film Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan pornoaksi.
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.

Hal. 227 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Pengkajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau Nomor : 054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Enumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda pornografi dan pornoaksi juli 2006
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengolahan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ( 1 Paket ).
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juli 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk biaya jasa Tenaga Kerja non Pegawai Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk Honorarium Tim/ Panitia Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan Alat tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Wintra Karya untuk membayar biaya pengadaan ATK, Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk biaya Alat tulis Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas Tanggal 6 Februari 2006
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Februari 2006.

Hal. 229 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 26 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 5 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari sabtu tanggal 11 Maret 2006
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 18 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Maret 2006.
- Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Staf Sekretariat DPRD Propinsi Riau perihal pelaksanaan Lembur tanggal 6 Februari 2006.
- Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Agustus 2006 untuk Uang Harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 31 Agustus 2006
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Nurahmin Rasudin, SH,MH, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Ikhsan, SH.MH, Juni 2006
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Dody Haryono,SHI,SH,MH, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Saiman, S.Ip.,Msi, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.si, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 16/SPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univ. Riau tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Nomor : 890/SP/UM/IV/2006/16 'dan Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang penawaran harga.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) bundle surat keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor : 148/J19.13/KP/2003 tentang pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi Dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Riau (PKOP-Fisipol UNRI)

Hal. 231 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat no : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI Nomor : 890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Harga.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Propinsi Riau kepada sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 11 April 2006 perihal Kegiatan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Owner Estimate / estimasi Harga Biaya Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 11 April 2006.
- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi oleh Pusat kajian Otonomisasi Dan Pembangunan Universitas Riau, April 2006.

96 Surat Tugas dari Ketua P3W UNRI No: 14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.

97 Tanda Bukti Pembayaran pelaksanaan pengambilan data/kolektor data primer dan sekunder tentang Trafficking di Kota Dumai senilai Rp.1.775.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida.M.Si tanggal 29 Agustus 2006.

98 Tanda Bukti Serah Terima Dokumen yang Menerima Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 5 September 2006.

99 Data Kasus Trafficking In Person Polresta Dumai Tahun 2006.

100 Perda Kota Dumai No: 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan tanggal 28 Juni 2004.

101 Keputusan Walikota Dumai No: 472/SOS-PP/2004 tentang Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak tanggal 11 Oktober 2004.

102 Lampiran Keputusan Walikota Dumai No: 472/SOS-PP/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kota Dumai.

103 Surat Tugas No: 400/SOS-PP/2005/34.



- 104 Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau.
- 105 Keputusan Rektor UNRI No: 170/J19/AK/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) pada Lembaga Peneliti UNRI periode 2004-2008.
- 106 Keputusan Kepala P3W UNRI No: 01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI.
- 107 Keputusan Ketua P3W UNRI No: 014/P3 W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 108 Keputusan Ketua P3W UNRI No: 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 109 Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor.....tanggal 2006 tentang pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia (trafficking) perempuan dan anak (tulisan tangan).
- 110 Kliping Koran Riau Pos tentang adanya kasus Traficiking.
- 111 Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor: — tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking ) Perempuan dan anak.
- 112 Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : ---- tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Tafficking) Perempuan dan anak.
- 113 Instrumen dan Daftar Wawancara Pengumpulan Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking Propensi Riau .
- 114 Surat Tugas No.13/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.(asli).
- 115 Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006. (copy).
- 116 Surat Tugas No,12/P3 W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006.(copy).
- 117 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Tentang Susunan Tim PekerjaanPengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006. (copy).
- 118 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Tentang Susunan Tim

Hal. 233 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006. (copy).

119 Lampiran Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006.

120 Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006. (copy).

121 Surat Nomor : 20/P3W-UNRI/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Permohonan Pencairan bona. (asli).

122 Surat No : W4.Dh.Um.01.10-399 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penjelasan Data Perkara Pidana Perdagangan Perempuan & Anak. (copy).

123 Surat No : B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Data Perdagangan Manusia, Pornoaksi/ Pornografi dan PJTKI. (copy).

124 Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata Rias Pengantin Kab. Indragiri Hilir Tahun 2006. (copy)

125 Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Khusus Pajak Hotel dan Restoran untuk Bulan Juni 2006.

126 Proposal Studi Banding dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Propinsi Riau.

127 Pokok-pokok Pikiran perlunya Kebijakan Daerah Menyikapi Fenomena Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak Untuk Propinsi Riau.

128 Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di Propinsi Riau Tahun 2006 oleh P3W Universitas Riau.

129 Jual Beli Perempuan dan Anak (Trafficking) di Propinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) universitas Riau tanggal 4 Oktober 2006.

130 Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 170/J-19/AK/ 2004 Tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004. (copy).

131 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 01/P3W-UNRI/5K/I/2005 Tentang Susunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005. (copy).

- 132 Informasi Data Dan Atau Data Yang Akan Dicari.
- 133 Surat Perintah Perjalanan Dinas. (copy)
- 134 Jadwal kegiatan presentase pengkajian dan penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau (copy).
- 135 Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking Provinsi Riau. (copy).
- 136 Undangan Nomor : 186/Und/BKOW7II/2006 dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita.
- 137 Proposal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Propinsi Riau. (asli).
- 138 Catatan Tulisan Tangan.
- 139 Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor :77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Periode 2006-2010.
- 140 Surat IKHSAN,SH, MH selaku Ketua Tim Peneliti No. 14/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Permohonan Informasi Data.
- 141 Surat Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 29 Mei 2006.
- 142 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor :002/BKBH-UNRI/W2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 143 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 003/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 144 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 004/BKBH-UNRI/W2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Hal. 235 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 145 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 005/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Ahli Analisa Data Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 146 Surat Ketua BKBH Nomor : 012/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, Perihal Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan dan Bantuan Pencairan Dana Kajian.
- 147 Surat Adendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/20006/890 tanggal 29 Mei 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan dan Pengkajian Dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 148 Surat Keputusan Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Nomor : 01/BKBH/PN/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Staf Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau.
- 149 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 Uang Sejumlah Rp.395.000.000,-
- 150 Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2006.
- 151 Surat Perintah Perjalanan Dinas Tanggal 24 Agustus 2006.
- 152 Surat Tugas Nomor : 13/BKBH-UNRI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006.
- 153 Surat Daftar Pembayaran Honorarium tim Peneliti ahli pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli - September 2006, tanggal 25 Agustus 2006.
- 154 Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006
- 155 Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 156 Surat Tanda Terima tanggal 25 Oktober 2006.
- 157 Surat Ketua BKBH Nomor : 016/BKBH-UNRI/X/2006 tanggal 28 Oktober 2006, perihal Penyerahan Draft laporan Akhir Kajian.



- 158 Surat Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.
- 159 Surat Tanda Terima Titipan Uang Denda tanggal 4 Agustus 2006.
- 160 Surat tanda terima tanggal 24 Agustus 2006.
- 161 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 25 Mei 2006, Rapat Tim Persiapan Proposal.
- 162 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2006, Rapat Turun Lapangan.
- 163 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2006, Persiapan Turun Lapangan.
- 164 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan.
- 165 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan.
- 166 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 25 September 2006, Analisis Data.
- 167 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Selasa Tanggal 26 September 2006, Analisis Data.
- 168 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006, Persiapan Ekspose.
- 169 Keputusan Rektor UNRI Nomor: 170/J19/AK/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang pengangkatan Dra. Lenda Farida.M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (fotocopy).

Hal. 237 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 170 Keputusan Kepala P3W UNRI No: N- 01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI (foto copy)
- 171 Salinan Kep. Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 009/0/2003 tanggal 27 Januari 2005 tentang Statute UNRI (foto copy)
- 172 Keputusan REKTOR UNRI Nomor: 024/J19/KP/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Pusat dan Badan-badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UNRI (fotocopy).
- 173 Surat Sekda DPRD Propinsi Riau Nomor: 890/SP-UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang kerjasama (foto copy).
- 174 Surat P3W Nomor: 39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 perihal kerjasama pengkajian Ranperda Trafficking (foto copy).
- 175 Proposal pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking Propinsi Riau (foto copy)
- 176 Note Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan P3W UNRI tanggal 15 Juni 2007 (foto copy)
- 177 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (foto copy)
- 178 Surat P3W Nomor: 43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Mohon Bantuan Pencairan Dana Penelitian dan Addendum Waktu (asli)
- 179 Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking No: 43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 (asli).
- 180 Tanda terima draf Laporan Akhir Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 24 Oktober 2006 (asli)
- 181 Keputusan Ketua P3W No: 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli).
- 182 Keputusan Ketua P3W No: 015/P3W-UNRI/5K/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranperda tentang Trafficking beserta lampiran susunan Tim Enoumerator (asli).
- 183 Tanda terima SPPD Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 dari Dra. Hj. Lena Farida.,M. Si oleh Zulfikar tanggal 20 Desember 2006 (foto copy)
- 184 Tanda terima uang sebesar Rp.395.000.000,- dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau oleh Dra. Hj. Lena Farida,M.Si tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy)
- 185 Kwitansi uang sejumlah Rp. 395.000.000,- dari Sri Mekka.S oleh Dra. Hj. Lena Farida.M.Si tanggal 25 Agustus 2006 (asli)
- 186 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy)
- 187 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy)
- 188 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy)
- 189 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy)
- 190 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy)
- 191 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (foto copy)
- 192 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (foto copy)
- 193 Tanda terima uang sejumlah Rp. 59.250.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida,M.Si untuk setoran Potongan Pajak untuk Kegiatan pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking penerima Darma Evita tanggal 25 Agustus 2006 (foto copy)

Hal. 239 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194 SSP setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumenator Penelitian Ahli & Pengolah Data Kegiatan pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sebesar Rp. 59.250.000,- tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 195 Tanda terima titipan uang denda sebesar Rp. 19.750.000,- atas kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking dari Dra. Hj. Lena Farida penerima Dharma Evita tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy)
- 196 SPPD An. Drs. Kasmiruddin tanggal 19 September 2006 (asli)
- 197 SPPD An. Dra. Siti Sofro,M.Si tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 198 SPPD An. Dra. Risdianti tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 199 SPPD An. Drs. Endang Sutrisna M.Si tanggal 19 September 2006 (asli)
- 200 SPPD An. Tuti Khairani, M,Si tanggal — (asli)
- 201 SPPD An. Dra. Nurayam.MS tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 202 SPPD An. Dra. Sofia Agnes,M.Si tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 203 SPPD An. Mandataris,S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli)
- 204 SPPD An. Weldo,S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli)
- 205 SPPD An. Siti Muhairanum tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 206 SPPD An. Mira Anita tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 207 Surat Tugas Nomor: 10/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 208 Surat Tugas Nomor: 11/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 (asli)
- 209 Surat Tugas Nomor: 12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 (asli)
- 210 Surat Tugas Nomor: 14/P3 W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 211 Surat Tugas Nomor: 15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 212 Surat Tugas Nomor: 16/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 18 September 2006 (asli)
- 213 Surat Tugas Nomor: 17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (asli)
- 214 Informasi Dan Atau Data Yang Akan Dicari (foto copy)
- 215 K-I Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk TKW (Korban)
- 216 K-II Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk Traffiker (Calo, Penampung dan lain-lain)



- 217 K-III Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (Pola dan Jenis Intervensi/Layanan)
- 218 Surat P3W No: 46/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Dumai tentang Mohon Ijin Penelitian (asli)
- 219 Surat P3W No: 47/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Renaga Kerja Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 220 Surat P3W No : 48/PSW-UNRI/VIII/ 2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 221 Surat P3W No: 49/P5W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Panwisata Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 222 Surat P3W No: 50/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua tim Penggerak PKK Ketua SOW Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 223 Surat P3W No: 51/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapolres Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 224 Surat P3W No: 52/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 225 Surat P3W No: 54/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 226 Surat P3W No: 55/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada kadis Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 227 Surat P3W No: 56/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 228 Surat P3W No. 57/P5W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Pekanbaru tentang bantuan Data (asli)
- 229 Surat P3W No. 58/PSW-UNPJVIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Panggerak PKK Ketua SOW Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 230 Surat P3W No: 59/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapoltabs Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 231 Surat P3W No: 60/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 232 Surat P3W No: 75/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)

Hal. 241 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- 233 Surat P3W No: 74/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Panggerak PKK Ketua SOW Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 234 Surat P3W No: 73/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 235 Surat P3W No: 72/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kab. Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 236 Surat P3W No: 71/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 237 Surat P3W No: 70/P5W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 238 Surat P3W No: 63/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 239 Surat P3W No: 64/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 240 Surat P3W No: 65/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 241 Surat P3W No: 66/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 242 Surat P3W No: 67/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOA Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 243 Surat P3W No: 68/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli).

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa IKHSAN, SH., MH.

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 K/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 146/PID/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1084/Pid.B/2007/PN.PBR tanggal 26 Nopember 2008;

**MENGADILI SENDIRI**

242



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ruskin Har, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut”;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebedar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.539.255.988,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Daftar Gaji an. TUTI KHAIRANI HARAHAHAP,S.Sos
  - 2 Daftar Gaji an. Drs. KASMIRUDIN.Msi.
  - 3 Daftar Gaji an. Drs. ENDANG SUTRISNA
  - 4 Daftar Gaji an. TENGKU JUHARMIN.
  - 5 Daftar Gaji an. HTRF SIMANJUNTAK, M.Si
  - 6 Daftar Gaji an. SOFIA ACHNES, M.Si.
  - 7 Daftar Gaji an. Rd. SITI SOFRO.
  - 8 Daftar Gaji an. Drs. ISRIL.MH
  - 9 Daftar Gaji an. RIADAYATI.
  - 10 Daftar Gaji an. AHMAD RIFAI, SP, MP
  - 11 Daftar Gaji an. DODI HARYONO, SHI.SH.MH
  - 12 Daftar Gaji an. EMILDA FIEDAUS, SH.
  - 13 Daftar Gaji an. IKHSAN, SH.MH
  - 14 Daftar Gaji an. MEYZI HERIYANTO, S.Sos. M.Si.
  - 15 Daftar Gaji an. Dra. LENA FARIDA, M.Si.

Hal. 243 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Daftar Gaji an. INDRA SAFRI, S.Sos, M.Si.
- 17 Ijazah Magister Sains an. INDRA SAFRI
- 18 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial an. INDRA SAFRI.
- 19 Ijazah Sarjana Hukum an. T. JUHARMIN
- 20 Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa an. T. JUHARMIN.
- 21 Ijazah Strata Satu jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah an. DODY HARYONO
- 22 Ijazah Sarjana Hukum an. DODI HARYONO.
- 23 Ijazah Magister Hukum an. DODI HARYONO.
- 24 Ijazah Magister Sains an. ENDANG SUTRISNA.
- 25 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial Politik an. ENDANG SUTRISNA.
- 26 Ijazah Sarjana Pertanian an. AHMAD RIFAI.
- 27 Ijazah Magister Pertanian an. AHMAD RIFAI.
- 28 Ijazah Magister Hukum an. ISRIL
- 29 Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan.
- 30 Ijazah Magister Sains an. MEYZI HERIYANTO.
- 31 Postgraduate Program an. MEYZI HERIYANTO.
- 32 Ijazah Magister Sains an. Rd. SITI SOFRO.
- 33 Transkrip Akademik an. Rd. SITI SOFRO.
- 34 Curriculum Vitae an. Rd. SITI SOFRO.
- 35 Ijazah Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu politik an. SAIMAN.
- 36 Ijazah Magister Sains an. SAIMAN.
- 37 Ijazah Sarjana Hukum an. EMILDA FIRDAUS.
- 38 Ijazah Magister Hukum an. EMILDA FIRDAUS.
- 39 Daftar Pembayaran Transportasi Tim Pengembangan Perencanaan FISIP UNRI, Dana Bersumber dan Program Non Reguler FISIP UNRI untuk bulan Juni 2007.
- 40 Tanda terima penyerahan 1 (satu) bundel Draf Laporan Akhir tanggal 25 Oktober 2006.
- 41 Surat Nomor : 005/PR/X/2006/927 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Penjelasan mengenai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif Dewan.
- 42 Surat Nomor : 56/PSPB-UNRI/XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 perihal Ijin Pengumpulan Data
- 43 Surat Tugas Nomor : 032/PKOP-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau.
- 45 Arus Kegiatan Sistem Swakelola.
- 46 1 (satu) lembar buku Bank tanggal 16 Agustus 2006 (legalisir).
- 47 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.574.1/XI/2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Propinsi Riau TA. 2006 tanggal 30 Nopember 2006 (legalisir).
- 48 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita, S. Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 49 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka penyusunan awal/revisi Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 34.250.000,- (legalisir)
- 50 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 7.000.000,-(legalisir)
- 51 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 52 4 (empat) lembar SPPD atas nama Drs. Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 53 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 7.000.000,-(legalisir)
- 54 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 55 3 (tiga) lembar SPPD atas nama Zuhanda Agus,SH,MH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 56 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,-(legalisir)
- 57 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 58 2 (dua) lembar SPPD atas nama Darma Evita,S,Sos tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 59 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).

Hal. 245 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,- (legalisir)
- 61 Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006, 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 62 4 (empat) lembar SPPD atas nama Hendri HK,SH tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 63 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 sejumlah Rp. 6.750.000,-(legalisir)
- 64 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006 (legalisir).
- 65 4 (empat) lembar SPPD atas nama M. Erlan. SE tanggal 7 Juni 2006 (legalisir)
- 66 Perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2 01 04 2 03 01 01 1 10 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 34.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir)
- 67 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.5.180.000,- tanggal 28 Juni 2006 (legalisir).
- 68 6 (enam) lembar Purchase Order bulan Juni 2006 .
- 69 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 05 01 1 25 untuk biaya makan dan minum Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 5.180.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir)
- 70 1 (satu) lembar SSP sejumlah Rp. 62.320,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 71 1 lembar SSP sejumlah Rp. 415.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 72 1 lembar SSP sejumlah Rp. 34.090,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 73 1 lembar SSP sejumlah Rp. 227.275,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 74 1 lembar SSP sejumlah Rp. 163.640,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 75 1 lembar SSP sejumlah Rp. 24.545,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 76 1 lembar SSP sejumlah Rp. 50.455,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 77 1 lembar SSP sejumlah Rp. 336.365,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 1 lembar SSP sejumlah Rp. 77.700,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 79 1 lembar SSP sejumlah Rp. 59.250.000,- tanggal 27 Juli 2006 (legalisir).
- 80 1 lembar Tanda Terima dari Darma Evita,S,Sos yaitu pengembalian kelebihan setoran potongan Pajak Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 5.358.155,- tahun 2006 (legalisir).
- 81 1 lembar Kwitansi pembayaran biaya photo copy pengadaan dan kuesioner kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 4.570.000,- (legalisir).
- 82 1 lembar bon foto copy sejumlah Rp 4.570.000,- (legalisir).
- 83 1 (satu) lembar PerincianPenerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening 2 01 04 2 02 03 02 1 24 untuk biaya foto copy kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 4.570.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 84 1 (satu) lembar kegiatan pembahasan Ranperda tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 493.246.000,- (legalisir).
- 85 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas tanggal 6 Februari 2006 sejumlah Rp. 9.996.000,-(legalisir).
- 86 13 (tiga belas) lembar Daftar Hadir Lembur Tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 (legalisir).
- 87 1 (satu lembar) Nota Dinas dan Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 6 Pebruari 2006 (legalisir)
- 88 1 (satu lembar) Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (legalisirs).
- 89 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per kode rekening : 2 01 04 2 01 02 02 1 24 untuk uang harian pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp 9.996.000,- tanggal 31 Agustus 2006 (legalisir).

Hal. 247 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 90 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir)
- 91 1 (satu) lembar bon pengadaan alat tulis kantor sejumlah Rp.3.700.000,- (legalisir).
- 92 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 01 05 1 11 untuk pesanan alat tulis kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 3.700.000,-tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 93 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai (biaya enoumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.395.000.000,- (legalisir)
- 94 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 01 1 08 untuk jasa tenaga kerja non pegawai (biaya enoumerator, peneliti ahli, biaya pengolah data) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 395.000.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 95 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- (legalisir).
- 96 1 (satu) lembar Bon pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,- (legalisir).
- 97 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 03 1 09 untuk pembayaran pembelian Film dan cuci cetak film Rp.1.800.000,-kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 98 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 14 Juni 2006 (legalisir).
- 99 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 02 02 1 09 untuk biaya akomodasi dan transportasi enoumerator kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.36.250.000,- tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).



- 100 1 (satu lembar) Kwitansi pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp. 2.500.000,-(legalisir).
- 101 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening : 2 01 04 2 02 03 01 1 09 untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi sejumlah Rp.2.500.000 tanggal 30 Juni 2006 (legalisir).
- 102 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pimpinan DPRD Propinsi Riau tanggal 4 Oktober 2006 (asli).
- 103 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Oktober 2006 (asli).
- 104 1 (satu) bundel Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Oktober 2006 (asli).
- 105 1 (satu) bundel Notulen Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 24 Desember 2006 (copy).
- 106 1 (satu) lembar Nota Dinas dari ketua DPRD Propinsi Riau 29 Nopember 2006 perihal Pemberhentian Tenaga Ahli Komisi A DPRD Propinsi Riau (copy)
- 107 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil I Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (asli).
- 108 1 (satu) lembar Nota Dinas dan Ketua DPRD Propinsi Riau tanggal 22 Januari 2007 perihal Presentasi Hasil Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran Jadwal Kegiatan Presentasi Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau (asli).
- 109 Hasil koreksi pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan oleh Sekretaris DPRD Propinsi Riau (asli).
- 110 Hasil koreksi pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking oleh Sekretaris DPRD Propinsi Riau (asli).
- 111 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPT5.368/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000. (copy)
- 113 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.A Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. (copy)
- 114 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.179/V/2001 tanggal 30 Mei 2001. (copy)
- 115 Naskah Pelantikan tanggal 1 Juni 2001. (copy)
- 116 Salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (copy)
- 117 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288.a/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006. (copy)
- 118 Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 22 Agustus 2000. (copy)
- 119 Naskah Pelantikan. (copy)
- 120 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/KP-II/2000/13 tanggal 23 Agustus 2000. (copy)
- 121 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879/SPP-II/2004/01 tanggal 18 Mei 2004. (copy)
- 122 Salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. (copy)
- 123 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.331/V/2004 tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 124 Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.226/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil An. Drs. RUSKIN HAR. (copy)
- 125 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001. (copy)
- 126 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/K Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001. (copy)
- 127 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999. (copy)
- 129 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.423.4-1296 tanggal 27 Maret 1995 (copy)
- 130 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.423.4-1296 tanggal 27 Maret 1995. (copy)
- 131 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 132 Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 133 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up. 221/37/76 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 134 Daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1976 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 135 Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999. (copy)
- 136 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.312/VI/1999 tanggal 29 Juni 1999. (copy)
- 137 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.433-2239 tanggal 22 September 1979. (copy)
- 138 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.433-2239 tanggal 22 September 1979. (copy)
- 139 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.4-4959.- tanggal 31 Desember 1982. (copy)
- 140 Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.4-4959 tanggal 31 Desember 1982. (copy)
- 141 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3-178 tanggal 16 Januari 1986. (copy)
- 142 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3-178 tanggal 16 Januari 1986.(copy)
- 143 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988. (copy)
- 144 Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.423.3.635 tanggal 12 April 1988. (copy)

Hal. 251 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 146 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.11/37/1978 tanggal 30 Januari 1978. (copy)
- 147 Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 148 Daftar lampiran Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Up.221/37/1978 tanggal 31 Desember 1976. (copy)
- 149 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619716 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) (asli).
- 150 1 (satu) lembar CEK No. ZT 615830 tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) (asli)..
- 151 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619717 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) (asli)..
- 152 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619715 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 153 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619718 tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 154 1 (satu) lembar CEK No. ZT 619719 tanggal ....Agustus 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (asli)
- 155 Tanda terima tanggal 24 Oktober 2006 antara Ikhsan,SH,MH dengan Drs. H.AA Nazief Soesilo Dharma (asli)
- 156 Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator sejumlah Rp.395.000.000,- tanggal 23 Agustus 2006 (asli)
- 157 Surat Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Nomor: 036.PKOP-UNRI.X.2006 tanggal 24 Oktober 2006 hal Penyerahan Draf Laporan Akhir Kajian (asli).
- 158 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 14 Oktober 2006 (asli).
- 159 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumeraor Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 26 Agustus 2006 (asli).
- 160 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 26 Agustus 2006 (asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161 Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI Nomor: 065/PKOP-UNRI/V/2006 Tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 24 Mei 2006 (asli).
- 162 Surat Keputusan Ketua PKOP UNRI Nomor: 066/PKOP-UNRI/V/2006 Tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang TAHURA tanggal 24 Mei 2006 (asli).
- 163 Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis Nomor: 056/PSPB-UNRI / VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli).
- 164 Surat Pusat Studi Pengembangan Bisnis Nomor: 057/PSPB-UNRI/ VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 hal Izin Pengumpulan Data (asli).
- 165 Surat No : 9U/KEU/2006-06/212 tanggal 15 Juni 2006 perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Propinsi Riau. (asli)
- 166 Surat No : 911/KEU/2006-03/210 tanggal 17 Maret perihal Penerbitan SKO Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat DPRD Propinsi Riau. (asli)
- 167 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 0028/SKO/BL/II/2006 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006. (copy)
- 168 Keputusan Gubernur Riau Nomor : 0029/SKO/BL/II/2006 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006.(copy)
- 169 Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.239/V/2006 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengganti Yang diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 24 Mei 2006.(copy)
- 170 Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Riau tanggal 21 Mei 2004.(copy)
- 171 Peraturan Gubernur Riau Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2006.(copy)
- 172 Pemerintah Provinsi Riau Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau.(copy)
- 173 Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 000443 / BTL /- BP / PK / 2006 tanggal 25 April 2006.

Hal. 253 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 0442/DP/2006 tanggal 25 April 2006. (copy).
- 175 Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor : 06/SPP/IV/BAU/BK/2006 tanggal 19 April 2006 (copy)
- 176 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tanggal 19 April 2006. (copy)
- 177 Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006. (copy)
- 178 Surat Perimintaan Pembayaran Pengisian Kas Tanggal 19 April 2006. (copy)
- 179 Daftar rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 19 April 2006. (copy)
- 180 Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.333/V/2004 tentang Penetapan pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II b Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 181 Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.333/V/2004 tanggal 15 Mei 2004. (copy)
- 182 Realisasi Dana Panleg Sekretariat DPRD Prov. Riau Tahun Anggaran 2006.(copy)
- 183 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang trafficking Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 184 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking, (copy)
- 185 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 186 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan Pornoaksi Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 187 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 6.754.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan pornoaksi. (copy)
- 188 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 6.754.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 190 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Tenaga Kerja. (copy)
- 191 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 192 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 193 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- 194 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 195 Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 196 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- 197 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- 198 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang RPJP Tahun Anggaran 2006. (copy)
- 199 Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 105.000.000,- keperluan untuk Setoran Sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang RPJP. (copy).
- 200 Formulir Penyetoran Bank Riau senilai Rp. 105.000.000,- oleh Darma Evita tanggal 15 Januari 2007. (copy)
- 201 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juni 2006 tanggal 10 Juli 2006. (asli)
- 202 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juli 2006 tanggal 10 Agustus 2006. (asli)

Hal. 255 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Agustus 2006 tanggal 11 September 2006. (asli)
- 204 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan September 2006 tanggal 10 Oktober 2006. (asli)
- 205 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Oktober 2006 tanggal 07 November 2006. (asli)
- 206 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan November 2006 tanggal 10 Desember 2006. (asli)
- 207 Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Desember 2006 tanggal 10 Januari 2007. (asli)
- 208 Surat Nomor : 900/KEU/07.01 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penyampaian Dokumen Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Atas Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006. (asli)
- 209 Surat Nomor : 900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 210 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/98.32 tanggal 11 Desember 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 211 Surat Nomor : 900/KEU/88.27 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 212 Surat Nomor : 900/KEU/13.25 tanggal 11 September 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 213 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/13.25. (asli)
- 214 Surat Nomor : 900/KEU/48.22 tanggal 10 Agustus 2006 tentang Peringatan Kedua atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 215 Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 900/KEU/98.32 tanggal 10 Agustus 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 216 Surat Nomor : 900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 tentang Peringatan atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)



- 217 Tanda Terima Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Riau No. 900/KEU/01.13 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 218 Surat Nomor : 900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian Surat pertanggungjawaban. (asli)
- 219 Tanda Terima Surat Asisten Bidang Umum Administrasi Umum Provinsi Riau No. 900/KEU/22.17 tanggal 10 Juli 2006 Perihal Peringatan Pertama atas Keterlambatan Penyampaian SPJ. (asli)
- 220 Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001969/BI-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006.(copy)
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
  - 1 (satu) bundle daftar pengantar surat perintah membayar tanggal 16 Agustus 2006 (copy)
  - Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No Rt. tanggal 16 Agustus 2006. (copy)
  - Surat Pernyataan KM. NAZIEF SOESILA DHARMA. (copy)
  - Surat Pernyataan. (copy)
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00208/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
  - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy)
  - Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (copy)
  - Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
  - Keputusan Rektor UNRI Nomor : 170 / J19 / AK/ 2004 tanggal 29 November 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008.(copy)
  - Surat Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)

Hal. 257 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Lampiran Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006. (copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang trafficking tanggal 25 Agustus 2006. (copy)
- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Juni 2006. (copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006. (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006. (copy)

221) Pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja terdiri dari :

- Surat perintah membayar Nomor : SPM : 001925/BI-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 (copy)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy)
- 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
- Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- Surat Pernyataan.(copy)
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01056/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 34/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.(copy)
- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembangan Bisnis tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.(copy)
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama. (copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenga Kerja.(copy)
- Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)

Hal. 259 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI Nomor : 028J19.1.13.Kp/2002 tanggal 2 September 2002 tentang pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik.(copy)
- Surat Nomor : 026/PSPB-UNRI/IV/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penawaran Harga. (copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenga Kerja.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 12 Januari 2006.(copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegitan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 08 Oktober 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Tenaga Kerja bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.(copy)

222) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP antara lain:

- a Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0019201-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
- b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 8 Agustus 2006. (copy)
- d Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
- e Surat Pernyataan.(copy)
- f Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01057/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
- g Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP.(copy)
- h Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP.(copy)
- i Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP. (copy)
- j Surat Nomor : 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 perihal Penawaran Harga.(copy)
- k Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
- l Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI Nomor : 1500/J19.1.13/PG/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI. (copy)
- m Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- n Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
- o Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang RPJP. (copy)
- p Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 10 November 2006.(copy)

Hal. 261 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q Daftar Pembayaran Honorarium Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.(copy)
  - r Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.(copy)
  - s Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang RPJP tanggal 10 Oktober 2006.(copy)
  - t Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang RPJP tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
  - u Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)
- 223) Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001912/BI-BA/ PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 (copy)
  - 1 (satu) bundel daftar pengantar surat perintah membayar tanggal 8 agustus 2006 (copy).
  - Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
  - Surat Pernyataan.(copy)
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01068/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
  - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/ V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)
  - Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)

- Keputusan Rektor UNRI Nomor : 77/J197AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)
- Surat Nomor : 011/BKBH-UNRI/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 perihal Penawaran Harga.(copy)
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) UNRI Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 12 Januari 2007. (copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006.(copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 23 Agustus 2006. (copy)
- Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.(copy)

Hal. 263 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Juni 2006. (copy)
  - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Traffcking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006.(copy)
  - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006. (copy)
  - Daftar pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006. (copy)
  - Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan tidak efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 25 Agustus 2006 (copy).
- 224) Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim antara lain :
- Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 001915/BI-BA/ PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006.(copy)
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
  - 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2006. (copy)
  - Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 8 Agustus 2006.(copy)
  - Surat Pernyataan.(copy)
  - Keputusan Gubernur Riau Nomor : 01067/SKO/BL/II/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.(copy)
  - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 35/5PPP/UM/ VI/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan



Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)

- Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)
- Surat Nomor : 890/SP/UM/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- Surat Nomor : 021/PKOP-UNRI/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Penawaran Harga.(copy)
- Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)
- Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim.(copy)
- Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI.(copy)
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)
- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan November 2006 tanggal 30 November 2006.(copy)
- Surat Tanda Setoran senilai Rp. 105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. (copy)
- Formulir Penyetoran senilai Rp. 105.000.000,- tanggal 18 Januari 2007. (copy)
- Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim

Hal. 265 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 26 Agustus 2006.  
(copy)

- Daftar Pembayaran Honorarium Tim analisa data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 14 Oktober 2006 (copy)
- Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Juli sampai dengan September tanggal 26 Agustus 2006 (copy)

1. Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi terdiri dari :

- a Surat Perintah Membayar Nomor 5PM : 000799/BI-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006.(copy)
- b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002.(copy)
- c 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Perintah Membayar tanggal 16 Mei 2006. (copy)
- d Daftar Perincian Rencana Pembangunan BT/PK Lampiran pada SPP No.R. tanggal 16 Mei 2006.(copy)
- e Surat Pernyataan.(copy)
- f Keputusan Gubernur Riau Nomor : 00209/SKO/BL/II/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (copy)
- g Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 16/SPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- h Nota Kesepahaman Antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- i Surat Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 perihal Penawaran Harga.(copy)
- j Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Surat Keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 148/J19.1.13/KP/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI. (copy)
- l Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.(copy)
- m Surat Nomor : 890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Kerjasama.(copy)
- n Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- o Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekda Propinsi Riau kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 11 April 2006. (copy)
- p Owner Estimate tanggal 11 April 2006.(copy)
- q Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- r Kwitansi sejumlah Rp. 3.700.000,- untuk Pembayaran Biaya pengadaan alat tulis Kantor kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 23 Agustus 2006.(copy)
- s Faktur CV. Winta Karya tanggal....Juni 2006 senilai Rp.3.700.000,-.(copy)
- t Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- u Daftar Pembayaran Uang Lembur Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau.(copy)
- v Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 11 Februari 2006.(copy)
- w Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 18 Februari 2006.(copy)
- x Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syanf Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Februan 2006.(copy)

Hal. 267 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 25 Februari 2006.(copy)
- 2 Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 26 Februari 2006.(copy)
- aa Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 4 Maret 2006.(copy)
- bb Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 5 Maret 2006.(copy)
- cc Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 11 Maret 2006.(copy)
- dd Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 12 Maret 2006.(copy)
- ee Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 18 Maret 2006.(copy)
- ff Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 19 Maret 2006.(copy)
- gg Daftar hadir Lembur tim Pengkajian dan Penelaahan Draf Awal Pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 25 Maret 2006.(copy)
- hh Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 6 Februari 2006. (copy)
- ii Daftar nama pelaksana lembur kerja Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- jj Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Agustus 2006 tanggal 31 Agustus 2006.(copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk Surat Tanda Setoran tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp.6.754.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP kegiatan pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi. (copy)
- ll Formulir Penyetoran senilai Rp. 6.754.000,- tanggal 15 Januari 2007.(copy)
- mm Kwitansi sejumlah Rp. 395.000.000,- untuk Pembayaran Biaya Enoumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal ...Juni 2006. (copy)
- nn Surat Keputusan Ketua Pusat kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) UNRI Nomor : 054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.(copy)
- oo Daftar Honor Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2005.(copy)
- pp Daftar Honor Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005.(copy)
- qq Daftar Honor Tim Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005.(copy)
- rr Daftar Honor Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juli 2005.(copy)
- ss Kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- Juni 2005.(copy)
- tt Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- uu Daftar Honor Tim Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2005.(copy)
- vv Kwitansi senilai Rp. 5.180.000,- untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- wwPerincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)
- xx 1 (satu) bundel Purchase Order tanggal.... Juni 2006. (copy)
- yy Kwitansi senilai Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak laporan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi
- zz Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)

Hal. 269 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aaa Kwitansi senilai Rp. 1.800.000,- untuk pembayaran biaya pembelian film dan cetak film dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi

bbb Faktur Koperma Foto tanggal .... Juni 2006.(copy)

ccc Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)

ddd Kwitansi senilai Rp. 36.250.000,- untuk pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi

eee Daftar Biaya Akomodasi pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005.(copy)

fff Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005. (copy)

ggg Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal... Mei 2005. (copy)

hhh Daftar Biaya Transportasi Enoumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal .... Mei 2005. (copy)

iii Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)

jjj Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Emilda Firdaus tanggal ... Juni 2006. (copy)

kkk Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Nurahim Rasudin tanggal ... Juni 2006. (copy)

lll Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Saiman, Sip,MSi tanggal ... Juni 2006. (copy)

mmm Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Ikhsan, SH. MH tanggal ... Juni 2006. (copy)

nnn Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Dodi Haryono. SHL., SH., MH tanggal ... Juni 2006. (copy)

ooo Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Meyzi Heriyanto tanggal ... Juni 2006. (copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ppp Tanda Terima Rp. 7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- qqq Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006  
(copy)
- rrr Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Drs.Eddie Yusri tanggal 7 Juni 2007.  
(copy)
- sss Tanda terima Rp. 7.000.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006 (copy)
- ttt Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006 (copy)
- uuu Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Zuhanda Agus.SH., MH tanggal 7 Juni 2007.(copy)
- vvv Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- www Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- xxx Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Darma Evita tanggal 7 Juni 2007.  
(copy)
- yyy Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- zzz Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.(copy)
- aaaa Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Hendri HK, SH tanggal 7 Juni 2007.(copy)
- bbbb Tanda Terima Rp. 6.750.000,- sebagai pembayaran Biaya perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- cccc Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1938/2006 tanggal 7 Juni 2006.  
(copy)
- dddd Surat Perintah Perjalanan Dinas An. M. Erlan, SH tanggal 7 Juni 2007.  
(copy)
- eeee Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per KD Rekening bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.(copy)

Hal. 271 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Meyzi Heriyanto, S.Sos, Msi tanggal 23 April 2007
- 3 1 (satu) lembar SPAA: 001969/BL-BA/PK/2006 tanggal 22 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 (asli).
- 4 1 (satu) lembar SPM: 001920/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang RPJP bulan Agustus 2006 (asli).
- 5 1 (satu) lembar SPM: 001912/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Perda yang Ada Dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Agustus 2006 (asli).
- 6 1 (satu) lembar SPM: 001925/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Tentang Tenaga Kerja bulan Agustus 2006 (asli).
- 7 1 (satu) lembar SPM: 001915/BL-BA/PK/2006 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim bulan Agustus 2006 (asli).
- 8 1 (satu) lembar SPM: 00799/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 untuk pengisian Kas BOP Aparatur pada Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi untuk bulan Juni 2006 (asli).
- 9 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: JD1068/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 10 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01067/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 11 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01061/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 12 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01056/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 01057/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli).
- 14 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00209/5KO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli)
- 15 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00208/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli)
- 16 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU741 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No.Rekening : 01.02.OO3393.9 beserta lampiran (asli).
- 17 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja (asli).
- 18 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-41 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 19 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/40 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 20 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP (asli).
- 21 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-40 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 22 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/39 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 23 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan (asli).

Hal. 273 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-39 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 25 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-08/KEU/38 tanggal 8 Agustus 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No.Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 26 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 8 Agustus 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim (asli).
- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-08/KEU-38 tanggal 8 Agustus 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 28 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 911/2006-04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 29 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi (asli).
- 30 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-04/KEU-18 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).
- 31 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No: 00209/SKO/BL/II/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (Foto Copy).
- 32 2 (dua) LEMBAR PENGESAHAN PK YANG TERPAKAI BULAN MARET 2006 OLEH SRI MEKKA, S tanggal 31 Maret 2006 (asli)
- 33 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 atas nama pemegang Kas DPRD Propinsi Riau No. Rekening : 01.02.003393.9 beserta lampiran (asli).
- 34 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK lampiran pada SPP No. R tanggal 24 April 2006 untuk Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli).
- 35 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sehubungan SPP No: 911/2006-04/KEU-17 tanggal 24 April 2006 antara SRI MEKKA.S dengan Ruskin Har Sekretaris DPRD Propinsi Riau selaku Pengguna Anggaran (asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Riau No : 00208/SKO/BL/II//2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (foto Copy).
- 37 2 (dua) lembar Pengesahan PK Yang Terpakai bulan Maret 2006 oleh SRI MEKKA.S tanggal 31 Maret 2006 (asli).
- 38 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.9.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 32/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli).
- 39 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Perda Yang tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Ranperda tentang RPJP sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 33/SPPP/UM/V/2006/ 890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 40 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli).
- 41 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 42 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.19.750.000,- tanggal 29 Desember 2006 untuk keperluan denda atas pekerjaan Penelitian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli).
- 43 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.6.750.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 18 Januari 2007 (asli).

Hal. 275 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 45 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang RPJP tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 46 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 18 Januari 2007 (asli).
- 47 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan Dan Kemasyarakatan tanggal 18 Januari 2007 (asli)
- 48 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp.105.000.000,- untuk keperluan Setoran sisa UUDP Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 18 Januari 2007 (asli)
- 49 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya enoumerator , Penelitian ahli dan pengolah data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 33/SPPP/UM/V72006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli)
- 50 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 12 Desember 2006 (asli).
- 51 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 34/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 23 Mei 2006 (asli).
- 52 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan tanggal 11 Desember 2006 (asli).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/V/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 (asli).
- 54 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 55 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 32/SPPP/UM/VV2006/890 tanggal 17 April 2006 (asli).
- 56 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 57 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 (asli).
- 58 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumerator, Penelitian Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 22 Desember 2006 (foto copy).
- 59 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 60 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (Biaya Enoumerator, Peneliti Ahli, biaya Pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 61 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Akomodasi dan transportasi Enoumerator dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).

Hal. 277 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (Biaya Enumerator, Peneliti Ahli, biaya Pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 63 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian Film dan cuci cetak Film tanggal 14 Juni 2006. (asli)
- 64 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya cetak laporan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 14 Juni 2006 (asli).
- 65 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya photo copy , penggandaan dan kuesioner kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 66 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi tanggal 14 Juni 2006. (asli).
- 67 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Cafe (biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 68 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya photocopy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 415.455,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 69 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya photocopy/penggandaan Kuesioner Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 62.320,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 70 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 21 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 227.275,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 71 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Press (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 34.090,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).



- 72 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangkaian mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 24.545,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 73 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangkaian mendukung Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksii sebesar 163.640,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 74 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran Pungutan PPn dari CV. Wintra Karya (biaya pesana ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Graft dan Porno Aksi) sebesar 336.365,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 75 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keperluan Setoran pungutan PPh 22 dari CV. Wintra Karya (biaya pesana ATK untuk keperluan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Porno Grafi dan Porno Aksi) sebesar 50.455,- tanggal 27 Juli 2006. (asli).
- 76 2 (dua) bundel Buku Kas Umum bulan Januari sampai dengan Desember 2006. (asli)
- 77 2 (dua) lembar buku Bank (asli)
- 78 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro (foto copy legalisir)
- 79 1 (satu) lembar Memo dari Drs. Ruski Har kepada Sdr. Zuhanda dan Sri Mekka, S, SH, MSi perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan 4 (empat) kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Propinsi Riau (asli);
- 80 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No: 009/O/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003.
- 81 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No: 167/J19/KS/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenakerjaan UNRI dengan Pihak Luar.
- 82 1 ( satu ) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006.
- 83 Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Provinsi Riau.
- 84 1 (satu) eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 32/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 17 April 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan DODY HARYONO, SHI,

Hal. 279 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- SH., MH selaku Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Riau, tentang kegiatan/pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang;
- 85 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 34/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 23 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan MEYZI HERIYANTO, S.Sos, Msi selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Ketenagakerjaan.
- 86 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan EMILDA FIRDAUS, SH. MH. selaku Ketua Badan Konsultasi Hukum Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 87 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 35/SPPP/UM/V/2006/890, tanggal 29 Mei 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan IKHSAN, SH. MH. selaku Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Ilmu Politik Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasyim.
- 88 1 (satu) Eksemplar dokumen asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 53/SPPP/UM/VI/2006/890, tanggal 16 Juni 2006 antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, Msi. selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau. Tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 89 1 (satu) Eksemplar dokumen foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. antara H. RUSKIN HAR selaku Sekretaris DPRD Provinsi Riau dengan Dra. Hj. LENA FARIDA, Msi. selaku Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau. Tentang Kegiatan/pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Porno Grafi dan Porno Aksi.
- 90 Kegiatan / Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI22006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya Enoumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI22006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar daftar Pembayaran honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja Bulan Juni sampai dengan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 8 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.
- 1 (satu) bundle surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 34 / SPPP/UM/V/2006/890 tentang kegiatan pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 mei 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Studi Pengembang Bisnis UNRI tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar surat Ketua Pusat Studi Pengembangan Bisnis UNRI Nomor: 026/PSPB-UNRI/V/2006 perihal Penawaran harga tanggal 19 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.
- 1 (satu) bundel proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja tahun 2006.

Hal. 281 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No: 028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002.
- 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNRI No: 028/J19.1.13.KP/2002 tentang Pembentukan Pusat-pusat Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik tanggal 2 September 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RI cq. Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan No: PEM-049/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Propinsi Riau Nomor: 890/SP/UM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penawaran Kerjasama.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Kerjasama Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Tenaga Kerja.

### 91 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif:

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 33/5PPP/UM/VI?2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran biaya Enumerator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang Tidak Efektif Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 33/5PPP/UM/VI?2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No: 008/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik UNRI No: 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.

- 1 (satu) lembar surat Nomor : 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 33/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 29 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI No: 011/BKBH-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 25 Mei 2006.

Hal. 283 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 1 (satu) lembar Keputusan Rektor UNRI No: 77/J19/AK/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI Periode 2006-2010 tanggal 11 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretariat DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 tentang Penawaran Kerjasama tanggal 24 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau.

92 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 32/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Enumerator, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan /pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 32/5PPP/UM/VT/2006/890 tanggal 17 April 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 24 Agustus 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 10 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 32/SPPP/UM/V/2006/890 tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 17 April 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tentang Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tanggal 23 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar surat Fakultas Hukum UNRI No: 009/PKHKP-UNRI/V/2006 tentang Penawaran Harga tanggal 20 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang kencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2006.
- 1 (satu) bundel surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNRI No: 1500/J19.1.13/PG/2005 tentang Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNRI tanggal 24 Nopember 2005.
- 1 (satu) lembar surat Sekwan DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 tanggal 19 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

93 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim:

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman

Hal. 285 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2006.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya enoumeretor, peneliti ahli dan pengolah data kegiatan pengkajian dan penelaahan ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 35/SPPP/UM/VT/2006/890 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enoumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006 yang ditandatangani tanggal 26 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2006.
- 1 ( satu ) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Bulan Juli sampai dengan September 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 35/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 29 Mei 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tanggal 02 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI No: 021/PKOP-UNRI/V72006 tentang Penawaran Harga tanggal 31 Mei 2006.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan UNRI.



- 1 (satu) bundel Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim tahun 2006.
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No: 148/J19.1.13/KP/2003 tentang Pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI tanggal 30 Januari 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI cq Kantor wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan
- 1 (satu) Pajak Pekanbaru Senapelan No: PEM-00048/WPJ-02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar Surat Sekwan DPRD Propinsi Riau No: 890/SP/UM/V/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 30 Mei 2006.

94 Kegiatan/pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking :

- 1 (satu) lembar Tanda Terima tentang surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 53/SPPP/UM/VT/2008/890 tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya Eunomator, Peneliti Ahli dan Pengolah Data Kegiatan tentang Trafficking sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 53/SPPP/UM/VI/2008/890 tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani tanggal 25 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.

Hal. 287 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- Daftar pembayaran honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Agustus 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan September 2006 dibayar tanggal 26 Agustus 2006.
- Daftar pembayaran honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking Bulan Juli sampai dengan September 2006 dibayar tanggal 25 September 2006.
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006.
- Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 015/P3W-UNRI/5K/VT/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking yang ditandatangani tanggal 19 Juni 2006.
- Susunan Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 53/SPPP/UM/VI/2006 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 16 Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau tentang Trafficking Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 dan Nomor : 39/PS.UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar surat dari Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) kepada sekretaris DPRD Provinsi Riau Nomor : 39/PSW-UNRI/VI/2006 tentang Kerjasama Pengkajian Ranperda Trafficking tanggal 15 Juni 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking Provinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau diajukan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2006.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 170/J19/AK/2004 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004.
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau No : 01/P3W-UNRI/SK/II/2005 tentang Susunan Kepengurusan pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005.
- 2 (dua) lembar Susunan Kepengurusan Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Riau kepada Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 890/SP/UM/VI/2006 perihal Penawaran Kerjasama tanggal 13 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda tentang Trafficking.

## 95 Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi :

- 1 (satu) lembar SPM No. 0007/BL-BA/PK/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pembahasan Ranperda Tentang Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografidan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar ) Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 Cafe (biaya makan dan minum dalm rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Pornografi dan Pornoaksi). Juli 2006
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 CV. Mitra Karya (biaya pesanan ATK untuk Keperluan

Hal. 289 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ) Juli 2006.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran PPh 21 dari Pembayaran Biaya Jasa Tenaga Kerja non Pegawai tanggal 11 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Koperma Photo (biaya cuci cetak film dalam rangka mendukung Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya cetak laporan Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPh 22 dari Azalia Pers (biaya Photocopy / pengadaan Kuessioner Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) untuk setoran pungutan PPn dari Azalia Pers (biaya Photocopy / pengadaan Kuessioner Kegiatan Pengkajian & Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi) Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 167/1988/2006 tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 167/1938/2006
- 1 (satu) lembar Tanda Terima sebagai Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPPD Sekretariat DPRD Propinsi Riau tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 7 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan pornoaksi tanggal 28 Juni 2006.
- 4 (empat) lembar Purchase Order di GKS Cafe tanggal 6 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Cafe Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Purchase Order di GKS Cafe Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Photocopy, penggandaan dan kuessioner kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Hal. 291 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk fotocopy kuessioner kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan pornoaksi.
- 1 (satu) lembar bon kontan dari Azalia Press untuk fotocopy Kuessioner juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak laporan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Bon Kontan dari Azalia Press untuk fotocopy laporan dan jilid laporan Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian film dan cuci cetak film.
- 1 (satu) lembar Faktur dari Koperma Photo untuk pembayaran pembelian Fuji Film dan Cuci cetak film Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi enoumerator dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang pornografi dan pornoaksi.
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Akomodasi Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Lokal Enoumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 2 (dua) lembar Daftar Biaya Transportasi Lokal Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Daftar Biaya Transportasi Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai (biaya enumerator, peneliti ahli, biaya pengelola data) Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Ketua Pusat Pengkajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Universitas Riau Nomor : 054/PKOP-UNRI/V/2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Enumerator Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, Mei 2006
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Mei 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Enumerator pekerjaan pengkajian dan penelaahan Ranperda pornografi dan pornoaksi juli 2006
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengolahan Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi ( 1 Paket ).
- 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim Peneliti Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi , Juli 2006

Hal. 293 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk biaya jasa Tenaga Kerja non Pegawai Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk Honorarium Tim/ Panitia Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran biaya pengadaan Alat tulis Kantor untuk keperluan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Faktur dari CV. Wintra Karya untuk membayar biaya pengadaan ATK, Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Juni 2006 untuk biaya Alat tulis Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 30 Juni 2006
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran uang lembur Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 berdasarkan Nota Dinas Tanggal 6 Februari 2006
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 19 Februari 2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 26 Februari 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 5 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari sabtu tanggal 11 Maret 2006
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 12 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Minggu tanggal 18 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar daftar hadir lembur Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Sekretariat DPRD Propinsi Riau 2006 hari Sabtu tanggal 25 Maret 2006.
- Nota Dinas dari Ketua Tim Sekretariat Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi kepada Staf Sekretariat DPRD Propinsi Riau perihal pelaksanaan Lembur tanggal 6 Februari 2006.
- Daftar Nama Pelaksana Lembur Kerja Pengkajian dan Penelaahan Draft Awal Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Hal. 295 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perincian dan Pengeluaran Per KD. Rekening Bulan Agustus 2006 untuk Uang Harian Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 31 Agustus 2006
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Nurahmin Rasudin, SH,MH, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Ikhsan, SH.MH, Juni 2006
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Dody Haryono,SHI,SH,MH, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Saiman, S.Ip.,Msi, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.si, Juni 2006.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 16/SPPP/UM/IV/2006/027 tentang Kegiatan / Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univ. Riau tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi Nomor : 890/SP/UM/IV/2006/16 'dan Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006
- 1 (satu) lembar Surat dari Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau Nomor : 018/PKOP-UNRI/IV/2006 tanggal 15 April 2006 tentang penawaran harga.
- 1 (satu) lembar lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) bundle surat keputusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor : 148/J19.13/KP/2003 tentang pembentukan Pusat Kajian Otonomisasi Dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Riau (PKOP-Fisipol UNRI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat no : PEM-00048/WPJ.02/KP.0303/2003 tanggal 21 Mei 2003.
- 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau kepada Ketua Pusat Kajian Otonomisasi dan Pembangunan (PKOP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNRI Nomor : 890/SP/UM/IV/2006 tanggal 13 April 2006 perihal Penawaran Harga.
- 1 (satu) lembar Lampiran Penawaran Harga Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Propinsi Riau kepada sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 11 April 2006 perihal Kegiatan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- 1 (satu) lembar Owner Estimate / estimasi Harga Biaya Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 11 April 2006.
- 1 (satu) bundel Proposal tentang Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi oleh Pusat kajian Otonomisasi Dan Pembangunan Universitas Riau, April 2006.

96 Surat Tugas dari Ketua P3W UNRI No: 14/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.

97 Tanda Bukti Pembayaran pelaksanaan pengambilan data/kolektor data primer dan sekunder tentang Trafficking di Kota Dumai senilai Rp.1.775.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida.M.Si tanggal 29 Agustus 2006.

98 Tanda Bukti Serah Terima Dokumen yang Menerima Dra. Hj. Lena Farida, M.Si tanggal 5 September 2006.

99 Data Kasus Trafficking In Person Polresta Dumai Tahun 2006.

100 Perda Kota Dumai No: 10 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan tanggal 28 Juni 2004.

101 Keputusan Walikota Dumai No: 472/SOS-PP/2004 tentang Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak tanggal 11 Oktober 2004.

102 Lampiran Keputusan Walikota Dumai No: 472/SOS-PP/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kota Dumai.

103 Surat Tugas No: 400/SOS-PP/2005/34.

Hal. 297 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 104 Jadwal Kegiatan Presentase Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau.
- 105 Keputusan Rektor UNRI No: 170/J19/AK/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) pada Lembaga Peneliti UNRI periode 2004-2008.
- 106 Keputusan Kepala P3W UNRI No: 01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI.
- 107 Keputusan Ketua P3W UNRI No: 014/P3 W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 108 Keputusan Ketua P3W UNRI No: 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking.
- 109 Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor.....tanggal 2006 tentang pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia (trafficking) perempuan dan anak (tulisan tangan).
- 110 Kliping Koran Riau Pos tentang adanya kasus Traficiking.
- 111 Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor: — tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking ) Perempuan dan anak.
- 112 Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : ---- tanggal 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Manusia (Tafficking) Perempuan dan anak.
- 113 Instrumen dan Daftar Wawancara Pengumpulan Data Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking Propensi Riau .
- 114 Surat Tugas No.13/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006.(asli).
- 115 Surat Tugas No.17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006. (copy).
- 116 Surat Tugas No,12/P3 W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006.(copy).
- 117 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Tentang Susunan Tim PekerjaanPengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006. (copy).
- 118 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Tentang Susunan Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006. (copy).
- 119 Lampiran Nomor : 015/P3W-UNRI/SK/VI/2006 Susunan Enoumerator Pekerjaan Pengkajian Dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking tanggal 19 Juni 2006.
- 120 Surat Tugas No.15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006. (copy).
- 121 Surat Nomor : 20/P3W-UNRI/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Permohonan Pencairan bona. (asli).
- 122 Surat No : W4.Dh.Um.01.10-399 tanggal 13 Juni 2006 perihal Penjelasan Data Perkara Pidana Perdagangan Perempuan & Anak. (copy).
- 123 Surat No : B/788/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 perihal Data Perdagangan Manusia, Pornoaksi/ Pornografi dan PJTKI. (copy).
- 124 Data Hotel, Restoran, Kedai Kopi dan Tata Rias Pengantin Kab. Indragiri Hilir Tahun 2006. (copy)
- 125 Daftar Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Khusus Pajak Hotel dan Restoran untuk Bulan Juni 2006.
- 126 Proposal Studi Banding dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Propinsi Riau.
- 127 Pokok-pokok Pikiran perlunya Kebijakan Daerah Menyikapi Fenomena Perdagangan Manusia (Trafficking) Perempuan dan Anak Untuk Propinsi Riau.
- 128 Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di Propinsi Riau Tahun 2006 oleh P3W Universitas Riau.
- 129 Jual Beli Perempuan dan Anak (Trafficking) di Propinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) universitas Riau tanggal 4 Oktober 2006.
- 130 Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 170/J-19/AK/ 2004 Tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Riau Periode 2004-2008 tanggal 29 November 2004. (copy).
- 131 Surat Keputusan Ketua Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Riau Nomor : 01/P3W-UNRI/5K/I/2005 Tentang Susunan

Hal. 299 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Pada Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Riau tanggal 10 Januari 2005. (copy).

- 132 Informasi Data Dan Atau Data Yang Akan Dicari.
- 133 Surat Perintah Perjalanan Dinas. (copy)
- 134 Jadwal kegiatan presentase pengkajian dan penelaahan Ranperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau (copy).
- 135 Proposal Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking Provinsi Riau. (copy).
- 136 Undangan Nomor : 186/Und/BKOW7II/2006 dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita.
- 137 Proposal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) Propinsi Riau. (asli).
- 138 Catatan Tulisan Tangan.
- 139 Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor :77/J19/AK/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Periode 2006-2010.
- 140 Surat IKHSAN,SH, MH selaku Ketua Tim Peneliti No. 14/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Permohonan Informasi Data.
- 141 Surat Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 29 Mei 2006.
- 142 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor :002/BKBH-UNRI/W2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 143 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 003/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 144 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 004/BKBH-UNRI/W2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan.



- 145 Surat Keputusan Ketua Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Riau Nomor : 005/BKBH-UNRI/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, tentang Susunan Tim Ahli Analisa Data Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 146 Surat Ketua BKBH Nomor : 012/BKBH-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, Perihal Permohonan Adendum Waktu Pekerjaan dan Bantuan Pencairan Dana Kajian.
- 147 Surat Adendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 33/SPPP/UM/V/20006/890 tanggal 29 Mei 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan dan Pengkajian Dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- 148 Surat Keputusan Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau Nomor : 01/BKBH/PN/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Staf Badan Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Riau.
- 149 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 Uang Sejumlah Rp.395.000.000,-
- 150 Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2006.
- 151 Surat Perintah Perjalanan Dinas Tanggal 24 Agustus 2006.
- 152 Surat Tugas Nomor : 13/BKBH-UNRI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006.
- 153 Surat Daftar Pembayaran Honorarium tim Peneliti ahli pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan bulan Juli - September 2006, tanggal 25 Agustus 2006.
- 154 Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan tanggal 17 Oktober 2006
- 155 Surat Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Perda yang ada dan Tidak Efektif dalam Konteks Perubahan Sistim Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 Agustus 2006.
- 156 Surat Tanda Terima tanggal 25 Oktober 2006.
- 157 Surat Ketua BKBH Nomor : 016/BKBH-UNRI/X/2006 tanggal 28 Oktober 2006, perihal Penyerahan Draft laporan Akhir Kajian.

Hal. 301 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158 Surat Tanda Terima tanggal 19 Desember 2006.
- 159 Surat Tanda Terima Titipan Uang Denda tanggal 4 Agustus 2006.
- 160 Surat tanda terima tanggal 24 Agustus 2006.
- 161 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 25 Mei 2006, Rapat Tim Persiapan Proposal.
- 162 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2006, Rapat Turun Lapangan.
- 163 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2006, Persiapan Turun Lapangan.
- 164 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan.
- 165 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 11 September 2006, Evaluasi Data Lapangan.
- 166 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin Tanggal 25 September 2006, Analisis Data.
- 167 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Selasa Tanggal 26 September 2006, Analisis Data.
- 168 Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam Konteks Perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006, Persiapan Ekspose.
- 169 Keputusan Rektor UNRI Nomor: 170/J19/AK/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang pengangkatan Dra. Lenda Farida.M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (fotocopy).



- 170 Keputusan Kepala P3W UNRI No: N- 01/P3W-UNRI/SK/I/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Susunan Kepengurusan pada P3W UNRI (foto copy)
- 171 Salinan Kep. Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 009/0/2003 tanggal 27 Januari 2005 tentang Statute UNRI (foto copy)
- 172 Keputusan REKTOR UNRI Nomor: 024/J19/KP/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Pusat dan Badan-badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UNRI (fotocopy).
- 173 Surat Sekda DPRD Propinsi Riau Nomor: 890/SP-UM/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang kerjasama (foto copy).
- 174 Surat P3W Nomor: 39/PSW-UNRI/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 perihal kerjasama pengkajian Ranperda Trafficking (foto copy).
- 175 Proposal pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking Propinsi Riau (foto copy)
- 176 Note Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Propinsi Riau dengan P3W UNRI tanggal 15 Juni 2007 (foto copy)
- 177 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (foto copy)
- 178 Surat P3W Nomor: 43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 tentang Mohon Bantuan Pencairan Dana Penelitian dan Addendum Waktu (asli)
- 179 Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 tanggal 16 Juni 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking No: 43/PSW-UNRI/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 (asli).
- 180 Tanda terima draf Laporan Akhir Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) kepada Sekretaris DPRD Propinsi Riau tanggal 24 Oktober 2006 (asli)
- 181 Keputusan Ketua P3W No: 014/P3W-UNRI/SK/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking (asli).
- 182 Keputusan Ketua P3W No: 015/P3W-UNRI/5K/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Susunan Tim Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan

Hal. 303 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



- Ranperda tentang Trafficking beserta lampiran susunan Tim Enumerator (asli).
- 183 Tanda terima SPPD Kegiatan /Pekerjaan Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking No: 53/SPPP/UM/VI/2006/890 dari Dra. Hj. Lena Farida.,M. Si oleh Zulfikar tanggal 20 Desember 2006 (foto copy)
- 184 Tanda terima uang sebesar Rp.395.000.000,- dari Sekretaris DPRD Propinsi Riau oleh Dra. Hj. Lena Farida,M.Si tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy)
- 185 Kwitansi uang sejumlah Rp. 395.000.000,- dari Sri Mekka.S oleh Dra. Hj. Lena Farida.M.Si tanggal 25 Agustus 2006 (asli)
- 186 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy)
- 187 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy)
- 188 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Peneliti Ahli Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy)
- 189 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Juli 2006 tanggal 26 Agustus 2006 (foto copy)
- 190 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan Agustus 2006 tanggal 1 September 2006 (foto copy)
- 191 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Enumerator Pengkajian dan Penelaahan ranperda tentang Trafficking bulan September 2006 tanggal 9 September 2006 (foto copy)
- 192 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Analisa Data Pengkajian dan Penelaahan Ranperda Tentang Trafficking bulan Juli sampai dengan September 2006 tanggal 25 September 2006 (foto copy)
- 193 Tanda terima uang sejumlah Rp. 59.250.000,- dari Dra. Hj. Lena Farida,M.Si untuk setoran Potongan Pajak untuk Kegiatan pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking penerima Darma Evita tanggal 25 Agustus 2006 (foto copy)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194 SSP setoran pungutan PPh 21 dari biaya Enoumenator Penelitian Ahli & Pengolah Data Kegiatan pengkajian dan Penelaahan Ranperda tentang Trafficking sebesar Rp. 59.250.000,- tanggal 22 Desember 2006 (asli).
- 195 Tanda terima titipan uang denda sebesar Rp. 19.750.000,- atas kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Trafficking dari Dra. Hj. Lena Farida penerima Dharma Evita tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy)
- 196 SPPD An. Drs. Kasmiruddin tanggal 19 September 2006 (asli)
- 197 SPPD An. Dra. Siti Sofro,M.Si tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 198 SPPD An. Dra. Risdianti tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 199 SPPD An. Drs. Endang Sutrisna M.Si tanggal 19 September 2006 (asli)
- 200 SPPD An. Tuti Khairani, M,Si tanggal — (asli)
- 201 SPPD An. Dra. Nurayam.MS tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 202 SPPD An. Dra. Sofia Agnes,M.Si tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 203 SPPD An. Mandataris,S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli)
- 204 SPPD An. Weldo,S.Sos tanggal 18 September 2006 (asli)
- 205 SPPD An. Siti Muhairanum tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 206 SPPD An. Mira Anita tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 207 Surat Tugas Nomor: 10/P3W-UNRI/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli)
- 208 Surat Tugas Nomor: 11/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 (asli)
- 209 Surat Tugas Nomor: 12/P3W-UNRI/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 (asli)
- 210 Surat Tugas Nomor: 14/P3 W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 211 Surat Tugas Nomor: 15/P3W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (asli)
- 212 Surat Tugas Nomor: 16/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 18 September 2006 (asli)
- 213 Surat Tugas Nomor: 17/P3W-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 (asli)
- 214 Informasi Dan Atau Data Yang Akan Dicari (foto copy)
- 215 K-I Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk TKW (Korban)
- 216 K-II Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (pertanyaan untuk Traffiker (Calo, Penampung dan lain-lain)

Hal. 305 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 217 K-III Pedoman Wawancara Penelitian tentang Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Riau (Pola dan Jenis Intervensi/Layanan)
- 218 Surat P3W No: 46/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Dumai tentang Mohon Ijin Penelitian (asli)
- 219 Surat P3W No: 47/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Renaga Kerja Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 220 Surat P3W No : 48/PSW-UNRI/VIII/ 2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 221 Surat P3W No: 49/P5W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Panwisata Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 222 Surat P3W No: 50/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua tim Penggerak PKK Ketua SOW Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 223 Surat P3W No: 51/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapolres Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 224 Surat P3W No: 52/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Dumai tentang Bantuan Data (asli)
- 225 Surat P3W No: 54/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Walikota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 226 Surat P3W No: 55/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada kadis Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 227 Surat P3W No: 56/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada BKS Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 228 Surat P3W No. 57/P5W-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kadis Pariwisata Kota Pekanbaru tentang bantuan Data (asli)
- 229 Surat P3W No. 58/PSW-UNPJVIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Ketua Tim Panggerak PKK Ketua SOW Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 230 Surat P3W No: 59/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kapoltabs Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 231 Surat P3W No: 60/PSW-UNRI/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru tentang Bantuan Data (asli)
- 232 Surat P3W No: 75/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)



- 233 Surat P3W No: 74/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Panggerak PKK Ketua SOW Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 234 Surat P3W No: 73/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 235 Surat P3W No: 72/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kab. Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 236 Surat P3W No: 71/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 237 Surat P3W No: 70/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hulu tentang Bantuan Data (asli)
- 238 Surat P3W No: 63/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 239 Surat P3W No: 64/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 240 Surat P3W No: 65/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada BKS Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 241 Surat P3W No: 66/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kadis Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 242 Surat P3W No: 67/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Ketua GOA Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli)
- 243 Surat P3W No: 68/PSW-UNRI/IX/2006 tanggal 1 September 2006 kepada Kapolres Kabupaten Rokan Hilir tentang Bantuan Data (asli).

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa IKHSAN, SH., MH.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 307 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi jelas memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan salah dalam menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru, karena pertimbangan *Judex Facti* telah menurut peraturan perundangan-undang yang berlaku;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tepat dan benar dalam menilai bahwa Pengkajian dan Penelaahan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Riau dilaksanakan dengan Swakelola yang dalam hal ini dilakukan oleh Peneliti dan Perguruan Tinggi yang ada di Propinsi Riau;

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Propinsi Riau telah diangkat sebagai pengguna anggaran dengan surat keputusan Gubernur Propinsi Riau tanggal 24 Maret 2006 No. KPTS. 121/II/2006 dengan pos belanja operasi pemeliharaan Sekretariat DPRD Propinsi Riau sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) melaksanakan tujuh kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola;

Bahwa menurut ketentuan umum swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan dengan diawasi sendiri oleh Pelaksana Swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun upah borongan;

Bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola antara lain pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan Pemerintah, pengujian di Laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Ilmiah Pemerintah (Pasal 39 ayat (3) huruf g KEPRES RI No.80 Tahun 2003);

Bahwa pekerjaan khusus yang hanya memerlukan tenaga ahli Peneliti dari Perguruan Tinggi dalam lingkungan Propinsi Riau dalam hal Bab III KEPRES RI No.80 Tahun 2003 tentang Swakelola Pasal 39 tidak ditentukan Pengguna Anggaran harus mengangkat pejabat pembuat komitmen dan membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ditunjuk untuk melaksanakan tujuh Kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Riau yang terdiri dari :

- 1 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pornografi dan Pornoaksi;



- 2 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
- 3 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- 4 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Kasim;
- 5 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah yang tidak efektif dalam konteks perubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- 6 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Trafficking;
- 7 Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Voucher Untuk Urusan Pemerintahan;

Bahwa ketujuh kegiatan Pengkajian dan Penelaahan tentang Peraturan Daerah tersebut diatas adalah pengkajian khusus yang dapat dilaksanakan dengan swakelola yaitu pekerjaan pemrosesan data berupa Perumusan Kebijakan Pemerintah yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli peneliti dari masing-masing Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang dalam hal dilakukan oleh peneliti dan Perguruan Tinggi yang ada di Propinsi Riau;

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata tentang pendapat Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 secara bersama-sama dan berlanjut serta adanya kerugian Negara berdasarkan hasil temuan BPKP Propinsi Riau;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas KEPRES No.80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 39 ayat (4) dapat dilihat prosedur dan tahapan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda DPRD Propinsi Riau tahun anggaran 2006 dilaksanakan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a Tahap Perencanaan meliputi usulan kegiatan, pembahasan dan penawaran serta penanda tanganan kerjasama;
- b Tahap Pelaksanaan meliputi usulan dan pencairan dana serta kegiatan penelitian dan tugas di lapangan;
- c Tahap Pengawasan Lapangan meliputi Pengawasan dan Evaluasi oleh Sekwan;
- d Tahap Pelaporan meliputi penyampaian hasil kegiatan dan laporan hasil kegiatan;

Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan kegiatan tahap perencanaan saja ditambah dengan 1 (satu) kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda tentang Pornografi dan Pornoaksi, karena Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2006 dimutasi ke Balitbang Propinsi

Hal. 309 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



Riau berdasarkan SK Gubernur Riau No. Kpts. 288/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang pengangkatan/pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di lingkungan Sekretariat DPRD pada Pemerintahan Propinsi Riau, sehingga tahap pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pengkajian dan penelaahan Ranperda lainnya bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa melainkan menjadi tanggung jawab Sekwan baru;

Bahwa oleh karenanya unsur secara bersama-sama dan berlanjut juga tidak dapat dikatakan telah terbukti secara hukum, sebab pekerjaan tersebut tidak sampai selesai dipegang oleh Terdakwa;

Bahwa terdapatnya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung. Hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK RI Pekanbaru No. 40a/S/XIV.10/07/2007 tanggal 2 Juli 2007;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Perwakilan BPK RI Pekanbaru No. 40a/S/XIV.10/07/2007 tanggal 2 Juli 2007, atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Riau tahun anggaran 2006, tidak ditemukan kerugian Negara pada Sekretariat DPRD Propinsi Riau tahun anggaran 2006, khususnya terhadap kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Ranperda DPRD Propinsi Riau tahun anggaran 2006 dan diperkuat dengan laporan atas pengendalian intern Perwakilan BPK RI Pekanbaru No. 40c/XIV.10/07/2007 tanggal 2 Juli 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan No. 40b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang tidak ada memuat dan opini adanya kerugian Negara di satuan kerja Sekretariat DPRD Propinsi DPRD;

Bahwa hasil Laporan Pemeriksaan BPKP Propinsi Riau sangat tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk menentukan kerugian Negara sebab data-data yang diperoleh oleh BPKP Propinsi Riau untuk melakukan pekerjaan hanya data yang diberikan oleh Penyidik berdasarkan BAP dan tidak ada melakukan pemeriksaan ke satuan kerja Sekretariat DPRD Propinsi Riau, sehingga sangat diragukan keabsahan dan kebenarannya serta sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPK RI Pekanbaru;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas murni adalah pendapat yang keliru;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum yang dipakai sebagai dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni putusan bebas tersebut hanya mengacu kepada alasan semata-mata penilaian hasil pembuktian dan hal-hal yang sudah tepat dan benar



dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas, oleh karena itu berdasarkan Pasal 244 KUHAP harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sudah jelas dan terang *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan “menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Pasal 2 tersebut diatas tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair (vide putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.146/PID/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 alinea 5 halaman 125);

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dalam memberikan putusannya hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :163K/Kr/1977 tanggal 6 Nopember 1979 yang menyatakan “karena unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan dalam surat dakwaan tidak terbukti, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan”;

Bahwa menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP baru dikatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila *Judex Facti* berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi itu bukanlah suatu perbuatan tindak pidana (*Onstlag Van Alle Rechtsveeervolving*), sedangkan dalam perkara a quo, *Judex Facti* berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga menurut hukum Terdakwa harus diputus bebas (*Vrijspraak*);

Putusan Mahkamah Agung RI No.2566 K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa Ikhsan, SH., MH.;

Bahwa terdapatnya perbedaan putusan antara perkara a quo dengan perkara yang sama terhadap Terdakwa yang lain (Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2566 K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa Ikhsan, SH., MH);

Bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.2566 K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa Ikhsan, SH., MH. Majelis Hakim Kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah kabur (*obscur libel*) karena uraian dakwaan primer dan subsidair sama substansinya, sedangkan Pasal yang didakwakan adalah berbeda, yaitu primair Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa jika diperhatikan dakwaan dalam perkara a quo juga sama hal dengan perkara Terdakwa Ikhsan, SH., MH. dan sudah sepantasnya Majelis Hakim tingkat kasasi dalam pertimbangan hukum juga mempertimbangkan hal tersebut, sehingga dengan adanya pertimbangan hukum tersebut, maka hasilnya tidak akan berupa putusan seperti dalam perkara a quo;

Hal. 311 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah tepat dan benar serta tidak mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata;

Bahwa proyek yang ditangani Pemohon tidak dapat dikerjakan secara swakelola mengingat nilainya yang jauh diatas ambang yang ditetapkan Kepres No. 80 Tahun 2003

Bahwa sesuai ketentuan Kepres No. 103 Tahun 2001 BPKP mempunyai kewenangan untuk melakukan audit investigatif sedang laporan BPK yang diajukan oleh Pemohon pemeriksaanya baru dilakukan pada awal bulan Juli 2007;

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan Judex Juris tidak ternyata adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata. Judex Juris sudah tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan, kemudian mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusan berdasarkan proses pembuktian yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bukti novum yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat mengesampingkan pembuktian adanya kerugian keuangan Negara berdasar hasil pemeriksaan pihak BPKP Propinsi Riau yang dilakukan sejak bulan Mei 2007 sedangkan BPK baru melakukan pemeriksaan diawal bulan Juli 2007;

Bahwa hasil pemeriksaan BPKP selama ini telah diterima oleh praktik peradilan sebagai keterangan ahli untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara;

Bahwa begitu pula dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No.2566 K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 Maret 2010 a.n Ikhsan, S.H., M.H. tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali kendati substansi kasusnya berhubungan dengan perkara Pemohon peninjauan kembali, sebab dalam pertimbangan dan amar putusan kasasi a.n. Ikhsan a quo salinf bertentangan (kontradiktif);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-  
312

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yangbersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : Drs. H. RUSKIN HAR, MBA tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 oleh Djoko Sarwoko SH., MH.,Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan Prof. DR. Krisna Harahap, SH., MH. Hakim Agung dan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 313 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2012